



PD. BPR
BANK DAERAH BOJONEGORO

Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro Telp. 0353-883956 Fax. 0353-881201
E-mail: bpr_daerah_bjn@yahoo.co.id

Bojonegoro, 26 Februari 2025

Nomor : 580 / 161/ 214.412/ II /2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada :

Yth. Bapak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD)
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di – **Bojonegoro**

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun
Anggaran 2024 (Audited).

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 900/556/412.303/2025 tentang Permintaan Laporan Keuangan Audited BUMD Tahun 2024, maka bersama ini kami menyampaikan Laporan Keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 (*Audited*) sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.



SUTARMINI

Direktur utama

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. Bpk. Kepala Bagian Perekonomian & SDA Kab. Bojonegoro.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
PD. BPR BANK DAERAH BOJONEGORO
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2024

Nomor : 00021/3.0290/AU.2/07/1070-1/1/II/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

Laporan Keuangan
beserta
Laporan Auditor Independen
31 Desember 2024

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi	
Laporan keuangan	
1. Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023	2
2. Lapoaran Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	3
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	4
4. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023	5
5. Catatan atas Laporan Keuangan.....	6 - 23
Laporan Auditor Independen	



**PD. BPR
BANK DAERAH BOJONEGORO**

Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro Telp. 0353-883956 Fax. 0353-881201
E-mail: bpr_daerah_bjn@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutarmini, SE
Alamat Kantor : Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro
Alamat sesuai KTP : Karang Klumprik Utara V/FF-25 Balas Klumprik Wiyung
Surabaya
Jabatan : Direktur Utama

Untuk atas nama Komisaris dan Direksi **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO** sebagai pihak yang bertanggungjawab atas **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH** menyatakan bahwa:

1. **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH** adalah entitas yang memenuhi keiteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
2. Pengurus telah menyusun dan menyajikan laporan **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH** untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan;
3. Laporan keuangan **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH** untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ;
4. Semua informasi dalam laporan keuangan **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH** telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material ;
5. **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO** telah membuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut telah disimpan oleh Perusahaan sesuai Ketentuan Undang-undang yang berlaku.
6. Pengurus **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO** bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO**, serta sistem pengendalian internal dalam **PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Atas nama dan mewakili Komisari dan Direksi

Bojonegoro, 24 Februari 2025

Direktur Utama




Sutarni SE

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3	9.320.684.000	16.832.132.927
Penempatan Pada Bank Lain	2c, 4	70.882.499.673	66.869.499.444
Penyisihan Penghapusan	2e, 4	(321.688.662)	(297.734.982)
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	5	1.960.676.968	1.981.988.199
Kredit yang Diberikan	2d, 6	420.068.935.415	413.686.670.077
Penyisihan Penghapusan	2e, 6	(20.891.782.914)	(20.824.970.960)
Agunan Diambil Alih	7	5.636.464.543	-
Jumlah Aset Lancar		486.655.789.023	478.247.584.706
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.968.516.501 tahun 2024 dan Rp5.068.773.872 tahun 2023			
	2g, 8	9.970.790.507	10.128.804.136
Aset Tidak Berwujud	9	294.111.444	391.778.688
Aset Lain-lain	10	10.787.829.768	3.068.857.014
Jumlah Aset Tidak Lancar		21.052.731.719	13.589.439.838
JUMLAH ASET		507.708.520.742	491.837.024.544
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	11	2.265.481.385	3.033.482.171
Utang Bunga	12	384.157.375	510.686.931
Hutang Pajak	2n, 13a	2.748.020	232.973
Simpanan	2j, 14	157.789.711.868	124.569.060.333
Simpanan dari bank lain	15	71.845.736.958	95.199.539.759
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2m, 16	1.624.081.039	1.909.170.584
Kewajiban Lain-lain	17	11.444.787.587	11.478.343.436
Jumlah Kewajiban		245.356.704.232	236.700.516.189
EKUITAS			
	18		
Modal saham			
Modal dasar		400.000.000.000	400.000.000.000
Modal Belum Disetor		(190.000.000.000)	(190.000.000.000)
Tambahan Modal TA		4.532.500	4.532.500
Saldo Laba		52.347.284.010	45.131.975.856
Jumlah Ekuitas		262.351.816.510	255.136.508.356
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		507.708.520.742	491.837.024.544

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



SUTARMINI

Direktur Utama

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
- Pendapatan Bunga Kontraktual	2k, 19	54.112.326.451	49.021.658.073
- Pendapatan Provisi dan Beban Transaksi	2l, 20	4.454.844.537	4.211.265.157
Total Pendapatan		58.567.170.988	53.232.923.230
Beban Operasional			
- Beban Bunga	2j, 21	(10.867.896.867)	(8.536.107.057)
Pendapatan Bunga Bersih		47.699.274.121	44.696.816.173
PEDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Operasional Lainnya	22	15.295.299.061	19.207.963.782
Beban Operasional Lainnya			
- Beban Administrasi dan Umum	23	(19.465.551.470)	(16.487.883.888)
- Beban Pemasaran	24	(35.200.000)	(380.288.155)
- Beban Penyisihan Aset Produktif	25	(12.337.965.567)	(20.525.754.811)
- Beban Penyusutan Aset Tetap & Aset Tidak	26	(663.457.372)	(655.796.487)
Total Beban Operasional Lainnya		(32.502.174.409)	(38.049.723.341)
Beban Operasional Bersih Lainnya		(17.206.875.348)	(18.841.759.559)
Pendapatan Bersih Operasional		30.492.398.773	25.855.056.615
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional		42.795	40.920
Beban Non Operasional		(1.279.292.940)	(893.550.384)
Total Pendapatan Non Operasional		(1.279.250.145)	(893.509.464)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		29.213.148.628	24.961.547.151
- Beban Pajak Penghasilan	2n, 13b	(6.425.627.120)	(5.496.280.460)
LABA BERSIH		22.787.521.508	19.465.266.691

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



SUTARMINI

Direktur Utama

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	Modal Disetor		Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba Yang Telah Ditentukan		Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
	Awal	Rp		Penggunaannya			
				Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
		Rp		Rp		Rp	
Saldo per 1 Januari 2023	210.000.000.000	4.532.500	-	10.712.006.050	10.545.327.716	22.046.876.993	253.308.743.259
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-	-	(12.125.782.346)	(12.125.782.346)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	(2.204.687.699)	(2.204.687.699)
Tantiem	-	-	-	-	-	(881.875.080)	(881.875.080)
Jasa Produksi	-	-	-	-	-	(1.763.750.159)	(1.763.750.159)
CSR	-	-	-	-	-	(661.406.310)	(661.406.310)
Cadangan Umum	-	-	-	-	2.204.687.699	(2.204.687.699)	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	2.204.687.699	-	(2.204.687.699)	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	19.465.266.691	19.465.266.691
Saldo per 31 Desember 2023	210.000.000.000	4.532.500	-	12.916.693.749	12.750.015.415	19.465.266.692	255.136.508.356
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	-	-	(10.705.896.680)	(10.705.896.680)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	(1.946.526.669)	(1.946.526.669)
Tantiem	-	-	-	-	-	(778.610.668)	(778.610.668)
Jasa Produksi	-	-	-	-	-	(1.557.221.335)	(1.557.221.335)
CSR	-	-	-	-	-	(583.958.001)	(583.958.001)
Cadangan Umum	-	-	-	-	1.946.526.669	(1.946.526.669)	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	1.946.526.669	-	(1.946.526.669)	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	22.787.521.508	22.787.521.508
Saldo per 31 Desember 2024	210.000.000.000	4.532.500	-	14.863.220.418	14.696.542.084	22.787.521.508	262.351.816.510

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	2024	2023
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih	22.787.521.508	19.465.266.691
Koreksi Saldo Laba	-	-
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Bersih Menjadi Kas Dari Kegiatan Usaha:		
Penyisihan (Pemulihan) Penghapusan Aset Produktif	66.811.954	3.264.268.583
Penyusutan Aset Tetap	(100.257.371)	519.942.412
Penyusutan Aset Tak Berwujud	145.667.244	135.854.075
Penyisihan Kerugian ABA	23.953.680	(226.554.669)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
Pendapatan Bunga Akan Diterima	21.311.231	157.969.138
Kredit Yang Diberikan	(6.382.265.338)	(75.726.754.178)
Aset Lain-lain	(7.718.972.754)	266.600.984
Agunan Diambil Alih	(5.636.464.543)	-
Kewajiban Segera	(768.000.786)	(671.249.107)
Utang Bunga	(126.529.556)	(276.612.135)
Utang Pajak	2.515.047	(824.127)
Simpanan	33.220.651.535	(1.115.501.413)
Simpanan dari Bank Lain	(23.353.802.801)	30.835.317.255
Kewajiban Imbalan Kerja	(285.089.545)	375.512.532
Kewajiban Lainnya	(33.555.849)	3.646.201.454
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	11.863.493.656	(19.350.562.506)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(352.276.500)	(96.502.502)
Pengurangan/penyesuaian Aset Tetap	610.547.500	3.290.000
Penambahan aset tetap tidak berwujud	(48.000.000)	(323.794.000)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	210.271.000	(417.006.502)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran Deviden	(10.705.896.680)	(12.125.782.346)
Pembayaran dana kesejahteraan	(1.946.526.669)	(2.204.687.699)
Pembayaran jasa produksi	(1.557.221.335)	(1.763.750.159)
Tentiem	(778.610.668)	(881.875.080)
CSR	(583.958.001)	(661.406.310)
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	(15.572.213.354)	(17.637.501.594)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(3.498.448.698)	(37.405.070.604)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	83.701.632.371	121.106.702.974
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	80.203.183.673	83.701.632.371

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

1. UMUM

a. Pendirian

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 14 Tahun 1995, ditetapkan dan disahkan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 1995 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bojonegoro tahun 1995 seri C tanggal 9 Oktober 1995 Nomor 6/C. Kemudian disahkan oleh Gubernur Jawa Timur dengan Surat Keputusan No. 475/P tahun 1995. Peningkatan status PD BKP menjadi PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keterangan Bank Indonesia No. 28.209/UBPR/Sb/Rahasia tanggal 15 Desember 1995. Dengan beberapa kali perubahan hingga berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (selanjutnya disebut PD BPR Daerah Bojonegoro). bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 14 tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2016. adalah sebagai berikut:

1. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi, kehati-hatian, profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
2. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
3. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil, menengah dan sektor pertanian.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
4. Melakukan kerjasama anatar PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya.
5. Menempatkan dan dalam bentuk sertifikat BI deposito berjangka dan tabungan di bank lainnya.
6. Membantu Pemerintah daerah melaksanakan sebagai fungsi pemegang kas daera sesuai peraturan perundang-
7. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Lokasi Perusahaan

Alamat : Jl. Mastrip No. 35 Bojonegoro
Telp/Fax : (0353) 883956 / (0353) 881201
Email : bpr_daerah_bjn@yahoo.co.id
3 Kantor Cabang : Di Kecamatan kedungadem, Kalitidu dan Sumberrejo
10 Kantor Kas : Di Kecamatan Gondang, Banjarrejo, Baureno, Ngraho, Kepohbaru, Sekar, Kasiman, Sugihwaras, Kanor dan Sukosewu

Persetujuan izin operasional pembukaan Kantor Cabang (KC) di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan :

- Kantor Cabang (KC) Kedungadem pindah dari Jl. Raya Pasar Kedungadem Bojonegoro ke Jl. Gajah Mada No. 29 kedungadem, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro sesuai surat OJK No. S-156/KR.0421/2017 tanggal 14 September 2017, perihal persetujuan izin efektif pemindahan alamat Kantor Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Surat OJK nomor S-78/KR.0421/2022.
- Kantor Cabang (KC) Kalitidu berlokasi di Jl. Raya Bojonegoro Cepu No. 1688 Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu No. S-803/KR.042/2019 tanggal 05 September 2019.

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

1. UMUM (Lanjutan)

c. Lokasi Perusahaan

- Kantor Cabang (KC) Sumberrejo berlokasi di Jl. Timur Koramil Sumberrejo No. 37 dengan No. S-1045/KR.0421/2020 tanggal 28 Juli 2020.

Persetujuan pembukaan Kantor Kas (KK) di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan:

- KK Gondang berlokasi di Jl. Raya Gondang No. S-67/KR.31/2015 tanggal 1 April 2015.
- KK Banjarrejo berlokasi di Jl. Letnan Sucipto No. 218A, Desa Banjarsari kecamatan Trucuk No. S-593/KR.0421/2020 tanggal 24 Maret 2020.
- KK Baureno berlokasi di Jl. Raya Bojonegoro Lamongan No. 2, Desa Gunungsari kecamatan Baureno No. S-920/KR.0421/2020 tanggal 20 Mei 2020.
- KK Ngraho berlokasi di Jl. AR Hakim RT 02 RW 01 Desa Ngraho, Kabupaten Bojonegoro No. S-444/KR.041/2016 tanggal 19 September 2016.
- KK Kepohbaru berlokasi di Desa Kepoh RT 005 RW 002, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro No. S-255/KR.0421/2018 tanggal 19 April 2018.
- KK Sekar berlokasi di Desa Miyono RT 002 RW 001 Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro
- KK Kasiman berlokasi di Desa batokan RT 003 RW 001 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro
- KK Sugihwaras berlokasi di Jalan Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
- KK Kanor berlokasi Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro surat No. 580/20.214.412/1/2024.
- KK Sukosewu berlokasi Jl. Raya Sukosewu RT 05 RW 01 Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro surat No. 580/19/214.412/1/2024 tanggal 04 Januari 2024.

Izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia No. Kep-153/KM.17/1996, Jakarta tanggal 01 Mei 1996.

Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia 912030884 tanggal 20 Agustus 2019.

Nomor Pokok Wajib Pajak PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan nomor 01.538.633.7.601.000

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188/231/KEP/412.013/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang pemberhentian Sdri. Sutarmini SE., MM sebagai Direktur Utama Periode (2017-2021) dan pengangkatan kembali Direktur Utama yaitu Sutarmini SE, MM Periode (2021-2026) Surat Keputusan Bupati No. 188/760/KEP/412.013/2019 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan dan SDM serta Direktur Operasional dan Bisnis (Periode 2019-2024).

Pemberhentian Dewan Komisaris Sementara PD. BPR Bank daerah Bojonegoro dengan surat keputusan 188/375/KEP/412.013/2020 pada tanggal 17 April 2020 dan Surat Keputusan Bupati No. 188/02/KEP/412.013/2020 tanggal 26 Februari 2020.

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 31 Desember 2024 dan 2023. adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas :

- Pengawas : -
- Pengawas : -

Direksi :

- Direktur Utama : Sutarmini., SE., MM
- Direktur Kepatuhan dan SDM : Prasto Dwi Wahjono, SE
- Direktur Operasional dan Bisnis : Moch Arief, SE

Jumlah karyawan BPR pada tahun 2024 sebanyak 82 orang terdiri dari 73 orang karyawan tetap 9 orang karyawan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia,dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indonesia No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Edaran No 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual, kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat secara dasar kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab. 28, Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

1. Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow).
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas.
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas
2. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
3. Pihak tersebut adalah joint ventures di mana entitas tersebut merupakan venturer.
4. Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
5. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (a) atau (d).
6. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan. Secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (d) atau (e).
7. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

c. Penempatan Bank Lain

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjian sesuai dengan jenis dana yang ditempatkan.

d. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh bank. Di dalam kredit tidak termasuk bentuk-bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari kredit yang diberikan dan penempatan pada bank lain.

Penentuan kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang mengklasifikasikan aset produktif dalam 5 (lima) kategori dengan prosentase penyisihan penghapusan sebagai berikut :

Klasifikasi	Keterangan	% PPAP
Lancar	PPAP Umum	0,5%
Dalam Perhatian Khusus	PPAP Khusus	3%
Kurang Lancar	PPAP Khusus	10%
Diragukan	PPAP Khusus	50%
Macet	PPAP Khusus	100%

Prosentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Sesuai dengan POJK No.34/POJK.03/2020 pasal 3, BPR/BPRS dapat membentuk PPAP umum kurang dari 0,5% atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif berupa penempatan pada bank lain dan kredit/pembiayaan dengan kualitas lancar untuk Laporan Bulanan sejak posisi April 2021.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (lanjutan)

Aset produktif dihapusbukukan dari masing-masing penyisihan penghapusan pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak akan tertagih atau terealisasi lagi. Penyisihan penghapusan aset produktif dibebankan seluruhnya dalam tahun berjalan. Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan penghapusan selama periode berjalan.

f. Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan

Penambahan fasilitas kredit dengan mengonversi tunggakan bunga yakni penambahan nilai tercatat kredit yang diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. Pendapatan bunga yang ditangguhkan diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga apabila kredit termasuk kategori performing. tidak diamortisasi dan tidak diakui sebagai pendapatan bunga apabila kredit termasuk kategori non-performing. Pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang merupakan hasil konversi tunggakan bunga, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

g. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap bangunan dan inventaris menggunakan metode garis lurus (*Straight-Line Method*) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

	Tahun	Persentase/tahun
Bangunan	10 - 20	5% - 10%
Kendaraan	4 - 8	12,5% - 25%
Inventaris Kantor	4 - 8	12,5% - 25%

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi).

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

h. Uang Muka Pajak

Uang muka pajak merupakan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan namun belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight – line menthod*)

j. Simpanan

Tabungan dan Deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.

k. Pendapatan dan Beban Bunga

Bank mengakui pendapatan dan beban bunga atas dasar akrual. Pendapatan bunga atas aset produktif yang diklasifikasikan sebagai non-performing (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui pada saat diterima secara tunai (cash basis). Pada saat aset produktif diklasifikasikan sebagai non-performing, tagihan bunga yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima, dibatalkan. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya diklasifikasikan sebagai non-performing pada saat pokok dan/atau bunga telah lewat jatuh tempo lebih dari tiga bulan atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok dan / atau bunga tersebut diragukan.

l. Pendapatan Provisi

Pendapatan provisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight-line methode*) masing-masing sesuai dengan jangka waktu kredit atau kontrak. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

m. Imbalan Pasca Kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 "imbalan kerja" Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Dalam ketentuan tersebut bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja kompensasi karyawan pada saat penyelesaiann hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 adalah program imbalan pasti.

n. Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan. BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, BPR harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui pajak tangguhan.

3. KAS

	2024	2023
	Rp	Rp
Kas Kantor Pusat	8.081.179.600	8.499.864.200
Kas Kantor Cabang	1.239.504.400	8.332.268.727
Jumlah	9.320.684.000	16.832.132.927

4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
Tabungan	57.715.888.262	52.308.317.736
Deposito	10.030.000.000	30.000.000
Giro	3.136.611.411	14.531.181.708
Jumlah	70.882.499.673	66.869.499.444
Penyisihan Penghapusan ABA	(321.688.662)	(297.734.982)
Jumlah	70.560.811.011	66.571.764.462
Rincian:		
a. Tabungan		
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)., Tbk	24.700.334.545	30.160.915.609
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur., Tbk	17.669.727.963	18.911.658.715
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero)., Tbk	464.505.496	971.423.159
- PT. Bank Mandiri (Persero)., Tbk	14.621.973.142	2.006.654.120
- PT. Bank CIMB Niaga., Tbk	259.347.116	257.666.134
Jumlah	57.715.888.262	52.308.317.736
b. Deposito		
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)., Tbk	10.000.000.000	-
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur., Tbk	30.000.000	30.000.000
Jumlah	10.030.000.000	30.000.000
c. Giro		
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur., Tbk	1.473.359.301	13.944.186.825
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)., Tbk	1.663.252.110	585.384.883
- PT. Bank Permata., Tbk	-	1.610.000
Jumlah	3.136.611.411	14.531.181.708
Rincian penyisihan aset produktif adalah sebagai berikut:		
Saldo Awal	297.734.982	524.289.651
Pembentukan Penyisihan	513.815.596	449.064.119
Pemulihan Penyisihan Aset Produktif	(489.861.916)	(675.618.788)
Jumlah	321.688.662	297.734.982

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

4. **PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)**
 Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan aset produktif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2019 yaitu total giro, tabungan dan deposito dikalikan 0,5% setelah dikurangi lembaga penjamin simpanan untuk setiap rekening bank.

5. **PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA**

	2024	2023
	Rp	Rp
Kredit Diberikan - Modal Usaha	495.403.412	630.667.364
Kredit Diberikan - Konsumtif	1.389.905.185	1.261.985.145
Kredit Diberikan - Sindikasi	64.387.645	89.335.690
Bunga Deposito	10.980.726	-
Jumlah	1.960.676.968	1.981.988.199

6. **KREDIT YANG DIBERIKAN**

	2024	2023
	Rp	Rp
a. Kredit Menurut Jenis Penggunaan		
- Modal Kerja	127.320.326.797	160.793.701.607
- Konsumsi	243.669.860.361	218.797.923.743
- Sindikasi	53.088.594.414	38.310.524.608
- Provisi	(3.904.435.223)	(4.105.910.084)
- Biaya Transaksi	(105.410.934)	(109.569.797)
Jumlah	420.068.935.415	413.686.670.077
- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(20.891.782.914)	(20.824.970.960)
Total	399.177.152.501	392.861.699.117

b. Kredit Menurut Sektor Ekonomi					
Keterangan		2024		2023	
	%	Rp	%	Rp	
- Administrasi Pemerintahan Dan Pertanahan	42,04%	178.271.402.078	24,11%	100.767.553.936	
- Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	14,15%	60.009.312.704	24,22%	101.222.305.818	
- Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	2,01%	8.534.920.376	4,56%	19.052.872.920	
- Industri Pengolahan	0,67%	2.822.022.201	0,62%	2.576.300.129	
- Jasa Kemasyarakatan Sosial, Budaya dan Hiburan	0,23%	959.730.550	2,26%	9.463.656.450	
- Jasa Kesehatan Kegiatan Sosial	0,02%	101.564.109	0,08%	324.098.335	
- Jasa Pendidikan	0,00%	-	0,03%	127.135.773	
- Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	0,28%	1.199.950.666	0,16%	669.618.010	
- Kegiatan Usaha Yang Belum Jelas Batasanya	0,75%	3.164.034.725	1,16%	4.846.349.059	
- Konstruksi	3,20%	13.561.751.758	7,69%	32.143.436.569	
- Listrik, Gas Dan Air	0,00%	5.386.919	0,01%	34.344.551	
- Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0,11%	479.884.785	0,07%	300.728.317	
- Perantara Keuangan	0,00%	-	0,01%	32.132.457	
- Perdagangan Besar dan Eceran	20,08%	85.169.208.740	23,94%	100.031.441.866	
- Perikanan	0,03%	106.670.862	0,01%	49.677.292	
- Pertambangan dan Penggalian	0,00%	-	0,22%	924.382.175	
- Pertanian	4,00%	16.981.090.067	4,69%	19.585.449.920	
Jumlah dipindahkan		371.366.930.540		392.151.483.577	

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)				
b. Kredit Menurut Sektor Ekonomi (lanjutan)				
Keterangan	2024		2023	
	%	Rp	%	Rp
Jumlah pindahan		371.366.930.540		392.151.483.577
- Real Estate	12,40%	52.566.440.496	6,11%	25.543.882.385
- Transparansi, Pergudangan Dan Komunikasi	0,03%	145.410.536	0,05%	206.783.997
Jumlah	100,00%	424.078.781.572	100,00%	417.902.149.959
c. Kredit Menurut Kolektibilitas				
Keterangan	2024		2023	
	%	Rp	%	Rp
- 1 - Lancar	91,60%	388.443.858.045	89,74%	375.040.511.492
- 2 - Dalam Perhatian Khusus	0,64%	2.731.515.177	1,15%	4.784.986.132
- 3 - Kurang Lancar	0,73%	3.079.778.846	1,55%	6.457.804.208
- 4 - Diragukan	0,31%	1.301.103.307	0,62%	2.577.364.946
- 5 - Macet	6,73%	28.522.526.197	6,95%	29.041.483.181
- Kredit NPL	7,76%	32.903.408.350	9,11%	38.076.652.335
Total	100,00%	424.078.781.572	100,00%	417.902.149.959
d. Kredit Menurut Periode Jatuh Tempo Berdasarkan Kolektibilitas				
Keterangan	2024		2024	
	%	Rp	%	Rp
Jangka Waktu				
S/d 1 tahun	26,33%	111.660.221.861	27,86%	116.414.050.817
1 s/d 2 tahun	1,91%	8.090.503.576	10,69%	44.679.089.337
2 tahun keatas	71,76%	304.328.056.135	61,45%	256.809.009.805
Jumlah	100,00%	424.078.781.572	100,00%	417.902.149.959
e. Kredit Berdasarkan Pihak Terkait				
		2024		2023
		Rp		Rp
- Tidak Terkait		421.261.408.864		415.643.134.473
- Terkait		2.817.372.708		2.259.015.486
		424.078.781.572		417.902.149.959
f. Perubahan Penyisian Penghapusan Kredit				
		2024		2023
		Rp		Rp
- Saldo Awal		20.824.970.960		17.560.702.377
- Penyisihan Penghapusan Kredit		11.824.149.971		20.076.690.692
- Pemulihan PPAP		(11.757.338.017)		(16.812.422.109)
		20.891.782.914		20.824.970.960
Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan aset produktif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 17/POJK.03/2021.				
7. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH				
		2024		2023
		Rp		Rp
Agunan yang diambil alih		5.636.464.543		-
		5.636.464.543		-

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

7. **AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (Lanjutan)**
Agunan yang diambil alih sebesar Rp5.636.464.543 merupakan nilai baki debit pada saat penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank atas pinjaman nasabah PT Runinco Bumi Lestari yang telah pailit sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 101/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 05 Februari 2024 dan nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.sby tanggal 14 Juni 2024.

8. **ASET TETAP**

	01 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Tanah	8.175.518.250	-	-	-	8.175.518.250
Bangunan	1.783.393.266	-	-	-	1.783.393.266
Kendaraan	1.220.590.000	-	324.812.000	-	895.778.000
Inventaris Kantor	4.018.076.492	352.276.500	285.735.500	-	4.084.617.492
Jumlah	15.197.578.008	352.276.500	610.547.500	-	14.939.307.008
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	890.057.091	93.475.177	-	-	983.532.268
Kendaraan	1.220.589.982	-	324.811.994	-	895.777.988
Inventaris Kantor	2.958.126.799	416.814.952	285.735.506	-	3.089.206.245
Jumlah	5.068.773.872	510.290.129	610.547.500	-	4.968.516.501
Jumlah Tercatat	10.128.804.136				9.970.790.507

	01 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Tanah	8.175.518.250	-	-	-	8.175.518.250
Bangunan	1.786.683.266	-	3.290.000	-	1.783.393.266
Kendaraan	1.220.590.000	-	-	-	1.220.590.000
Inventaris Kantor	3.921.573.990	96.502.502	-	-	4.018.076.492
Jumlah	15.104.365.506	96.502.502	3.290.000	-	15.197.578.008
Akumulasi Penyusutan :					
Bangunan	797.026.295	93.030.796	-	-	890.057.091
Kendaraan	1.198.923.377	21.666.605	-	-	1.220.589.982
Inventaris Kantor	2.552.881.788	405.245.011	-	-	2.958.126.799
Jumlah	4.548.831.460	519.942.412	-	-	5.068.773.872
Jumlah Tercatat	10.128.804.136				10.128.804.136

Beban penyusutan aset tetap yang dialokasikan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban administrasi dan umum	510.290.129	519.942.412

9. **ASET TAK BERWUJUD**

	2024	2023
	Rp	Rp
Core Banking System	1.007.501.600	959.501.600
Akumulasi amortisasi	(713.390.156)	(567.722.912)
	294.111.444	391.778.688

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

10. ASET LAIN-LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
- Biaya Dibayar Dimuka	9.936.546.897	2.101.674.718
- Persediaan Barang Cetakan	1.540.000	1.540.000
- Persediaan ATK	620.725	620.725
- Persediaan Materai	1.398.000	1.658.000
- Persediaan Lainnya	470.905.946	602.545.371
- Rupa-rupa Aktiva Lainnya	360.818.200	360.818.200
- Aset Lainnya	16.000.000	-
Jumlah	10.787.829.768	3.068.857.014
a. Biaya Dibayar Dimuka Teridiri Dari:		
- Biaya dibayar dimuka sewa	2.551.475.597	2.041.486.806
- Biaya dibayar dimuka lainnya	7.385.071.300	60.187.912
	9.936.546.897	2.101.674.718
rincian biaya dibayar dimuka lainnya tahun 2024, sebagai berikut:		
Jasa akomodasi KJPP Tanah	7.500.000	
Uang Muka Pembelian Tanah	421.750.000	
Pengembangan BDP Mobile	39.960.000	
Pengembangan ATM Cardless	12.487.500	
Jasa konsultasi Pembangunan Gedung	494.800.000	
Pembayaran 20% Pembangunan Gedung	6.407.645.800	
Lainnya	928.000	
	7.385.071.300	
b. Persediaan Lainnya		
- Persediaan saldo loket	184.997.185	188.534.253
- Persediaan TF Penghasila Aparatur Desa	161.340.645	314.321.334
- Persediaan saldo flip	81.544.902	-
- Persediaan Raja Biller	42.452.221	99.118.791
- Persediaan barang cetakan lainnya	570.000	570.000
- Persediaan Saldo Winpay	993	993
	470.905.946	602.545.371
c. Rupa-rupa aktiva lainnya sebesar Rp360.818.200 merupakan Uang Tunai yang dijadikan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit pada PD Bank Daerah Bojonegoro Kantor Cabang Kalitidu tahun 2015 s/d tahun 2016 sesuai dengan tanda terima dokumen/barang oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Desember 2022.		

11. KEWAJIBAN SEGERA

	2024	2023
	Rp	Rp
Setoran Tagihan Kredit	73.719.916	275.584.006
Asuransi Kredit		
- Asuransi Kredit Jamkrida	361.863.362	157.769.862
- Asuransi Kredit Jiwa Seraya	165.000	165.000
- Asuransi Kredit Jasindo	73.732.145	73.732.145
- Asuransi Kredit Al-Amin	15.256.674	12.471.205
- Klaim Asuransi	143.065.690	13.909.500
- Subrogasi	5.022.500	1.822.500
- Restitusi	2.808.000	-
Akuntan Publik	49.023.248	41.145.248
Imbalan Kerja	22.480.000	398.283.572
Jumlah dipindahkan	747.136.535	974.883.037

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

11. KEWAJIBAN SEGERA (Lanjutan)

	2024	2023
	Rp	Rp
Jumlah pindahan	747.136.535	974.883.037
Pajak		
- Hutang PPh Tabungan	11.633.801	10.688.350
- Hutang PPh Deposito	67.659.314	48.881.182
- Pajak Jasa	33.282.794	29.609.479
- Pajak Lainnya	-	13.888.889
- PPh Psl 25	244.792.355	901.036.333
- Hutang PPh Psl 21	263.377.911	37.405.932
Biaya Notaris		
- Biaya Notaris APHT & SKMHT	152.011.500	119.281.500
- Biaya Noataris Notariil	101.789.000	110.509.000
- Biaya Noataris Fidusia	9.545.000	9.325.000
Barang Jasa	-	74.180.350
Jaminan Kesehatan	24.303.090	22.225.284
Telepon, Listrik, Air	24.752.744	33.027.740
Insentif Jasa Pengembangan Kredit	116.165.000	167.271.154
Kewajiban Segara DAK	17.518.050	17.518.050
Kewajiban Segara KPOB	5.900.000	-
Pencairan Subsidi Disdag	485.000	-
Pengembalian Subsidi Disdag	8.915.650	5.492.250
Kewajiban Segera Lainnya	436.213.641	458.258.641
Jumlah	2.265.481.385	3.033.482.171

12. UTANG BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban bunga yang masih harus dibayar	360.725.727	377.838.629
Utang bunga jatuh tempo - Deposito pihak ketiga	23.431.648	132.848.302
Jumlah	384.157.375	510.686.931

13. PERPAJAKAN

	2024	2023
	Rp	Rp
a. Utang pajak		
Pajak Penghasilan pasal 29	2.748.020	232.973
b. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN		
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	29.213.148.628	24.961.547.151
Koreksi Fiskal		
Seragam	219.566.294	120.354.500
Beban Non Operasional	358.097.320	666.403.608
Beban Imbalan Kerja	335.656.547	379.297.285
Pendapatan Bunga (ABA)	(919.072.711)	(1.144.508.909)
Jumlah Koreksi Fiskal	(5.752.550)	21.546.484
Laba setelah koreksi fiskal	29.207.396.078	24.983.093.635
Pembulatan	29.207.396.000	24.983.093.001
Taksiran Pajak Penghasilan		
22% x 24.983.093.001		5.496.280.460
22% x 29.207.396.000	6.425.627.120	
Jumlah pajak kini	6.425.627.120	5.496.280.460

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)			
b. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)			
Pajak Penghasilan dibayar dimuka			
Pajak Penghasilan pasal 25 sampai dengan Desember 2024	(6.422.879.100)	(5.496.047.487)	
Jumlah pajak penghasilan dibayar dimuka	(6.422.879.100)	(5.496.047.487)	
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	2.748.020	232.973	

14. SIMPANAN		2024	2023
		Rp	Rp
a. Tabungan			
Terkait		2.177.552.373	490.231.119
Tidak Terkait		80.698.153.495	69.371.593.214
Jumlah	(a)	82.875.705.868	69.861.824.333
b. Deposito			
Terkait			
- Deposito 12 Bulan		460.000.000	-
Tidak Terkait			
- Deposito 1 Bulan		3.781.700.000	5.374.200.000
- Deposito 3 Bulan		26.677.300.000	16.355.800.000
- Deposito 6 Bulan		15.833.350.000	13.001.000.000
- Deposito 12 Bulan		28.161.656.000	19.976.236.000
Jumlah	(b)	74.914.006.000	54.707.236.000
Total	(a+b)	157.789.711.868	124.569.060.333

Tingkat suku bunga Simpanan Pihak Ketiga Tabungan dan Deposito terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Suku Bunga Tabungan (Rata-rata)		
Tabungan Bank Daerah (Tabeda)	2,0% per tahun	2,0% per tahun
Tabungan Masyarakat (Tamasya)	2,0% per tahun	2,0% per tahun
Tabungan Kredit Daerah (Takreda)	0,75% per tahun	0,75% per tahun
Tabungan Simpanan Umum Daerah (Simuda)	0,75% per tahun	0,75% per tahun
Tabungan Siswa (Tawa)	0,25% per tahun	0,25% per tahun
Suku Bunga Deposito (Rata-rata)		
Jangka Waktu 1 Bulan	3,5% per tahun	3,5% per tahun
Jangka Waktu 3 Bulan	4,0% per tahun	4,0% per tahun
Jangka Waktu 6 Bulan	4,50% per tahun	4,50% per tahun
Jangka Waktu 12 Bulan	5,0% per tahun	5,0% per tahun

15. SIMPANAN BANK LAIN		2024	2023
		Rp	Rp
Tabungan			
PT BPR Sentra Dana Makmur		263.350.466	111.964.558
PT BPR Artatama Sejahtera		170.062.413	40.134.187
PT BPR Surya Arthaguna Abadi		41.389.885	290.912.200
PT BPR Indra Candra		1.103.971	-
Perumda BPR Bank Daerah Lamongan		669.830.223	506.528.814
Jumlah	(a)	1.145.736.958	949.539.759

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

15. SIMPANAN BANK LAIN (Lanjutan)

		2024	2023
		Rp	Rp
Deposito			
- Antar Bank 3 Bulan			
Perumda Bpr Bank Daerah Lamongan		2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Wiradhana Putramas		5.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda)		3.000.000.000	3.000.000.000
PT BPR Surya Arthaguna Abadi		1.900.000.000	-
PT BPR Delta Artha		2.000.000.000	-
Perumda BPR Majalengka		-	1.000.000.000
- Antar Bank 6 Bulan			
PT BPR Anjuk Ladang Perseroda		2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bkk Lasem (Perseroda)		9.000.000.000	12.000.000.000
PT BPR Bank Daerah Bangli Perseroda		2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Bank Kulon Progo		2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Jatim		18.000.000.000	32.000.000.000
PT BPR Bank Sleman Perseroda		2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Tanah Laut		1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPR Bank Klaten (Perseroda)		2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Mandiri Artha Abadi		2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda BPR Bank Gresik		1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Bkk Karangmalang (Perseroda)		3.000.000.000	3.000.000.000
Perumda BPR Bank Kota Kediri		2.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Asia Sejahtera		1.000.000.000	3.000.000.000
Perumda BPR Bintang		1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPR Hidup Arthagraha		500.000.000	2.000.000.000
PT BPR Indra Candra		1.800.000.000	2.000.000.000
PT BPR Bank Tulungagung Perseroda		2.000.000.000	4.000.000.000
PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda)		2.000.000.000	-
PT BPR Daya Lumbung Asia		1.000.000.000	1.750.000.000
PT BPR Aruna Nirmaladuta		1.000.000.000	-
PT BPR Bank Kertiawan		-	2.000.000.000
PT BPR Andalan Daerah		-	4.000.000.000
PT BPR Terabina Seraya Mulia		-	2.000.000.000
PT BPR Bank Kertiawan		-	2.000.000.000
Jumlah	(b)	70.700.000.000	94.250.000.000
Total	(a+b)	71.845.736.958	95.199.539.759

Tingkat bunga rata-rata per tahun pada tahun 2024 dan 2023 adalah 6,63% dan 6,45%

16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Perusahaan pada tahun 2023 dan 2024 menentukan liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Hendri, aktuaris independen, dengan menggunakan metode perhitungan yang dilakukan sesuai dengan metode yang terdapat pada Standar Akutansi Keuangan dengan pendekatan "IFRIC", Entitas mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp1.624.081.039 pada tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tingkat diskonto	7,04%	7,04%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%
Usia pensiun	56	56

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)		
a. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut :		
	2024	2023
	Rp	Rp
Biaya jasa kini	335.656.547	379.298.285
Penyesuaian program manfaat	(431.382.658)	-
b. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:		
	2024	2023
	Rp	Rp
Liabilitas Imbalan Kerja	1.624.081.039	1.909.170.584
c. Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:		
	2024	2023
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	1.909.170.584	1.533.657.052
Penambahan di tahun berjalan	335.656.547	379.298.285
Realisasi pembayaran manfaat	(185.578.681)	-
Perubahan program manfaat	(431.382.658)	-
Iuran Perusahaan	(3.784.753)	(3.784.753)
Jumlah	1.624.081.039	1.909.170.584
17. KEWAJIBAN LAINNYA		
	2024	2023
	Rp	Rp
Dana Kesehaterahan (THT)	9.470.554.915	7.944.923.908
Biaya CSR	1.018.917.199	1.185.202.798
Pendapatan Diterima Dimuka	530.087.524	778.802.165
Biaya Sosial	200.554.514	200.554.514
Rekening Selisih/Perantara/Sementara	-	111.589.929
Cadangan Biaya Jasa OJK	55.637.890	55.977.408
Cadangan Biaya Promosi	-	24.573.330
Pendapatan Bunga Restruk	6.000.000	6.000.000
Cadangan Biaya THR	-	3.376.116
Cadangan Biaya Pendidikan	-	1.993.627
Jasa Pengerahan Dana	475.027	475.027
Kewajiban Lainnya	162.560.518	1.164.874.614
Jumlah	11.444.787.587	11.478.343.436
18. EKUITAS		
Terdiri dari :		
	2024	2023
	Rp	Rp
Modal Dasar	400.000.000.000	400.000.000.000
Modal yang Belum Disetor	(190.000.000.000)	(190.000.000.000)
Tambahan Modal TA	4.532.500	4.532.500
Jumlah Modal Disetor	210.004.532.500	210.004.532.500
Dana Setoran Modal		
Saldo Laba		
Cadangan Umum	14.863.220.419	12.916.693.750
Cadangan Tujuan	14.696.542.084	12.750.015.415
Jumlah Saldo Laba	29.559.762.503	25.666.709.165

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

18. EKUITAS (Lanjutan)

	2024	2023
	Rp	Rp
Laba/Rugi Tahun Lalu	-	-
Laba/Rugi Tahun Berjalan	22.787.521.508	19.465.266.691
Jumlah Laba/Rugi	22.787.521.508	19.465.266.691

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang perubahan kelima Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp 10.000.000.000 menjadi 400.000.000.000 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Modal PD BPR Bank Daerah Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bjonegoro No 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar PD BPR Bank Daerah Bojonegoro ditetapkan sebesar Rp 400.000.000.000,-

b. Modal dasar PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan yang Modal disetor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah	
1	Setoran Modal Tahun Anggaran 1994/1995	Rp	50.000.000,00
2	Setoran Modal Tahun Anggaran 1996/1997	Rp	100.000.000,00
3	Setoran Modal Tahun Anggaran 1998/1999	Rp	150.000.000,00
4	Setoran Modal Tahun Anggaran 2002	Rp	200.000.000,00
5	Setoran Modal Tahun Anggaran 2003	Rp	500.000.000,00
6	Setoran Modal Tahun Anggaran 2006	Rp	300.000.000,00
7	Setoran Modal Tahun Anggaran 2007	Rp	100.000.000,00
8	Setoran Modal Tahun Anggaran 2010	Rp	600.000.000,00
9	Setoran Modal Tahun Anggaran 2011	Rp	6.000.000.000,00
10	Setoran Modal Tahun Anggaran 2012	Rp	2.000.000.000,00
11	Setoran Modal Tahun Anggaran 2013	Rp	12.500.000.000,00
12	Setoran Modal Tahun Anggaran 2014	Rp	30.000.000.000,00
13	Setoran Modal Tahun Anggaran 2014	Rp	45.000.000.000,00
14	Setoran Modal Tahun Anggaran 2015	Rp	97.500.000.000,00
15	Setoran Modal Tahun Anggaran 2016	Rp	15.000.000.000,00
Jumlah		Rp	210.000.000.000,00

Tambahan Modal (Pengampunan Pajak)

Akun ini merupakan selisih antara aset pengampunan pajak (Tax Amnesty) dan liabilitas pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang disajikan sebagai bagian ekuitas pada tambahan modal disetor.

Berdasarkan Peraturan No 118/PMK.03/2016 tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada tanggal 19 Desember 2016 PD BPR Bank Daerah Bojonegoro telah mengikuti Tax Amnesty atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri Keuangan Nomor KET-12574/PP/WP/J.24/2016 atas harta bersih yang belum dilaporkan pada pajak harta tersebut berupa bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp 4.532.500 dengan uang tebusan yang dibayarkan sebesar 3% atas nilai aset yaitu Rp 135.975 berdasarkan Surat Setoran Pajak TX No.A16159285680 melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) tanggal 28 November 2016.

Pada tahun 2024 pembagian laba tahun 2023 berdasarkan berita acara Rapat Tahunan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 5 April 2024 bertempat di Ruang Batik Madrim lantai 2 Gedung Pemerintahan Kabupaten Serta telah di legalisasi dengan nomor 68 yang ditandatangani oleh Ida Farikhah, SH, M.Kn Notaris di Bojonegoro pada tanggal 05 April 2024.

Pembagian Laba sesuai dengan Permendagri 94 Tahun 2017 dengan Komposisi pembagian sebagai berikut:

Keterangan	Presentasi	Jumlah
PAD	55%	Rp 10.705.896.680
Cadangan - Cadangan	20%	Rp 3.893.053.338
Dana Kesejahteraan	10%	Rp 1.946.526.669
Jasa Produksi	8%	Rp 1.557.221.335
Tantiem	4%	Rp 778.610.668
CSR	3%	Rp 583.958.001
Jumlah	100%	Rp 19.465.266.691

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

19. PENDAPATAN BUNGA		
	2024	2023
	Rp	Rp
Bunga Kontraktual		
- Pendapatan Bunga Kredit yang Diberikan	53.146.633.387	47.748.857.645
- Pendapatan Bunga Deposito	345.944.277	870.893.434
- Pendapatan Bunga Giro	46.620.353	21.416.519
- Pendapatan Bunga Tabungan	573.128.434	380.490.475
Jumlah	54.112.326.451	49.021.658.073
20. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI		
	2024	2023
	Rp	Rp
Provisi dan Komisi Kredit	4.454.844.537	4.211.265.157
Jumlah	4.454.844.537	4.211.265.157
21. BEBAN BUNGA		
	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Bunga Kontraktual		
- Tabungan	722.006.212	674.793.020
- Deposito	3.920.474.573	3.133.915.004
- Beban Lain	6.225.416.082	4.727.399.033
Jumlah	10.867.896.867	8.536.107.057
22. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
	2024	2023
	Rp	Rp
- POL-ADM & PENUTUPAN TABUNGAN	963.154.087	877.749.099
- POL-DENDA DEPOSITO SBLM JTH TEMPO	6.395.000	7.175.000
- POL-PINALTI DEPOSITO	600.000	50.000
- POL-PEMULIHAN PPAP KREDIT	11.757.338.017	16.812.422.109
- POL-PENERIMAAN KEMBALI AP HAPUS BUKU/TAGIH	7.750.000	1.000.000
- POL-DENDA KREDIT	375.058.203	683.379.388
- POL-LAIN-LAIN	2.185.003.754	825.045.047
- POL-LAINNYA	-	1.143.139
Jumlah	15.295.299.061	19.207.963.782
23. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Tenaga Kerja		
- Beban Tenaga Kerja	10.488.907.624	9.387.092.376
- Premi asuransi	502.648.035	479.715.761
- Beban Pendidikan	1.219.258.643	967.000.000
Beban Administrasi dan Umum		
- Beban Sewa	1.257.337.334	1.382.538.866
- Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	48.613.027	60.761.136
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	110.283.486	165.832.839
- Beban Penelitian dan Pengembangan	648.900.000	70.000.000
- Beban Operasional Lainnya	966.831.105	218.582.864
Beban Barang dan Jasa	4.222.772.216	3.756.360.046
Jumlah	19.465.551.470	16.487.883.888

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

24. BEBAN PEMASARAN		
	2024	2023
	Rp	Rp
- Biaya promosi dan Edukasi	35.200.000	380.288.155
Jumlah	35.200.000	380.288.155
25. BEBAN PENYISIHAN ASET PRODUKTIF		
	2024	2023
	Rp	Rp
- Beban Penghapusan Aktiva Produktif	12.337.965.567	20.525.754.811
Jumlah	12.337.965.567	20.525.754.811
26. BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP & AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD		
	2024	2023
	Rp	Rp
- Beban Penyusutan Aset Tetap	510.290.129	519.942.412
- Beban Amortisasi Aset tidak berwujud	153.167.243	135.854.075
Jumlah	663.457.372	655.796.487

27. KEJADIAN HUKUM
Sesuai dengan tanda terima dokumen/barang hari Selasa tanggal 13 September 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Yang menerima :

Nama Adi Wibowo, SH. MH
Pangkat Jaksa Muda
NIP 198505232003121006
Jabatan Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:
Nama Iqbal Fauzi S.Kom
Pangkat Yuana Wira TU
NIP 199604072022031006
Jabatan Analisi Forensik Digital Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Nama Kresna Aquarrista
Pangkat Madya Dharma TU
NIP 199201282010121001
Jabatan Pranata Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

- Menerima dokumen/Barang berupa :
- 1 (satu) bendel Dokumen kredit atas nama debitur M. Purniawan alamat Ds. Kedungdowo Rt. 07/03, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan nomor Rekening 00.017809.025269.
 2. 1 (satu) bendel Dokumen kredit atas nama debitur M. Purniawan alamat Ds. Kedungdowo Rt. 07/03, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan nomor Rekening 00.017809.025928.

Sesuai dengan tanda terima dokumen/barang hari Selasa tanggal 13 September 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Yang menerima :

Nama Tarjono. SH
Pangkat Jaksa Madya
NIP 196907151993031004
Jabatan Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

27. KEJADIAN HUKUM (Lanjutan)

dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Nama	Iqbal Fauzi S.Kom
Pangkat	Yuana Wira TU
NIP	199604072022031006
Jabatan	Analisi Forensik Digital Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Nama	Kresna Aquarrista
Pangkat	Madya Dharma TU
NIP	199201282010121001
Jabatan	Pranata Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Menerima dokumen/Barang berupa :

- 1 (satu) lembar kartu jadwal pembayaran per tanggal 13 September 2022 PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto Alamat Jl. Patimura No. 30, Ledok Kulon Bojonegoro dengan Nomor Rekening 10130015756.
- 1 (satu) bendel kartu transaksi kredit PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto Alamat Jl. Patimura No 30 Ledok Kulon Bojonegoro.
- 1 (satu) bendel Dokumen Kredit atas nama debitur Suharto Alamat Jl. Patimura No 30 Ledok Kulon Bojonegoro degan nomor Rekening 00.021834.026015.
- 1 (satu) bendel Company Profil PT. Multi Karya Citra Mandiri

Sesuai dengan tanda terima dokumen/barang hari Selasa tanggal 13 September 2022 bertempat di kantor kejaksaan Negeri Bojonegoro, Yang menerima :

Nama	Adi Wibowo, SH. MH
Pangkat	Jaksa Muda
NIP	198505232003121006
Jabatan	Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing:

Nama	Kresna Aquarrista
Pangkat	Madya Dharma TU
NIP	199201282010121001
Jabatan	Pranata Barang Bukti Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Nama	Maulana Dwi Oksianto
Pangkat	Yuana Wira TU
NIP	199110082020121014
Jabatan	Pengemudi Pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Menerima dokumen/Barang berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp 360.818.200 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Tidak ada kejadian hukum selain kejadian yang sudah di uraikan di atas.

PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2024 dan 2023
 Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

28. KOMITMEN DAN KONTIJENSI		2024	2023
		Rp	Rp
a	Komitmen		
	Fasilitas Pinjaman Bank Belum Ditarik	9.279.676.810	8.905.595.951
b	Kontijensi		
	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	7.768.321.382	7.768.321.382
	Jumlah	17.047.998.192	16.673.917.333

29. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
- Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan
30. JAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
- Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.
- Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang- Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100 juta diubah menjadi maksimum Rp 2 milyar.
31. MANAJEMEN RISIKO
- a. Risiko Kredit
- Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dikelola baikpada tingkat transaksi maupun portofolio. Pengelolaan risiko kredit dirancang untuk menjaga independensi dan integritas proses penilaian risiko.
- Untuk mengurangi resiko pemberian kredit tersebut, harus ada jaminan atas pemberian kredit tersebut dalam arti petugas kredit harus mempunyai keyakinan atas kemampuan, kesanggupan, serta kamauan debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya.
- Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum dilakukan pemberian kredit, setiap petugas perkreditan terlebih dahulu harus melakukan penilaian secara seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan serta batasan –batasan yang ditetapkan dalam buku pedoman perkreditan ini.
- b. Risiko Likuiditas
- Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi dimana Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat mencairkan atau menjual asetnya karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.
- Beberapa langkah yang diambil dengan melakukan analisis tingkat kesehatan BPR dengan ratio (angka perbandingan), trend (kecenderungan) atau gejala yang selanjutnya dapat memberi petunjuk mengenai bahaya atau potensi kerawanan di Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Risiko Operasional
- Risiko operasional adalah potensi risiko yang timbul karena kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian diluar Bank Perkreditan Rakyat, metodologi pengendalian risiko-risiko tersebut telah diatur Standar Operasional Prosedur dan Surat Keputusan.
32. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN
- Laporan keuangan dari halaman 2 sampai halaman 23 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2025.

Nomor : 00021/3.0290/AU.2/07/1070-1/1/II/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi
PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan nomor 00010/2.1382/AU.2/07/1143-3/1/II/2024 yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Menunjuk pada catatan atas laporan keuangan No 27 Kejadian Hukum serta sesuai dengan tanda terima dokumen/barang di Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro:

1. Tanggal 13 September 2022:

a. Menerima dokumen/barang berupa:

1. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama debitur M. Heri Purniawanalamat Ds. Kedungdowo RT.07/03, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan nomor rekening 00.017809.025269
2. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama debitur M. Heri Purniawanalamat Ds. Kedungdowo RT.07/03, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan nomor rekening 00.017809.025928

- b. Menerima dokumen/barang berupa:
1. 1 (satu) lembar kartu jadwal pembayaran per tanggal 13 September 2022 PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto Alamat Jl. Pattimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro dengan nomor rekening 10130015756.
 2. 1 (satu) bendel kartu transaksi kredit PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto Alamat Jl. Pattimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro.
 3. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama debitur Suharto Alamat Jl. Pattimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro dengan nomor rekening 00.021834.026015.
 4. 1 (satu) bendel Company profile PT. Multi Karya Citra Mandiri.
2. Tanggal 13 Desember 2022
- Uang tunai sebesar Rp 360.818.200 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Pihak manajemen PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro menyatakan tidak ada kejadian hukum lain selain kejadian yang sudah diuraikan di atas.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal – hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian

material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

ERFAN & RAKHMAWAN



F. Ahmad Kurniawan, Ak, CA, CPA
NRAP : AP. 1070

Surabaya, 24 Februari 2025



PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN KEUANGAN - Pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5



PT Bojonegoro Bangun Sarana

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro

Jl. Diponegoro 38, Bojonegoro 62115, Jawa Timur

Phone 0353-891861 / Fax 0353-881419

Website : www.bbs-bumd-bjn.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
PT BOJONEGORO BANGUN SARANA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Setyo Hartono
Alamat Kantor	: Jl. Diponegoro No. 38 RT 001 RW 001 Sukorejo, Bojonegoro
Alamat Domisili	: Jl. Dr. Sutomo No. 19 RT 005 RW 002 Kel. Sumbang, Kec. Bojonegoro, Jawa Timur
No. KTP	: 3522150704590001
No. Telp	: (0353) 891861 / (0353) 881419
Jabatan	: Plt. Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah di muat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bojonegoro, 25 Februari 2025



Setyo Hartono
Plt. Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00016/2.1042/AU.2/05/0624-2/1/II/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direktur
PT. Bojonegoro Bangun Sarana**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. Bojonegoro Bangun Sarana ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 6, laporan keuangan terlampir mengandung ketidakpastian material terkait dengan saldo piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp.2.572.278.491,- yang tidak dapat dipulihkan dalam siklus operasional normal perusahaan. Kami tidak dapat meyakini apakah diperlukan penyesuaian sehubungan dengan saldo akun tersebut serta unsur-unsur yang membentuk laporan laba rugi dan/atau posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan



kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan



JEPHTHA NASIB & JUNIHOL

Registered Public Accountants

Business License : No.743/KM.1/2015

Member of Global Assurance Networks



transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JEPHTHA NASIB & JUNIHOL

Eko Fatah Yasin, M.Ak., CPA, CFI, BKP, CFrA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0624



25 Februari 2025

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	8.490.557.503	6.554.594.305
Piutang usaha	5	13.044.870.916	2.423.213.097
Piutang lain lain	6	3.750.581.741	3.799.955.741
Beban Dibayar Dimuka	7	1.554.866.501	963.638.857
Persediaan	8	-	-
Uang muka pajak	10a.	2.134.246.489	3.616.232.161
Jumlah Aset Lancar		<u>28.975.123.150</u>	<u>17.357.634.161</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha tidak lancar	5	596.431.719	11.375.708.130
Aset tetap - bersih	9	630.776.408	729.348.776
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>1.227.208.127</u>	<u>12.105.056.906</u>
JUMLAH ASET		<u><u>30.202.331.276</u></u>	<u><u>29.462.691.067</u></u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	10b.	265.974.174	25.881.108
Utang Usaha	11	1.017.135.548	1.131.915.000
Beban yang masih harus dibayar	12	254.442.160	267.231.160
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.537.551.882</u>	<u>1.425.027.268</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Kewajiban imbalan masa kerja	13	364.056.526	364.056.526
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>364.056.526</u>	<u>364.056.526</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>1.901.608.408</u></u>	<u><u>1.789.083.794</u></u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp. 1.000.000.- per saham	14		
Modal dasar - 11.500 saham tahun 2024 dan 2023			
Modal ditempatkan dan disetor - 11.500 saham			
pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		11.500.000.000	11.500.000.000
Saldo Laba		16.800.722.868	16.173.607.273
Jumlah Ekuitas		<u>28.300.722.868</u>	<u>27.673.607.273</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>30.202.331.276</u></u>	<u><u>29.462.691.067</u></u>

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bojonegoro, 25 Februari 2025


Setyo Hartono
Plt. Direktur

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
 LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	15	45.845.713.379	54.892.812.310
HARGA POKOK PENJUALAN	16	(42.314.846.653)	(50.598.851.868)
LABA KOTOR		<u>3.530.866.726</u>	<u>4.293.960.442</u>
BEBAN USAHA			
BEBAN PEMASARAN	17	(57.211.200)	(23.085.000)
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	18	(2.236.408.318)	(2.171.564.350)
JUMLAH BEBAN USAHA		<u>(2.293.619.518)</u>	<u>(2.194.649.350)</u>
LABA USAHA		<u>1.237.247.208</u>	<u>2.099.311.092</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	19	106.027.537	(556.871.057)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		<u>1.343.274.745</u>	<u>1.542.440.035</u>
Beban Pajak	10c.	(322.761.407)	(530.134.827)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		<u><u>1.020.513.338</u></u>	<u><u>1.012.305.208</u></u>

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bojonegoro, 25 Februari 2025


 Setyo Hartono
 Plt. Direktur

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Modal Saham	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Cadangan Kesejahteraan dan Jasa Produksi	Saldo Laba (Rugi) Belum Ditentukan	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2023	11.500.000.000	3.655.142.264	9.065.621.659	683.297.928	4.305.417.908	29.209.479.759
Alokasi Laba Tahun Lalu	-	483.756.758	1.722.167.163	263.464.518	-	2.469.388.439
Pembagian Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	(4.305.417.908)	(4.305.417.908)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	(712.148.225)	1.012.305.208	300.156.983
Saldo 31 Desember 2023	<u>11.500.000.000</u>	<u>4.138.899.022</u>	<u>10.787.788.822</u>	<u>234.614.221</u>	<u>1.012.305.208</u>	<u>27.673.607.274</u>
Alokasi Laba Tahun Lalu		151.845.782	404.922.083	112.778.260	404.922.083	1.074.468.208
Pembayaran Deviden					(404.922.083)	(404.922.083)
Pembagian Laba Tahun Lalu				(50.638.660)	(1.012.305.208)	(1.062.943.868)
Laba bersih tahun berjalan					1.020.513.338	1.020.513.338
Saldo 31 Desember 2024	<u>11.500.000.000</u>	<u>4.290.744.804</u>	<u>11.192.710.905</u>	<u>296.753.821</u>	<u>1.020.513.338</u>	<u>28.300.722.868</u>

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bojonegoro, 25 Februari 2025


 Setyo Hartono
 Plt. Direktur

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba setelah pajak	1.020.513.338	1.012.305.208
Penyesuaian untuk :		
Penyusutan Aset Tetap	116.565.512	113.794.560
Perubahan Modal Kerja		
Piutang usaha	157.618.592	1.536.215.180
Piutang lain lain	49.374.000	(571.874.000)
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	-	15.690.461.455
Beban Dibayar Dimuka	(591.227.644)	(362.577.296)
Uang Muka Pajak	1.481.985.672	(3.246.979.936)
Utang Usaha	(114.779.452)	(1.061.174.254)
Utang Pajak	240.093.066	(153.404.373)
Utang lain lain	-	(60.800.000)
Beban yang masih harus dibayar	(12.789.000)	267.231.160
Jumlah Perubahan Modal Kerja	1.326.840.746	12.150.892.496
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	2.347.354.084	13.163.197.704
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset Tetap	(17.993.140)	(1.925.000)
Investasi	-	-
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(17.993.140)	(1.925.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Utang Bank	-	(5.930.000.000)
Koreksi Saldo Laba	-	-
Cadangan Umum	151.845.782	483.756.758
Cadangan Tujuan	404.922.080	1.722.167.163
Cadangan Kesejahteraan	62.139.600	(448.683.707)
Pembagian Laba	(1.012.305.208)	(4.305.417.908)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	(393.397.746)	(8.478.177.694)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	1.935.963.198	4.683.095.010
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.554.594.305	1.871.499.295
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	8.490.557.503	6.554.594.305

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bojonegoro, 25 Februari 2025


Setyo Hartono
Plt. Direktur

1 UMUM

a. Sejarah Ringkas

PT. Bojonegoro Bangun Sarana adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 05 tanggal 15 Mei 2006 tentang pembentukan BUMD PT. Bangkit Bangun Sarana dan akta nomor 4171 tanggal 12 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Reza Pervuez Kalias SH. Akta tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W10-01131 HT.01.01.TH.2007 tanggal 12 September 2007. Perubahan nama PT. Bangkit Bangun Sarana menjadi PT. Bojonegoro Bangun Sarana berdasarkan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 06 tanggal 8 September 2011 dan akta nomor 36 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Hidayah, SH, MKn. Akta tersebut telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-52815.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012. Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta no. 280 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Farikhah, SH., MKn. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-0214727.AH.01.1.Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan barang, jasa konstruksi, dan jasa pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over dan underpass, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, konstruksi gedung hunian, angkutan bermotor untuk barang khusus, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, pertambangan minyak bumi, perdagangan besar, konstruksi gedung lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl, konstruksi gedung kesehatan, industri, jembatan dan layang, gedung perkantoran, instalasi minyak dan gas, mekanikal.

Ijin Usaha Perusahaan :

1. Perseroan berdomisili di Jl. Diponegoro No. 38 RT 001 RW 001, Sukorejo Bojonegoro
2. NPWP dengan nomor : 02.577.160.1-601.000
3. NIB nomor 9120301220884 tanggal 8 Februari 2019

b. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta nomor 6 tanggal 13 Juli 2022 oleh Notaris Anik Farida Agustini, SH., MKn., MH. , susunan pengurus perseroan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Komisaris	: Setyo Hartono	Setyo Hartono
Plt. Direktur	: Setyo Hartono	Setyo Hartono

Jumlah karyawan pada tahun 2024 sebanyak 13 orang terdiri atas 6 orang pegawai tetap dan 7 orang pegawai kontrak.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

- c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi, dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)
Pembukuan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.
Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (ruqi) tahun berjalan.
- d. Transaksi-transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :
- Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut :
 - Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
 - Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
 - Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venturer*.
 - Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
 - Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) dan (iv).
 - Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) dan (v).
 - Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa.

- e. Pendapatan dan Beban
Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

- Penjualan barang
 - Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
 - Tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
 - Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke, dan
 - Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.
- Penjualan jasa
 - Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
 - Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke ;
 - Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
 - Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

- f. Imbalan Paska Kerja
Perusahaan mengakui dan mencatat kewajiban imbalan paska kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

- f. Imbalan Paska Kerja (Lanjutan)
Perusahaan mampu untuk menggunakan metode *projected unit credit* untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Sehingga Perusahaan dalam menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pasca kerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan.
Keuntungan atau kerugian aktuarial tidak diakui dalam laporan laba rugi. Perusahaan telah menyelenggarakan aset program imbalan pasti.
- g. Pajak Penghasilan
Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yakni pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Entitas mengakui kewajiban pajak atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.
- h. Penggunaan Estimasi
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan. Pengungkapan perlu dilaporkan untuk dan kontijensi tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban. Selama periode pelaporan, realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.
- i. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.
- j. Piutang Usaha
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.
- k. Persediaan
Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode rata-rata. Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.
- l. Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak.

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak atau pun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategis atau suatu entitas tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut jika :

- investor memiliki secara langsung maupun tidak langsung 20% atau lebih hak suara investee, maka investor mempunyai pengaruh signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan;
- investor memiliki secara langsung maupun tidak langsung 20% atau lebih hak suara investee, maka investor tidak mempunyai pengaruh signifikan, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa ada pengaruh signifikan;
- suatu kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menentukan pengaruh signifikan yang dimiliki oleh investor.

Metode akuntansi untuk entitas asosiasi, investor harus mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya (*cost method*). Investor harus mengakui deviden dan penerimaan distribusi lainnya sebagai penghasilan terlepas apakah hal tersebut berasal dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

I. Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak (Lanjutan)

Entitas Anak

Entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat atas aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian.

Metode akuntansi untuk entitas anak, investor harus mengukur investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Dalam metode ekuitas, investasi pada entitas anak pada awalnya diakui pada biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan dan beban dari entitas anak.

Dalam SAK ETAP, Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor (sebagai entitas induk)

m. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

	Masa Tahun
Bangunan	20
Inventaris Proyek	4
Inventaris Kantor	4
Kendaraan	4-8

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud diakui jika (a) kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas harus menggunakan asumsi yang wajar dan dalam mendukung yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang ada selama masa manfaat aset.

o. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

p. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

q. Pembagian Laba

Pembagian laba bersih setelah pajak oleh perusahaan dan disahkan berdasarkan RUPS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 6 Tahun 2011 tanggal 8 September 2011, dengan prosentase sebagai berikut :

	Prosentase
Dividen	40%
Cadangan Umum	10%
Cadangan Tujuan	40%
Cadangan Kesejahteraan	5%
Jasa Produksi	5%
	100%

3 SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun-tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan SAK-ETAP, mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan. Karena ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil aktual yang dilaporkan pada periode mendatang mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perusahaan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Persediaan Usang

Penyisihan penurunan nilai pasar dan persediaan usang diperkirakan berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan, harga jual pasar, taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang akan dikeluarkan untuk penjualan mereka. Ketentuan dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas persediaan, mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas persediaan yang secara khusus diidentifikasi sebagai persediaan yang kemungkinan tidak dijual. Perusahaan belum melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tidak terjualnya persediaan tersebut.

Perusahaan belum melakukan penilaian persediaan berdasarkan Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas belum mengakui kerugian penurunan nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Perusahaan belum menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi persediaan yang dimiliki.

Penurunan Nilai Aset

Perusahaan belum melakukan penilaian atas penurunan nilai aset. Pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, aset tetap diestimasi berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan selama 4 sampai 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa dari aset tetap. Oleh karena itu, biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah. Jumlah tercatat aset tetap perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

3 SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (Lanjutan)

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, perusahaan mereviu umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Kewajiban Imbalan Paska Kerja

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 mengenai "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan", yang mengharuskan Perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan ganti kerugian jika terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan lamanya masa kerja karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Dan, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perusahaan telah menerapkan Keputusan Pemerintah tersebut.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Dimana hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pendapatan pajak dan ketentuan pajak tangguhan pada periode dimana penentuan tersebut dilakukan.

4 KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas	6.745.576	9.523.276
Bank		
PT. Bank Jatim Tbk.	101.804.180	36.080.700
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	6.115.090.254	2.990.629.298
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2.266.917.493	3.518.361.031
Jumlah Bank	8.483.811.927	6.545.071.029
Jumlah Kas dan setara kas	8.490.557.503	6.554.594.305

5 PIUTANG USAHA

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pihak Berelasi	3.317.627.754	3.317.627.754
Pihak Ketiga	15.239.079.527	15.993.129.838
Sub Jumlah	18.556.707.281	19.310.757.592
Penyisihan Piutang	(5.511.836.365)	(5.511.836.365)
Jumlah Piutang Usaha - Neto	13.044.870.916	13.798.921.227
Bagian Tidak Lancar		
Pihak Berelasi	527.456.500	527.456.500
Pihak Ketiga	68.975.219	10.848.251.630
Jumlah Bagian Tidak Lancar	596.431.719	11.375.708.130
Jumlah Bagian Lancar	13.044.870.916	2.423.213.097

Piutang kepada PT Bojonegoro Bangun Sarana General Konstruksi (PT BBS) (Pihak Berelasi)

Piutang pihak berelasi - bagian tidak lancar sebesar Rp. 527.456.500,- merupakan saldo piutang PT BBS General Konstruksi - entitas anak - yang telah dibubarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai akta notaris Ida Farikhah nomor 194. Manajemen memutuskan bahwa hak tagih piutang tersebut dialihkan ke perusahaan. Untuk selanjutnya perusahaan akan mengambil alih tanggung jawab untuk menagih piutang tersebut kepada pihak pihak yang bersangkutan. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut dapat ditagih dan dipulihkan seluruhnya secara bertahap.

Manajemen menyatakan bahwa saldo piutang bagian lancar pihak ketiga pada tanggal neraca belum jatuh tempo dapat direalisasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya, sehingga manajemen memutuskan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

6 PIUTANG LAIN LAIN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Karyawan	1.178.303.250	1.227.677.250
Pihak Ketiga	2.572.278.491	2.572.278.491
Jumlah Piutang Lain Lain - Neto	<u>3.750.581.741</u>	<u>3.799.955.741</u>

Piutang lain lain pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2021 sebesar Rp. 2.572.278.491 merupakan tagihan jasa advisory kepada sdr. Darno beralamat di Jln. Sambisari IV 19B Kel. Lontar kec. Sambikerep, Surabaya, sesuai dengan surat tagihan jasa advisory nomor : 310/SK/PRY/BBS/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

7 BEBAN DIBAYAR DIMUKA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Muka Belanja Sumur Tua	911.330.560	549.700.781
Uang Muka Proyek	168.214.397	168.214.397
Uang Muka Supply Material Sumbawa	100.646.270	-
Uang Muka Operasional	237.883.601	237.883.601
Retribusi Dibayar Dimuka	136.791.673	6
Premi Asuransi	-	7.840.072
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	<u>1.554.866.501</u>	<u>963.638.857</u>

8 PERSEDIAAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Daun Fermentasi	23.522.600	23.522.600
Daun Jati	5.999.500	5.999.500
Janggal	3.586.950	3.586.950
Sub Jumlah	<u>33.109.050</u>	<u>33.109.050</u>
Cadangan Penyisihan Persediaan	<u>(33.109.050)</u>	<u>(33.109.050)</u>
Jumlah Persediaan - Neto	<u>-</u>	<u>-</u>

Persediaan telah dilakukan penyisihan 100%.

9 ASET TETAP	31 Desember 2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai Perolehan					
Tanah	181.000.000	-	-	-	181.000.000
Bangunan	634.722.100	-	-	-	634.722.100
Kendaraan	1.268.859.200	-	-	-	1.268.859.200
Inventaris Proyek	94.036.870	-	-	-	94.036.870
Inventaris Kantor	556.488.363	17.993.140	-	-	574.481.503
Jumlah	<u>2.735.106.533</u>	<u>17.993.140</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.753.099.673</u>
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	326.370.301	31.736.105	-	-	358.106.397
Kendaraan	1.042.464.316	73.314.400	-	-	1.115.778.708
Inventaris Proyek	88.473.335	1.871.000	-	-	90.344.349
Inventaris Kantor	548.449.805	9.644.007	-	-	558.093.812
Jumlah	<u>2.005.757.757</u>	<u>116.565.512</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.122.323.265</u>
Nilai Buku Tercatat	<u>729.348.776</u>				<u>630.776.408</u>

	31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai Perolehan					
Tanah	181.000.000	-	-	-	181.000.000
Bangunan	634.722.100	-	-	-	634.722.100
Kendaraan	1.268.859.200	-	-	-	1.268.859.200
Inventaris Proyek	94.036.870	-	-	-	94.036.870
Inventaris Kantor	554.563.363	1.925.000	-	-	556.488.363
Jumlah	<u>2.733.181.533</u>	<u>1.925.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.735.106.533</u>

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

9 ASET TETAP (Lanjutan)

	31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	294.634.196	31.736.105	-	-	326.370.301
Kendaraan	969.149.916	73.314.400	-	-	1.042.464.316
Inventaris Proyek	86.002.341	2.470.994	-	-	88.473.335
Inventaris Kantor	542.176.744	6.273.061	-	-	548.449.805
Jumlah	1.891.963.197	113.794.560	-	-	2.005.757.757
Nilai Buku Tercatat	841.218.336				729.348.776

Manajemen menyatakan tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2024 dan 2023.

	2024	2023
Beban penyusutan aset tetap tahun 2024 dan 2023 dibebankan ke biaya administrasi dan umum sebesar	116.565.512	113.794.560

10 PERPAJAKAN

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Uang Muka Pajak		
PPN Masukan	-	1.890.656.890
Uang Muka PPh 21	1.096.424	-
Uang Muka PPh 23	2.133.150.065	1.725.575.271
Jumlah Uang Muka Pajak	2.134.246.489	3.616.232.161
b. Utang Pajak		
PPh Pasal 21	-	5.341.806
PPN Keluaran	265.974.174	20.539.302
Utang Pajak Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pajak	265.974.174	25.881.108
c. Pajak Penghasilan Badan	2024	2023
Laba sebelum Pajak	1.343.274.745	1.542.440.035
Koreksi Fiskal Positif		
Biaya Upah	-	362.455.076
Biaya Dana Lainnya	69.109.500	108.992.153
Gaji dan Upah	-	224.102.800
Biaya Lembur	25.283.382	18.791.431
Biaya Tunjangan	492.590.547	524.466.436
Biaya Promosi/Iklan	39.072.200	12.740.000
Beban Pajak	1.070.264	652.544.719
Biaya Jasa Konsultan	-	51.900.000
Biaya Umum Lainnya	17.689.000	10.375.000
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	644.814.893	1.966.367.615
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan Pipeline telah dipotong PPh 4(2)	-	(1.009.034.318)
Biaya Gaji	(274.439.402)	-
Biaya Upah Sumur Tua	(30.202.659)	-
Pendapatan Bunga Bank	(135.559.145)	(90.069.574)
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	(440.201.206)	(1.099.103.892)
Jumlah koreksi fiskal	204.613.687	867.263.723
Laba (rugi) fiskal	1.547.888.432	2.409.703.758
Perhitungan Pajak (Pasal 31 E)		
Jumlah Omzet termasuk pendapatan lain lain Dengan Fasilitas	17.774.048	-
Tanpa Fasilitas	304.987.359	530.134.827
Jumlah Pajak Terutang	322.761.407	530.134.827
Kredit Pajak		
PPh Pasal 23	(711.647.761)	(1.095.285.225)
Jumlah Kredit Pajak	(711.647.761)	(1.095.285.225)
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(388.886.354)	(565.150.398)

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

10 PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan (Lanjutan)

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terhutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan.

11 UTANG USAHA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pihak Ketiga	<u>1.017.135.548</u>	<u>1.131.915.000</u>
12 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Cadangan Kesejahteraan	<u>254.442.160</u>	<u>267.231.160</u>
Jumlah beban yang masih harus dibayar	<u>254.442.160</u>	<u>267.231.160</u>

13 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA

Perusahaan melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban imbalan paska kerjanya sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, sesuai SAK ETAP Bab 23 sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
- Kewajiban pada awal tahun	364.056.526	364.056.526
- Pembayaran pesangon	-	-
- Beban manfaat karyawan tahun berjalan	-	-
Jumlah	<u>364.056.526</u>	<u>364.056.526</u>

Manajemen menyatakan bahwa jumlah kewajiban imbalan kerja diatas telah mencukupi sebagai cadangan pesangon karyawan sampai dengan tanggal neraca

14 MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal (Rp)
Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Bojonegoro	<u>11.500</u>	<u>100%</u>	<u>11.500.000.000</u>
Jumlah	<u>11.500</u>	<u>100%</u>	<u>11.500.000.000</u>

Berdasarkan akta nomor 6 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Anik Farida Agustini, SH., M.Kn., MH, modal dasar perseroan berjumlah Rp 11.500.000.000. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 11.500 lembar saham dengan nilai saham per saham Rp.1.000.000, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 11.500 lembar saham atau senilai Rp.11.500.000.000 oleh Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Bojonegoro.

15 PENDAPATAN USAHA	2024	2023
Jasa Angkut Angkat Minyak	34.093.597.219	53.582.505.981
CaOH2 PT Rekin	-	301.272.011
Supply Material - SM Sumbawa	11.752.116.160	-
Pipeline	-	1.009.034.318
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>45.845.713.379</u>	<u>54.892.812.310</u>

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

16 HARGA POKOK PENJUALAN	2024	2023
HPP - JASA ANGKUT ANGKAT MINYAK (SUMUR TUA)		
Biaya Bahan	30.067.333.343	47.643.631.476
Biaya Upah	427.261.321	414.414.322
Biaya Dana Lainnya	1.171.334.332	2.163.671.831
Biaya Umum Lapangan	42.313.800	87.564.283
Biaya Bunga Operasional	-	108.992.153
Jumlah Harga Pokok Penjualan Jasa Angkut Minyak (Sumur Tua)	31.708.242.796	50.418.274.065
HPP - CaOH		
Biaya Material Ca(OH) ₂ - Rekin	-	179.910.847
Biaya Umum Lapangan	-	666.956
Jumlah Harga Pokok Penjualan CaOH	-	180.577.803
HPP - SM (Sumbawa)		
Material - Sumbawa	10.458.504.411	-
Biaya Operasional SM - Sumbawa	147.642.946	-
Biaya Umum SM - Sumbawa	456.500	-
Jumlah Harga Pokok Penjualan SM (Sumbawa)	10.606.603.857	-
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN	42.314.846.653	50.598.851.868
17 BEBAN PEMASARAN	2024	2023
Biaya Jamuan Relasi	17.689.000	10.375.000
Biaya Promosi / Iklan	39.072.200	12.710.000
Biaya Tender dan Prakwalifikasi	450.000	-
Jumlah Beban Pemasaran	57.211.200	23.085.000
18 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	2024	2023
Biaya Pegawai		
Gaji Pokok	774.693.556	738.920.159
Biaya Lembur	25.283.382	18.791.431
Biaya Tunjangan Keluarga, Perumahan, Jabatan, Komunikasi	188.468.480	213.544.503
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	160.464.435	165.655.201
Biaya PPh 21	35.668.608	44.594.238
Tunjangan Hari Raya (THR)	73.976.600	73.580.300
Tunjangan Cuti	74.801.600	74.049.550
Tunjangan Pensiun	32.916.000	32.392.000
Sub Jumlah Biaya Pegawai	1.366.272.661	1.361.527.382
Biaya Umum		
Biaya Perjalanan Dinas	274.636.015	241.952.607
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	77.253.159	82.362.865
Biaya Pemeliharaan Inventaris	5.980.520	3.018.500
Biaya Pemeliharaan Bangunan	29.000	51.354.500
Biaya Umum Lainnya	6.651.200	4.598.197
Biaya Energi dan Komunikasi	61.486.650	63.362.913
Biaya Rumah Tangga	16.549.500	26.046.251
Biaya Asuransi	7.840.072	10.554.160
Biaya Pengembangan SDM	14.800.000	15.600.000
Alat Tulis Kantor	9.324.700	10.977.814
Biaya Retribusi	97.708.333	37.002.601
Sub Jumlah Biaya Umum	572.259.149	546.830.408
Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Kendaraan	73.314.396	73.314.396
Beban Penyusutan Inventaris Kantor & Inventaris Proyek	9.644.008	6.273.060
Beban Penyusutan Bangunan	31.736.100	31.736.100
Beban Penyusutan Peralatan	1.871.004	2.471.004
Sub Jumlah Beban Penyusutan	116.565.508	113.794.560

PT. BOJONEGORO BANGUN SARANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

18	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)	2024	2023
	Biaya Jasa		
	Biaya Jasa Konsultan	176.311.000	137.412.000
	Biaya Legalitas	5.000.000	12.000.000
	Sub Jumlah Biaya Jasa	181.311.000	149.412.000
	Jumlah Beban Administrasi dan Umum	2.236.408.318	2.171.564.350
19	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2024	2023
	Pendapatan Lain-Lain		
	Pendapatan Bunga dan Jasa Giro	135.559.145	90.069.574
	Pendapatan Lain lain	660.599	71.071.435
	Jumlah Pendapatan Lain lain	136.219.744	161.141.009
	Beban Lain-Lain		
	Biaya Profesi dan Materai	-	(2.744.375)
	Beban STP Pajak	(1.070.264)	(652.544.719)
	Beban Administrasi Bank	(29.121.942)	(19.977.487)
	Keuntungan (Kerugian) Rupa-Rupa	-	(42.745.484)
	Jumlah Beban Lain lain	(30.192.206)	(718.012.065)
	Jumlah pendapatan (beban) lain lain	106.027.537	(556.871.057)

20 SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang antara lain meliputi transaksi penjualan dan pembelian. Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Nama Perusahaan</u>	<u>Sifat Pihak hubungan istimewa</u>	<u>Sifat Transaksi</u>
PT. Inter Media Energy	Entitas sepengendali	Jual beli dan utang piutang
Transaksi hubungan Istimewa sebagai berikut :		
		31 Desember 2024 31 Desember 2023
a. Piutang Usaha		
PT. Inter Media Energy		3.317.627.754 3.317.627.754
Jumlah Piutang Usaha		- -
		3.317.627.754 3.317.627.754

21 DEVIDEN DAN JASA PRODUKSI

Sesuai dengan pernyataan keputusan rapat perseroan nomor : 255 tanggal 23 Februari 2024, dihadapan Ida Farikhah, SH., MKn., Notaris di Bojonegoro, telah disetujui penggunaan laba perseroan pada tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Menyetujui penggunaan/ pendistribusian laba perseroan tahun 2023 dan 2022 dengan perincian sebagai berikut:	2023	2022
	Laba Rugi Setelah Pajak	1.012.305.208	4.305.417.908
	Dividen untuk Pemegang Saham	404.922.083	1.722.167.163
	Cadangan Umum	151.845.781	536.971.721
	Cadangan Tujuan	404.922.083	1.722.167.163
b.	Menyetujui pemberian Jasa produksi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :	2023	2022
	Jasa produksi	-	162.055.930

22 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN

Manajemen menyatakan dan bertanggung jawab bahwa tidak ada peristiwa signifikan mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 25 Februari 2025 yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

23 PERSETUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah diotorisasi oleh manajemen untuk diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2025.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Direksi	
Laporan Keuangan Pokok	1
1 Neraca	1
2 Laporan Laba Rugi	2
3 Laporan Perubahan Ekuitas	3
4 Laporan Arus Kas	4
5 Catatan Atas Laporan Keuangan	5
1) Umum	5
2) Kebijakan Akuntansi	6
3) Penjelasan Pos-pos Neraca	11
4) Penjelasan Pos-pos Laba - Rugi	20
Laporan Auditor Independen	
Lampiran Rincian Daftar Aktiva	



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUANA
KABUPATEN BOJONEGORO**

Jl. Rajekwesi No. 11 Bojonegoro
Website: <http://www.pdambjn.co.id>

Telp/Fax. (0353) 881253/885253
e-mail: pdambjn@pdambjn.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Khairul Anwar. ST, MM
Alamat Kantor : Jl. Rajekwesi No. 11 Kabupaten Bojonegoro
Alamat Rumah : Perum Vila Bukit Tidar A4 /150 Rt. 8/11.
Kelurahan Merjosari Kec. Lowok Waru, Kabupaten Malang
Telepon Kantor : (0353) 881253/885253
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO.
2. Laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Mohammad Khairul Anwar. ST, MM
Direktur

NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
No.	Uraian	Catatan	Per 31-12-2024 (Rp)	Per 31-12-2023 (Rp)	No.	Uraian	Catatan	Per 31-12-2024 (Rp)	Per 31-12-2023 (Rp)
I	ASET LANCAR	(3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6)	15,497,744,411.84 14,905,768,888.00 (2,625,647,555.75) 12,280,121,332.25 0.00 2,174,090,127.00 0.00 1,154,128,429.00 31,106,084,300.09	3,532,019,959.16 13,847,907,582.00 (2,436,146,162.25) 11,411,761,419.75 14,927,294.00 2,015,503,424.00 0.00 287,435,152.00 17,261,647,248.91	IV	KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Hutang Pajak Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek Total Kewajiban Lancar	(3.9) (3.10) (3.11)	1,190,244,628.00 1,056,716,484.00 0.00 2,246,961,112.00 0.00 0.00 0.00	0.00
II	ASET TETAP	(3.7) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7) (3.7)	3,439,763,820.00 3,666,924,680.00 36,169,034,024.00 17,842,143,782.00 88,566,157,200.00 4,930,107,792.00 402,609,250.00 2,138,951,500.00 2,336,525,060.00 159,492,217,108.00 (106,746,861,517.65) 52,745,355,590.35	3,241,763,820.00 3,168,025,767.00 32,640,274,882.00 17,742,271,782.00 87,010,374,562.00 4,716,643,692.00 402,609,250.00 1,998,271,500.00 2,169,971,900.00 153,090,207,155.00 (99,521,175,155.65) 53,569,031,999.35	VI	KEWAJIBAN LAIN-LAIN Pendapatan dan Belanja Daerah Dana Sosial dan Pendidikan Jasa Produksi Dana Pensiun dan Sumbangan Rupa-rupa Kewajiban Lainnya Peningkatan 3K, Pelayanan Umum Total Kewajiban Lain-lain Total Kewajiban	(3.13) (3.14) (3.15) (3.16) (3.17) (3.18)	1,740,396,722.09 1,479,128,917.00 353,057,595.80 820,516,868.71 642,707,000.00 1,880,178,980.00 6,915,986,083.60 9,162,947,195.60 0.00 44,815,264,997.00 25,159,536,968.00 8,716,656,918.85 78,691,458,883.85 (3,541,521,696.00) (4,134,785,074,19) 3,673,340,581,18 (461,444,493,01) 74,688,492,694,84 83,851,439,890,44	2,285,499,995,09 1,195,409,899,00 463,273,783,80 946,709,993,71 642,707,000,00 1,497,291,700,00 7,030,892,371,60 7,030,892,371,60 6,060,122,370,00 44,815,264,997,00 8,113,392,535,00 8,020,498,227,85 67,009,278,129,85 (3,541,521,696,00) (3,148,763,010,70) 3,480,793,453,50 332,030,442,81 63,799,786,876,66 70,830,679,248,26
III	Aset Lain-lain	(3.8)	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	VII	EKUITAS Modal dan Cadangan: Penyerahan Pemda Yang Dipisahkan Penyerahan Pemerintah Ybd Statusnya Penyerahan Pemkab Bojonegoro Cadangan Umum Total Modal dan Cadangan Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja Laba (Rugi) Ditahan : Laba (Rugi) s.d Tahun Lalu Laba (Rugi) Tahun Berjalan Total Laba (Rugi) Ditahan Total Ekuitas TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	(3.19)	0.00 44,815,264,997.00 25,159,536,968.00 8,716,656,918.85 78,691,458,883.85 (3,541,521,696.00) (4,134,785,074,19) 3,673,340,581,18 (461,444,493,01) 74,688,492,694,84 83,851,439,890,44	6,060,122,370,00 44,815,264,997,00 8,113,392,535,00 8,020,498,227,85 67,009,278,129,85 (3,541,521,696,00) (3,148,763,010,70) 3,480,793,453,50 332,030,442,81 63,799,786,876,66 70,830,679,248,26

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

Mengetahui dan menyetujui
DIREKTUR
Mohammad Khair Anwar, ST, MM

2. Laporan Laba - Rugi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN LABA - RUGI KOMPARATIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Catatan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
I	PENDAPATAN USAHA			
	Pendapatan Penjualan Air	(4.1)	42.063.891.650,00	40.549.748.45
	Pendapatan Non Air	(4.1)	3.088.845.737,00	3.875.323.16
	Total Pendapatan Usaha		45.152.737.387,00	44.425.071.61
II	BEBAN LANGSUNG USAHA			
	Beban Sumber dan Perpompaan	(4.2)	12.451.342.272,00	12.448.611.06
	Beban Pengolahan Air	(4.2)	6.652.275.784,00	6.685.515.64
	Beban Transmisi dan Distribusi	(4.2)	8.788.877.403,00	8.417.142.30
	Total Beban Langsung Usaha		27.892.495.459,00	27.551.269.00
	Laba (Rugi) Kotor		17.260.241.928,00	16.873.802.61
III	BEBAN USAHA			
	Beban Umum dan Administrasi	(4.3)	12.573.311.404,30	12.436.437.36
	Laba (Rugi) Usaha		4.686.930.523,70	4.437.365.24
IV	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
	Pendapatan Lain-lain	(4.4)	61.907.635,48	44.958.79
	Beban Lain-lain	(4.5)	18.781.094,00	6.091.80
	Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		43.126.541,48	38.866.99
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		4.730.057.065,18	4.476.232.23
	Pajak Penghasilan		1.056.716.484,00	995.438.78
	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak		3.673.340.581,18	3.480.793.45

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Mengetahui dan menyetujui
DIREKTUR



Mohammad Kharul Anwar. ST, MM

3. Laporan Perubahan Ekuitas

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	Penyertaan Pemda Yang Dipisahkan (Rp)	Penyertaan Pemerintah Pusat Ybd Statusnya (Rp)	Penyertaan Pemkab Bojonegoro (Rp)	Cadangan Umum (Rp)	Jumlah Modal dan Cadangan (Rp)	Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja (Rp)	Saldo Laba (Rugi) Ditahan (Rp)	Jumlah Ekuitas (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	6.060.122.370,00	44.815.264.997,00	8.113.392.535,00	6.773.258.590,85	65.762.038.492,85	(3.541.521.696,00)	3.434.804.257,44	65.655.321.053,45
Mutasi tahun 2023 Koreksi Laba (Rugi) tahun lalu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.247.239.637,00	0,00 1.247.239.637,00	0,00 0,00	3.480.793.453,50 (6.583.567.267,29)	3.480.793.453,50 (5.336.327.630,29)
Saldo per 31 Desember 2023	6.060.122.370,00	44.815.264.997,00	8.113.392.535,00	8.020.498.227,85	67.009.278.129,85	(3.541.521.696,00)	332.030.443,65	63.799.786.876,66
Mutasi tahun 2024 Koreksi Laba (Rugi) tahun lalu	(6.060.122.370,00) 0,00	0,00 0,00	17.046.144.433,00 0,00	696.158.691,00 0,00	11.682.180.754,00 0,00	0,00 0,00	3.673.340.581,18 (4.466.815.517,00)	15.355.521.335,18 (4.466.815.517,00)
Saldo per 31 Desember 2024	0,00	44.815.264.997,00	25.159.536.968,00	8.716.656.918,85	78.691.458.883,85	(3.541.521.696,00)	(461.444.492,17)	74.688.492.694,84

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUANA
Mengetahui dan menyetujui
DIREKTUR
Mohammad Khalil Anwar, ST, MM

4. Laporan Arus Kas

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
I	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Laba (Rugi) Tahun Bejalan Setelah Pajak	3.673.340.581,18	3.480.793.453,50
	Ditambah/dikurangi unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi:		
	- Penyusutan Aset Tetap	7.225.686.362,00	6.692.731.139,21
	- Penyisihan Piutang Usaha	189.501.393,50	167.788.771,50
	- Koreksi Laba / (Rugi) tahun lalu	(4.466.815.516,50)	(6.583.567.266,88)
	Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	6.621.712.820,18	3.757.746.097,33
	Perubahan Modal Kerja:		
	- Kenaikan (Penurunan) Piutang Usaha	(1.057.861.306,00)	(1.952.652.094,00)
	- Kenaikan (Penurunan) Piutang Non Usaha	14.927.294,00	(14.927.294,00)
	- Kenaikan (Penurunan) Persediaan	(158.586.703,00)	1.194.655.695,00
	- Kenaikan (Penurunan) Beban Dibayar Dimuka	(866.693.277,00)	1.024.688.780,00
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	1.190.244.628,00	0,00
	- Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	1.056.716.484,00	(1.710.485.865,00)
	- Kenaikan (Penurunan) Beban Ymh Dibayar	0,00	0,00
	- Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pasca Kerja JK. Panjang	0,00	0,00
	Total Perubahan Modal kerja	178.747.120,00	(1.458.720.778,00)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	6.800.459.940,18	2.299.025.319,33
II	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Kenaikan (Penurunan) Aset Tetap	(6.402.009.953,00)	(6.178.013.320,00)
	Kenaikan (Penurunan) Aset Dalam Penyelesaian	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(6.402.009.953,00)	(6.178.013.320,00)
III	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Kenaikan (Penurunan) Pendapatan dan Belanja Daerah	(545.103.273,00)	(1.107.430.508,00)
	Kenaikan (Penurunan) Dana Sosial dan Pendidikan	283.719.018,00	140.718.891,40
	Kenaikan (Penurunan) Jasa Produksi	(110.216.188,00)	249.447.926,00
	Kenaikan (Penurunan) Dana Pensiun dan Sumbangan	(126.193.125,00)	(89.917.845,00)
	Kenaikan (Penurunan) Rupa-rupa Kewajiban Lainnya	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Peningkatan 3K, Pelayanan Umum	382.887.280,00	1.497.291.700,00
	Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Pemda Yang Dipisahkan	(6.060.122.370,00)	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Pemerintah YBD Statusnya	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Pemkab Bojonegoro	17.046.144.433,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Umum	696.158.691,00	1.247.239.637,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	11.567.274.466,00	1.937.349.801,40
IV	Kenaikan / Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	11.965.724.453,18	(1.941.638.199,27)
V	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	3.532.019.959,15	5.473.658.158,43
VI	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	15.497.744.412,33	3.532.019.959,15

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Mengetahui dan menyetujui
DIREKTUR

Mohammad Khairul Anwar. ST, MM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN BOJONEGORO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tahun 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1). Umum

(1.1). Uraian Ringkas Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 tahun 1990 tanggal 29 Desember 1990, dan diperbarui sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas perda Nomor 19 tahun 1990 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro. Perusahaan

Perusahaan mengusahakan penyediaan air minum (air bersih) untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro berkedudukan di Jalan Rajekwesi Nomor 11 Bojonegoro.

(1.2). Struktur Organisasi, Direksi dan Badan Pengawas

Struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari Dewan Pengawas, Direktur, Kepala Bagian dan Sub Bagian.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/216/KEP/412.013/2022 tanggal 12 April 2022, tentang pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur dan pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Priyambodo, SE Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya mengangkat :

- Sdr. Mohammad Khairul Anwar, ST. MM : Sebagai Direktur

Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/194/KEP/412.013/2019 tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/453/KEP/412.013/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/194/KEP/412.013/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro Periode tahun 2019 - 2023, sebagai berikut :

- Sdr. H. Soeparno, ST : Sebagai Ketua Dewan Pengawas
- Sdr. Hari Tjahyo Widjihatno, SH : Sebagai Anggota Dewan Pengawas

Sesuai keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/194/KEP/412.013/2019. tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas Periode tahun 2019 - 2023. pada periode 2024 belum ada penunjukan SK terkait pengangkatan Dewan pengawas di periode 2024.

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebanyak 180 orang dan 153 orang sebagai berikut :

	Per 31-Des-2024 (Orang)	Per 31-Des-2023 (Orang)
- Pegawai PDAM	170	146
- Tenaga Honorer	10	7
TOTAL	180	153

2). Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pokok-pokok kabijakan Akuntansi yang dianut dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah tersebut antara lain sebagai berikut :

(2.1). Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah :

a. Kelangsungan Usaha

Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan.

b. Akrua

Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laporan Laba Rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (Neraca) dilakukan dengan metode akrual. Dengan metode akrual, berarti pembukuan tidak hanya sekedar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang, akan tetapi pencatatan terhadap setiap perubahan aset dan kewajiban, demikian pula pendapatan dan beban pada saat terjadinya atau perubahannya.

- c. Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan klasifikasi menurut aktifitas operasi, investasi dan pendanaan.

(2.2). Piutang Usaha

Piutang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai tunai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Piutang usaha yang memiliki kemungkinan tidak tertagih dibuatkan penyisihan dalam jumlah layak.

Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir pada masing-masing kelompok pelanggan, sehingga didapat hasil perhitungan penyisihan piutang air sebagai berikut:

- Kelompok I.1 Masjid, dll	18%
- Kelompok I.2 Hidran umum, dll	7%
- Kelompok II.1 Rumah tangga	10%
- Kelompok II.2 Sekolah, dll	8%
- Kelompok II.3 Rumah sakit, dll	5%
- Kelompok III.1 Rumah dan toko, dll	4%
- Kelompok III.2 Apotek, dll	12%
- Kelompok III.3 Industri kecil, dll	27%
- Kelompok III.4 Asrama pemerintah, dll	4%
- Kelompok IV.1 Agen, showroom, dll	17%
- Kelompok IV.2 Pertamina, dll	3%

Piutang yang telah berumur di atas 2 (dua) tahun diklasifikasikan sebagai Piutang Tak Tertagih, dan telah dapat diusulkan penghapusannya kepada Badan / Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro. dan di catat secara ekstrakontabel.

(2.3). Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi, yang meliputi:

- Persediaan Bahan kimia,
- Persediaan Bahan operasi lainnya.
- Persediaan Bahan ATK
-

Persediaan Bahan Instalasi (pipa-pipa, rupa-rupa suku cadang dan water meter)

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan operasi menggunakan metode "Physical Inventory Method", sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan metode "Perpetual Method".

Dasar penilaian yang dianut terhadap kedua jenis persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan. Akan tetapi jika diantara persediaan terdapat barang-barang yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi agar dinilai dengan taksiran harga jual yang layak atas barang tersebut.

Selisih penilaian antara harga perolehan dan taksiran harga jualnya dibukukan sebagai Kerugian Penurunan Nilai Persediaan dengan perkiraan lawan (kredit) Akumulasi Penurunan Nilai Persediaan. Pos yang disebutkan terakhir ini disajikan sebagai pengurang terhadap harga perolehannya.

Pembebanan pemakaian persediaan ke dalam pos beban dicatat dengan metode Fifo (First In First Out).

(2.4). Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya / harga belinya termasuk semua beban yang timbul dan dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan.

Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar nilai bahan/peralatan yang digunakan dan beban pengerjaan serta beban-beban umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tersebut.

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 10 tahun 1994 yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1994 c.q. Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/Atau Amortisasi Harta tak Berwujud.

Aset tetap Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun, kecuali golongan bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus, dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok Aset	Masa Manfaat	% Penyusutan	Keterangan
I. Bukan Bangunan			
- Kelompok I	< 4 tahun	50%	Dari nilai buku
- Kelompok II	4 - 8 tahun	25%	Dari nilai buku
- Kelompok III	8 - 16 tahun	12,5%	Dari nilai buku
- Kelompok IV	> 16 tahun	10%	Dari nilai buku
II. Bangunan			
- Permanen	20 tahun	5%	Dari perolehan
- Tidak Permanen	10 tahun	10%	Dari perolehan

Penyusutan aset tetap dihitung sejak bulan perolehannya.

(2.5). Aset Tetap Dalam Penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat berdasarkan nilai perolehan beserta semua beban yang telah dikeluarkan untuk memperoleh/membangun aset tersebut dan diakui sesuai dengan persentase bobot penyelesaiannya pada akhir tahun dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap tersebut dinyatakan beroperasi komersial.

Aset tetap dalam penyelesaian yang telah selesai dilaksanakan dan siap dioperasikan, dipindahkan dalam kelompok aset tetap.

(2.6). Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo

Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang setelah tanggal neraca termasuk yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dilunasi, dipisahkan dari kelompok hutang jangka panjang dan disajikan dalam kewajiban lancar kecuali:

- Bagian yang telah jatuh tempo tersebut akan menjadi hutang jangka panjang dengan suatu perjanjian baru.
- Dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan dari aset lancar.

(2.7). Pengakuan Pendapatan

Pendapatan, baik pendapatan usaha maupun non usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan atau pada masa prestasi dinikmati, yaitu:

- Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang dicatat dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD) pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai.
- Pendapatan sambungan baru diakui pada saat ditandatangani kontrak Bukti Persetujuan Pembebanan Instalasi (BPPI) diterbitkan dan pendapatan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan ketentuan :
 - Apabila pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, pendapatan diakui dan dicatat pada saat ditandatangani kontrak sambungan baru.
 - Apabila pembayaran dilakukan dengan cara tunai, pendapatan diakui dan dicatat pada saat penerimaan uang (pembayaran).
 - Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima.
- Penerimaan pemeliharaan meter dari pelanggan yang dimaksudkan untuk pemeliharaan meter air diakui sebagai pendapatan air dan dibuku pada saat diterbitkan Daftar Rekening Ditagih (DRD).

(2.8). Pengakuan Beban

Pengakuan Beban pada dasarnya menggunakan sistem accrual basis. Beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan beban-beban yang bersifat periodik seperti gaji, listrik dan sebagainya dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka.

Beban yang belum dilakukan pengeluaran pembayarannya, dibukukan dalam pos Beban Yang Masih Harus Dibayar. Demikian pula beban pengeluaran beban yang belum mempunyai nilai prestasi, dibukukan sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Untuk keperluan pisah batas akuntansi, beban-beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca dan belum diketahui secara pasti jumlahnya, harus dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

(2.9). Pengeluaran Barang Modal dan Beban

Batasan pengeluaran beban yang dikapitalisasi atau diperlakukan sebagai pengeluaran barang modal adalah barang modal yang diperoleh untuk digunakan dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan batasan jumlah diatas Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selain Sambungan Rumah.

Pengeluaran-pengeluaran untuk penggantian komponen-komponen mesin / instalasi yang bersifat pemeliharaan rutin, dibukukan sebagai beban. Akan tetapi bila perbaikan/ penggantian komponen yang dimaksud memberi tambahan masa dan/atau nilai manfaat dari aset tersebut dan nilainya melebihi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seperti tersebut di atas agar dibukukan sebagai pengurang (debit) akumulasi penyusutan.

(2.10). Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro atas jasa yang diberikan oleh pegawai, termasuk Direktur dan Dewan Pengawas. Pada umumnya terdapat 4 jenis imbalan kerja yaitu:

- Imbalan kerja jangka pendek
- Imbalan pasca kerja
- Pesangon pemutusan kerja
- Jasa Pengabdian Direktur dan Badan Pengawas

Imbalan kerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) No. 23 yang menyatakan bahwa Perusahaan wajib memberikan imbalan kerja kepada karyawannya sesuai permendagri nomor 2 tahun 2007 antara lain berupa :

- Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, pembagian laba dan bonus.
- Imbalan pasca kerja, seperti pensiun, asuransi jiwa pasca kerja dan imbalan kesehatan pasca kerja.
- Imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar, cuti hari raya dan imbalan cacat permanen.

3). Penjelasan Pos-pos Neraca**Per 31-Des-2024
(Rp)****Per 31-Des-2023
(Rp)****(3.1). Kas dan Setara Kas****15.497.744.411,84****3.532.019.959,16**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Kas Pusat dalam Perjalanan	0,00	1.266.400,32
- Kas kecil	15.000.000,00	15.000.000,00
- Bank Jatim Bojonegoro - Giro 0081001755	960.320.657,20	646.349.503,20
- Bank BPR TABEDA	1.371.989.534,06	367.860.441,06
- Giro Bank Jatim Padangan - 0081009091	341.631.913,04	229.938.576,04
- Giro BRI Unit Kapas - 001101000720302	185.059.177,07	355.594.160,07
- Giro BRI Unit Balen - 001101000721308	238.483.899,08	252.346.013,08
- Giro Bank Jatim Sumberrejo - 0081009031	409.248.987,04	162.133.443,04
- Giro BRI Unit Baureno - 001101000722304	200.462.874,06	209.633.534,06
- Giro Bank Jatim Kalitidu - 0081009040	167.896.086,02	93.552.837,02
- Giro BRI Unit Purwosari - 001101001028305	163.341.562,07	186.837.374,07
- Giro Bank BRI - 001101000842308	366.768.689,06	246.349.462,06
- Giro Bank Jatim Bojonegoro - 0081032378	359.007.631,03	139.173.947,03
- Giro Bank BNI - 0508829992	404.392.952,12	325.984.268,12
- Giro Bank Jatim II Bojonegoro	10.013.040.450,00	0,00
- Giro Bank Mandiri Bojonegoro	1.100.000,00	0,00
- Deposito di Bank JATIM	300.000.000,00	300.000.000,00
Total Kas dan Setara Kas	15.497.744.411,84	3.532.019.959,16

Saldo kas dan setara kas tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan kas dan hasil rekonsiliasi Rekening Koran bank bersangkutan.

kas Kecil merupakan dana cadangan untuk kasir pelayanan pusat dan unit-unit yang berada di wilayah kerja Bojonegoro.

(3.2). Piutang Usaha**14.905.768.888,00****13.847.907.582,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Piutang Rekening Air	14.843.099.888,00	13.771.368.082,00
- Piutang Rekening Non Air	62.669.000,00	76.539.500,00
Total Piutang Usaha	14.905.768.888,00	13.847.907.582,00

Berdasarkan kelompok pelanggan, piutang rekening air dan non air per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp. 14.905.768.888,00 dan Rp. 13.847.907.582,00 dapat dirinci sebagai berikut :

- Piutang Rekening Air :		
- Kelompok - I.1 Sosial Khusus	185.076.750,00	217.743.650,00
- Kelompok - I.2 Sosial Umum	7.180.950,00	72.562.900,00
- Kelompok - II.1 Rumah tangga A	12.835.953.288,00	11.869.350.144,00
- Kelompok - II.2 Rumah tangga B	163.422.800,00	261.919.634,00
- Kelompok - II.3 Rumah tangga C	63.086.000,00	80.391.250,00
- Kelompok - II.4 Rumah tangga D	67.027.700,00	0,00
- Kelompok - III.1 Niaga A	709.878.300,00	404.061.150,00
- Kelompok - III.2 Niaga B	165.397.300,00	325.918.704,00
- Kelompok - III.3 Niaga C	153.194.150,00	78.901.750,00
- Kelompok - III.4 Instansi Pemerintah (If	247.811.450,00	288.361.950,00
- Kelompok - IV.1 Industri Kecil A	172.735.500,00	83.208.950,00
- Kelompok - IV.2 Industri Kecil B	62.479.450,00	88.948.000,00
- Kelompok - V.1 Industri, dll	9.856.250,00	0,00
Total Piutang Rekening Air	14.843.099.888,00	13.771.368.082,00
- Piutang Rekening Non Air :		
- II.1 Rumah tangga	62.669.000,00	76.539.500,00
Total Piutang Usaha	14.905.768.888,00	13.847.907.582,00

Berdasarkan kelompok pelanggan, piutang rekening air dan piutang non air per-31 Desember 2024 sebesar Rp.14.843.099.888,00 dan Rp.62.669.000,00 serta penyisihan piutang air sebesar Rp.2.625.647.556 dan piutang non air nihil. dapat dirinci sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	% Penyisihan Rata-rata	Total Piutang Per 31-12-2024 (Rp)	Piutang > 2 Tahun Per 31-12-2024 (Rp)	Dasar Penyisihan Per 31-12-2024 (Rp)	Penys. Piutang Air Per 31-12-2024 (Rp)
Saldo awal					2.436.146.162,25
Penyisihan Tahun lalu					
Kelompok - I.1 Sosial Khusus	18%	185.076.750,00	167.119.750,00	17.957.000,00	3.232.260,00
Kelompok - I.2 Sosial Umum	7%	7.180.950,00	5.992.950,00	1.188.000,00	83.160,00
Kelompok - II.1 Rumah tangga A	10%	12.835.953.288,00	11.101.627.588,00	1.734.325.700,00	173.432.570,00
Kelompok - II.2 Rumah tangga B	8%	163.422.800,00	152.405.900,00	11.016.900,00	881.352,00
Kelompok - II.3 Rumah tangga C	5%	63.086.000,00	58.758.900,00	4.327.100,00	216.355,00
Kelompok - II.4 Rumah tangga D	5%	67.027.700,00	60.610.250,00	6.417.450,00	320.872,50
Kelompok - III.1 Niaga A	4%	709.878.300,00	629.393.950,00	80.484.350,00	3.219.374,00
Kelompok - III.2 Niaga B	12%	165.397.300,00	142.022.800,00	23.374.500,00	2.804.940,00
Kelompok - III.3 Niaga C	27%	153.194.150,00	139.165.900,00	14.028.250,00	3.787.627,50
Kelompok - III.4 Instansi Pemerintah	4%	247.811.450,00	223.294.500,00	24.516.950,00	980.678,00
Kelompok - IV.1 Industri Kecil A	17%	172.735.500,00	170.056.900,00	2.678.600,00	455.362,00
Kelompok - IV.2 Industri Kecil B	3%	62.479.450,00	59.584.700,00	2.894.750,00	86.843
Kelompok - V.3 Industri, dll	0%	9.856.250,00	2.609.950,00	7.246.300,00	0
Total		14.843.099.888,00	12.912.644.038,00	1.930.455.850,00	2.625.647.555,75

Piutang Rekening Non Air

Kelompok Pelanggan	% Penyisihan Rata-rata	Total Piutang Per 31-12-2024 (Rp)	Piutang > 2 Tahun Per 31-12-2024 (Rp)	Dasar Penyisihan Per 31-12-2024 (Rp)	Penys. Piutang Per 31-12-2024 (Rp)
Piutang Non Air					
II.1 Rumah tangga	0%	62.669.000,00	0,00	62.669.000,00	0,00
Total		62.669.000,00	0,00	62.669.000,00	0,00

Berdasarkan kelompok pelanggan, piutang rekening air dan piutang non air per- 31 Desember 2023 sebesar Rp.13.771.368.082,00 dan Rp.76.539.500,00 serta penyisihan piutang air sebesar Rp.2.436.146.162 dan piutang non air nihil dapat dirinci sebagai berikut:

Kelompok Pelanggan	% Penyisihan Rata-rata	Total Piutang Per 31-12-2023 (Rp)	Piutang > 2 Tahun Per 31-12-2023 (Rp)	Dasar Penyisihan Per 31-12-2023 (Rp)	Penys. Piutang Air Per 31-12-2023 (Rp)
Saldo awal					2.268.357.390,75
Penyisihan Tahun lalu					
I.1 Masjid, dll	18%	217.743.650,00	158.833.150,00	58.910.500,00	10.603.890,00
I.2 Hidran umum, dll	7%	72.562.900,00	68.408.050,00	4.154.850,00	290.839,50
II.1 Rumah Tangga	10%	11.869.350.144,00	10.973.489.844,00	895.860.300,00	89.586.030,00
II.2 Sekolah, dll	8%	261.919.634,00	193.252.134,00	68.667.500,00	5.493.400,00
II.3 Rumah Sakit, dll	5%	80.391.250,00	65.220.150,00	15.171.100,00	758.555,00
III. 1 Rumah dan Toko, dll	4%	404.061.150,00	255.356.300,00	148.704.850,00	5.948.194,00
III.2 Apotek, dll	12%	325.918.704,00	30.073.504,00	295.845.200,00	35.501.424,00
III.3 Industri Kecil, dll	27%	78.901.750,00	32.743.000,00	46.158.750,00	12.462.862,50
III.4 Asrama pemerintah, dll	4%	288.361.950,00	172.276.950,00	116.085.000,00	4.643.400,00
IV.1 Agen, showroom, dll	17%	83.208.950,00	72.196.750,00	11.012.200,00	1.872.074,00
IV.2 Pertamina, dll	3%	88.948.000,00	68.011.250,00	20.936.750,00	628.102,50
Total		13.771.368.082,00	12.089.861.082,00	1.681.507.000,00	2.436.146.162,25

Kelompok Pelanggan	% Penyisihan Rata-rata	Total Piutang Per 31-12-2023 (Rp)	Piutang > 2 Tahun Per 31-12-2023 (Rp)	Dasar Penyisihan Per 31-12-2023 (Rp)	Penys. Piutang Per 31-12-2023 (Rp)
Piutang Non Air					
II.1 Rumah tangga	0%	76.539.500,00	0,00	76.539.500,00	0,00
Total		76.539.500,00	0,00	76.539.500,00	0,00

(3.3). Penyisihan Piutang Usaha **2.625.647.555,75** **2.436.146.162,25**

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Penyisihan Piutang Rekening Air	2.625.647.555,75	2.436.146.162,25
- Penyisihan Piutang Rekening Non Air	0,00	0,00
Total Penyisihan Piutang Usaha	2.625.647.555,75	2.436.146.162,25

Rincian penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada gambar tabel di atas.

(3.4). Piutang Non Usaha **0,00** **14.927.294,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang non usaha per 31 Desember 2024 dan 2023.

- Piutang Pegawai	0,00	0,00
- Piutang Iuran Dapema	0,00	14.927.294,00
Total Piutang Non Usaha	0,00	14.927.294,00

(3.5). Persediaan 2.174.090.127,00 2.015.503.424,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Persediaan ATK dan Barang Cetakan	15.463.500,00	23.921.000,00
- Persediaan Bahan Kimia	32.248.873,00	128.547.460,00
- Persediaan Instalasi	2.126.377.754,00	1.863.034.964,00
Total Persediaan	2.174.090.127,00	2.015.503.424,00

(3.6). Beban Dibayar Dimuka 1.154.128.429,00 287.435.152,00

Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa dibayar di muka	88.800.000,00	119.700.000,00
- Uang muka pajak pph 25	1.065.328.429,00	167.735.152,00
Total Beban dibayar Dimuka	1.154.128.429,00	287.435.152,00

(3.7). Aset Tetap 52.745.355.590,35 53.569.031.999,35

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

- Harga Perolehan	159.492.217.108,00	153.090.207.155,00
- Akumulasi Penyusutan	(106.746.861.517,65)	(99.521.175.155,65)
Nilai Tercatat	52.745.355.590,35	53.569.031.999,35

Uraian	Saldo	Mutasi Tahun 2024		Saldo
	Per 31-12-2023 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Per 31-12-2024 (Rp.)
Harga perolehan				
Tanah	3.241.763.820,00	198.000.000,00	0,00	3.439.763.820,00
Instalasi Sumber Air & Pompa	35.808.300.649,00	4.027.658.055,00	0,00	39.835.958.704,00
Instalasi Pengolahan Air	17.742.271.782,00	99.872.000,00	0,00	17.842.143.782,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	87.010.374.562,00	1.555.782.638,00	0,00	88.566.157.200,00
Bangunan	4.716.643.692,00	213.464.100,00	0,00	4.930.107.792,00
Peralatan dan Perlengkapan	402.609.250,00	0,00	0,00	402.609.250,00
Kendaraan	1.998.271.500,00	140.680.000,00	0,00	2.138.951.500,00
Inventaris Kantor	2.169.971.900,00	166.553.160,00	0,00	2.336.525.060,00
Total Nilai Perolehan	153.090.207.155,00	6.402.009.953,00	0,00	159.492.217.108,00
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber Air & Pompa	23.868.533.670,64	1.948.586.645,66	0,00	25.817.120.316,30
Instalasi Pengolahan Air	12.660.953.915,70	568.269.119,68	0,00	13.229.223.035,38
Instalasi Transmisi dan Distribusi	56.903.229.083,21	4.213.355.565,14	0,00	61.116.584.648,35
Bangunan	2.095.594.129,92	152.099.017,81	0,00	2.247.693.147,73
Peralatan dan Perlengkapan	333.470.998,17	50.092.916,28	0,00	383.563.914,45
Kendaraan	1.739.335.623,85	143.878.964,42	0,00	1.883.214.588,27
Inventaris Kantor	1.920.057.734,09	149.404.132,74	0,00	2.069.461.866,83
Total Akm. Penyusutan	99.521.175.155,58	7.225.686.361,73	0,00	106.746.861.517,31
Nilai Tercatat	53.569.031.999,42			52.745.355.590,69

Uraian	Saldo	Mutasi Tahun 2023		Saldo
	Per 31-12-2022 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Per 31-12-2023 (Rp.)
Harga perolehan				
Tanah	3.241.763.820,00	0,00	0,00	3.241.763.820,00
Instalasi Pompa	33.288.171.411,00	2.520.129.238,00	0,00	35.808.300.649,00
Instalasi Pengolahan Air	17.742.271.782,00	0,00	0,00	17.742.271.782,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	84.250.693.380,00	2.759.681.182,00	0,00	87.010.374.562,00
Bangunan	4.072.881.792,00	643.761.900,00	0,00	4.716.643.692,00
Peralatan dan Perlengkapan	402.609.250,00	0,00	0,00	402.609.250,00
Kendaraan	1.869.841.500,00	128.430.000,00	0,00	1.998.271.500,00
Inventaris Kantor	2.043.960.900,00	126.011.000,00	0,00	2.169.971.900,00
Total Nilai Perolehan	146.912.193.835,00	6.178.013.320,00	0,00	153.090.207.155,00
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber Air dan Pompa	21.774.635.941,64	2.093.897.729,00	0,00	23.868.533.670,64
Instalasi Pengolahan Air	11.947.918.903,59	713.035.012,11	0,00	12.660.953.915,70
Instalasi Transmisi dan Distribusi	52.841.648.537,86	4.061.580.545,35	0,00	56.903.229.083,21
Bangunan	1.933.504.683,31	162.089.446,61	0,00	2.095.594.129,92
Peralatan dan Perlengkapan	312.599.704,23	20.871.293,94	0,00	333.470.998,17
Kendaraan	1.940.352.313,84	35.084.123,85	236.100.813,84	1.739.335.623,85
Inventaris Kantor	2.077.783.931,96	138.476.088,20	296.202.286,08	1.920.057.734,09
Total Akm. Penyusutan	92.828.444.016,44	7.225.034.239,06	532.303.099,92	99.521.175.155,58
Nilai Tercatat	54.083.749.818,56			53.569.031.999,42

Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp.7.225.686.361,73 dan Rp. 7.225.034.239,06, dibebankan pada beban-beban sebagai berikut:

- Beban penyusutan Sumber dan Pompa	1.948.586.645,66	2.093.897.729,00
- Beban penyusutan Pengolahan Air	568.269.119,68	713.035.012,11
- Beban penyusutan Transmisi dan Distribusi	4.213.355.565,14	4.061.580.545,35
- Beban penyusutan Umum dan Administrasi	495.475.031,25	356.520.952,60
Total Beban Penyusutan	7.225.686.361,73	7.225.034.239,06

(3.8). Aset Lain-lain 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023.

(3.9). Hutang Usaha 1.190.244.628,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Rekanan Yuan Teai Indonesia	199.683.450,00
- Rekanan Alam Indah	199.920.435,00
- Rekanan Pinanggih Teknikatama Indo	197.500.000,00
- Rekanan Total Abadi Solusindo	199.500.000,00
- Rekanan Hesco Sejahtera	193.962.843,00
- Rekanan Karya Prima	199.677.900,00
Total Hutang Usaha	1.190.244.628,00

(3.10). Hutang Pajak	1.056.716.484,00	0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 berupa hutang pajak PPh badan tahunan.		
(3.11). Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	0,00	0,00
Jumlah tersebut merupakan kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek setelah dilakukan pembayaran melalui iuran tambahan sesuai dengan surat Dapenma Pamsi per 31 Desember 2024 dan 2023.		
(3.12). Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah tersebut merupakan kewajiban imbalan kerja jangka panjang yang berasal dari surat Dapenma Pamsi per 31 Desember 2024 dan 2023.		
(3.13). Pendapatan dan Belanja Daerah	1.740.396.722,09	2.285.499.995,09
Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan belanja daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang berasal dari pembagian laba.		
(3.14). Dana Sosial dan Pendidikan	1.479.128.917,00	1.195.409.899,00
Jumlah tersebut merupakan dana sosial dan pendidikan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang berasal dari pembagian laba		
(3.15). Jasa Produksi	353.057.595,80	463.273.783,80
Jumlah tersebut merupakan jasa produksi per 31 Desember 2024 dan 2023 yang berasal dari pembagian laba.		
(3.16). Dana Pensiun dan Sumbangan	820.516.868,71	946.709.993,71
Jumlah tersebut merupakan dana pensiun dan sumbangan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang berasal dari pembagian laba.		
(3.17). Rupa-rupa Kewajiban Lainnya	642.707.000,00	642.707.000,00
Jumlah tersebut merupakan rupa - rupa kewajiban lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023, yang berasal dari penyerahan barang inventaris dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro nomor : 050/1298/412.34/2013 yang sampai sekarang belum ada berita acara penghibahan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Perumda Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro, masing-masing dirinci sebagai berikut :		

- Lanjutan Rupa-rupa Kewajiban Lainnya		
- Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Purwosari (Penambahan Daya)	98.819.000,00	98.819.000,00
- Pembangunan Sarana Air Bersih IKK Kanor (Pekerjaan Perpipaan)	543.888.000,00	543.888.000,00
Rupa-rupa Kewajiban Lainnya	642.707.000,00	642.707.000,00

(3.18). Peningkatan 3K, Pelayanan Umum **0,00** **0,00**

Jumlah tersebut merupakan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas (3K) Pelayanan umum per 31 Desember 2024 dan 2023 yang berasal dari pembagian laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro.

(3.19). Ekuitas **74.688.492.694,84** **63.799.786.876,66**

Jumlah tersebut merupakan ekuitas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

- Modal dan Cadangan:		
- Penyertaan Pemda Yang Dipisahkan	0,00	6.060.122.370,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Ybd Statusnya	44.815.264.997,00	44.815.264.997,00
- Penyertaan Pemkab Bojonegoro	25.159.536.968,00	8.113.392.535,00
- Cadangan Umum	8.716.656.918,85	8.020.498.227,85
Total Modal dan Cadangan	78.691.458.883,85	67.009.278.129,85
- Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja		
	(3.541.521.696,00)	(3.541.521.696,00)
- Laba (Rugi) Ditahan :		
- Laba (Rugi) s.d Tahun Lalu	(4.134.785.074,19)	(3.148.763.010,70)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.673.340.581,18	3.480.793.453,50
Total Laba (Rugi) Ditahan	(461.444.493,01)	332.030.442,81
Total Ekuitas	74.688.492.694,84	63.799.786.876,66

- Penyertaan modal pemerintah daerah yang dipisahkan Rp.6.060.122.370,00 merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui PPSAB Jawa Timur dan telah ditetapkan statusnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No. 5/BAW.13/1997 tanggal 5 Juni 1997 sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan No. S-1897/A/152/0597 tanggal 5 Mei 1997, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

- Realisasi DIP Tahun 1979/1980	27.490.500,00
- Realisasi DIP Tahun 1980/1981	422.486.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1981/1982	114.690.909,00
- Realisasi DIP Tahun 1982/1983	55.598.627,00
Sub Jumlah	620.266.036,00

Lanjutannya 620.266.036,00

- Realisasi DIP Tahun 1983/1984	184.911.750,00
- Realisasi DIP Tahun 1984/1985	73.472.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1985/1986	104.742.380,00
- Realisasi DIP Tahun 1987/1988	15.615.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1988/1989	458.805.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1989/1990	74.400.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1990/1991	167.123.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1991/1992	1.305.142.879,00
- Realisasi DIP Tahun 1992/1993	62.965.700,00
- Realisasi DIP Tahun 1993/1994	374.192.825,00
- Realisasi DIP Tahun 1994/1995	2.265.875.800,00
- Realisasi DIP Tahun 1995/1996	352.610.000,00
Total	0,00 6.060.122.370,00

- Penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.44.815.264.997,00 dan Rp.44.815.264.997,00, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Realisasi DIP Tahun 1991/1992	11.849.625,00	11.849.625,00
- Realisasi DIP Tahun 1992/1993	203.293.000,00	203.293.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1993/1994	190.369.000,00	190.369.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1995/1996	3.155.854.120,00	3.155.854.120,00
- Realisasi DIP Tahun 1996/1997	318.937.300,00	318.937.300,00
- Realisasi DIP Tahun 1997/1998	88.700.000,00	88.700.000,00
- Realisasi DIP Tahun 1999/2000	525.292.800,00	525.292.800,00
- Realisasi DIP Tahun 2003/2004	22.329.822,00	22.329.822,00
- Realisasi DIP Tahun 2003/2004	871.423.230,00	871.423.230,00
- Realisasi DIP Tahun 2007/2008	1.723.869.400,00	1.723.869.400,00
- Realisasi DIP Tahun 2008/2009	200.977.700,00	200.977.700,00
- Realisasi DIP Tahun 2008/2009	2.820.554.000,00	2.820.554.000,00
- No.16/BAST/PK-PAM.JT/2011 tg 29/12/2011	8.616.868.700,00	8.616.868.700,00
- Bantuan Tahun 2013	13.339.824.300,00	13.339.824.300,00
- No.01.9/BAST/PK-PAM.JT/2014 tgl 31/12/	1.334.919.000,00	1.334.919.000,00
- No.16/BAST/PAMS-JT/2015	11.390.203.000,00	11.390.203.000,00
Total	44.815.264.997,00	44.815.264.997,00

- Penyertaan pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.25.159.536.968,00 dan Rp.8.113.392.535,00, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Ganti rugi tanah seluas 1.156 m2	17.905.000,00
- Setoran modal tunai dari Pemda	150.000.000,00
- Jaringan Instalasi Air Bersih	742.372.000,00
- Deviden dari laba yg ditahan dari TH. 2010 sampai dengan TH. 2018 dalam bentuk aset yang telah dimanfaatkan.	7.203.115.535,00

Lanjutan Penyertaan pemerintah Kabupaten Bojonegoro

- Modal dasar Pendirian Sesuai Perda nomor 19 Tahun 1990 Tentang Pendirian PDAM Kab. Dati II Bojonegoro	1.002.427.063,05	
- Modal disetor dari tahun 1994 sampai tahun 2010 dalam bentuk Aset yang telah di manfaatkan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2023	6.953.994.370,00	
- Deviden dari laba yang ditahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 dalam bentuk aset yang telah	7.203.115.535,00	
- Penyertaan Modal Perda Nomor 1 Tahun 2023	10.000.000.000,00	
Total	25.159.536.968,05	8.113.392.535,00

Deviden dari laba sebesar Rp.7.203.115.535,00 berasal dari pembagian laba, sesuai berita acara keputusan rapat luar biasa tanggal 22 juli 2022.

- Cadangan umum per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.8.716.656.918,85 dan Rp.8.020.498.227,85. berasal dari pembagian laba.

- Pengukuran kembali Imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.541.521.696,00 merupakan penyesuaian perhitungan pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek dan kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang setelah dilakukan pembayaran iuran tambahan dan melalui percepatan dengan Dapenma Pamsi, sebagai berikut :

Saldo Awal	3.541.521.696,00	5.538.071.277,00
- Penambahan	0,00	1.037.441.857,00
- Pengurangan	-	(3.033.991.438,00)
Jumlah	3.541.521.696,00	3.541.521.696,00

Laba (Rugi) ditahan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.-461.444.493,01 dan Rp.332.030.442,81, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut :

- Laba (Rugi) BPAM s.d 31-3-1992	(565.825.728,00)	(565.825.728,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 1992 - 1999	(2.880.146.339,00)	(2.880.146.339,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2000 - 2010	1.653.730.974,00	1.653.730.974,00
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2011	340.035.681,00	340.035.681,00
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2011	(812.094.023,00)	(812.094.023,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2012	952.733.359,00	952.733.359,00
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2012	(952.733.299,00)	(952.733.299,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2013	968.869.041,00	968.869.041,00
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2013	(968.869.041,00)	(968.869.041,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2014	1.049.432.292,00	1.049.432.292,00
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2015	1.823.546.847,26	1.823.546.847,26
Sub Jumlah	608.679.764,26	608.679.764,26

Lanjutan uraian	608.679.764,26	608.679.764,26
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2015	(1.049.432.292,00)	(1.049.432.292,00)
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2016	4.717.793.696,34	4.717.793.696,34
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2016	1.492.910.505,50	1.492.910.505,50
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2016	(1.492.910.507,00)	(1.492.910.507,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2017	1.720.470.492,44	1.720.470.492,44
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2017	(1.720.470.492,44)	(1.720.470.492,44)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2018	4.298.541.139,00	4.298.541.139,00
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2018	(5.582.208.019,00)	(5.582.208.019,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2019	6.168.964.552,00	6.168.964.552,00
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2019	(1.674.938.920,00)	(1.674.938.920,00)
- Koreksi Pembagian Laba (Rugi) tahun 2019	(6.168.964.552,00)	(6.168.964.552,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2020	4.905.843.848,00	4.905.843.848,00
- Koreksi Laba (Rugi) s.d tahun 2021	(1.085.837.826,00)	(1.085.837.826,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2021	6.015.527.978,00	6.015.527.978,00
- Koreksi Pembagian Laba (Rugi)	(10.921.371.826,00)	(10.921.371.826,00)
- Koreksi Pengukuran (Rugi) s.d th. 2021	(3.033.991.438,00)	(3.033.991.438,00)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2022	6.236.198.153,50	6.236.198.153,50
- Koreksi Pembagian Laba (Rugi)	(6.583.567.267,29)	(6.583.567.267,29)
- Laba (Rugi) PDAM tahun 2023	3.480.793.453,50	
- Koreksi Pembagian Laba (Rugi)	(4.466.815.517,00)	
- Laba (Rugi) s.d Tahun Lalu	(4.134.785.074,19)	(3.148.763.010,70)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.673.340.581,18	3.480.793.453,50
- Saldo Laba (Rugi) Ditahan	(461.444.493,01)	332.030.442,81

4). Penjelasan Pos-pos Laba - Rugi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
--------------------	--------------------

(4.1). Pendapatan Usaha	45.152.737.387,00	44.425.071.617,00
-------------------------	-------------------	-------------------

Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha tahun 2024 dan 2023 yang terdiri

- Pendapatan Penjualan Air	42.063.891.650,00	40.549.748.450,00
- Pendapatan Non Air	3.088.845.737,00	3.875.323.167,00

Total Pendapatan Usaha	45.152.737.387,00	44.425.071.617,00
------------------------	-------------------	-------------------

Pendapatan penjualan air tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.42.063.891.650,00 dan Rp.40.549.748.450,00. yang terdiri dari :

Pendapatan Air Tahun 2024				
Uraian	Harga air (Rp)	Jasa Adm. (Rp)	Jasa Meter (Rp)	Total (Rp)
BNA Bojonegoro	11.219.802.000	472.172.000	753.342.000,00	12.445.316.000,00
IKK Dander	7.250.165.850	293.919.000	448.712.000,00	7.992.796.850,00
IKK Padangan	2.286.443.500	81.945.000	127.840.000,00	2.496.228.500,00
IKK Kapas	5.079.767.400	215.208.000	326.643.000,00	5.621.618.400,00
IKK Balen	1.313.953.400	60.672.000	93.128.000,00	1.467.753.400,00
IKK Sumberejo	1.576.726.800	60.210.000	93.513.500,00	1.730.450.300,00
IKK Baureno	2.281.487.150	107.973.000	167.337.500,00	2.556.797.650,00
IKK Kalitidu	422.102.900	15.621.000	26.825.000,00	464.548.900,00
IKK Trucuk	1.120.217.000	44.277.000	67.877.500,00	1.232.371.500,00
IKK Purwosari	1.245.267.300	47.307.000	78.753.500,00	1.371.327.800,00
IKK Kanor	135.092.250	6.132.000	9.386.000,00	150.610.250,00
IKK Sugihwaras	1.904.248.750	88.863.000	135.596.000,00	2.128.707.750,00
IKK Kedungadem	2.075.147.350	131.805.000	198.412.000,00	2.405.364.350,00
Total	37.910.421.650,00	1.626.104.000,00	2.527.366.000,00	42.063.891.650,00

Pendapatan Air Tahun 2023				
Uraian	Harga air (Rp)	Jasa Adm. (Rp)	Jasa Meter (Rp)	Total
BNA Bojonegoro	10.910.511.800	474.570.000	752.679.500,00	12.137.761.300,00
IKK Dander	6.733.986.800	285.561.000	433.521.000,00	7.453.068.800,00
IKK Padangan	2.137.521.150	81.195.000	125.612.500,00	2.344.328.650,00
IKK Kapas	4.935.056.150	211.899.000	321.453.500,00	5.468.408.650,00
IKK Balen	1.303.254.500	59.625.000	90.841.500,00	1.453.721.000,00
IKK Sumberejo	1.415.452.850	60.585.000	92.702.000,00	1.568.739.850,00
IKK Baureno	2.464.238.750	114.903.000	177.319.000,00	2.756.460.750,00
IKK Kalitidu	360.005.550	16.089.000	26.742.500,00	402.837.050,00
IKK Trucuk	1.278.389.200	44.451.000	68.156.500,00	1.390.996.700,00
IKK Purwosari	1.046.358.350	46.716.000	70.789.500,00	1.163.863.850,00
IKK Kanor	135.170.700	6.150.000	9.273.000,00	150.593.700,00
IKK Sugihwaras	1.759.961.600	82.263.000	124.439.000,00	1.966.663.600,00
IKK Kedungadem	1.946.881.550	138.150.000	207.273.000,00	2.292.304.550,00
Total	36.426.788.950,00	1.622.157.000,00	2.500.802.500,00	40.549.748.450,00

Pendapatan non air tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.3.088.845.737,00 dan Rp.3.875.323.167,00 yang terdiri dari :

Pendapatan Non Air Tahun 2024					
Uraian	Sambungan baru (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Denda (Rp)	Non Air Lainnya (Rp)	Total (Rp)
BNA Bojonegoro	544.578.833,00	2.870.000,00	870.379.000,00	291.810.904,00	1.709.638.737,00
IKK Dander	293.102.000,00	1.290.000,00	16.860.000,00		311.252.000,00
IKK Padangan	42.950.000,00	210.000,00	5.760.000,00		48.920.000,00
IKK Kapas	137.160.000,00	800.000,00	9.360.000,00		147.320.000,00
IKK Balen	56.920.000,00	280.000,00	35.030.000,00		93.230.000,00
IKK Sumberejo	58.730.000,00	360.000,00	70.210.000,00		129.300.000,00
IKK Baureno	46.740.000,00	230.000,00	82.270.000,00		129.240.000,00
IKK Kalitidu	25.000.000,00	200.000,00	1.220.000,00		26.420.000,00
IKK Trucuk	50.024.000,00	490.000,00	45.770.000,00		96.284.000,00
IKK Purwosari	38.990.000,00	210.000,00	3.620.000,00		42.820.000,00
IKK Kanor	28.261.000,00	270.000,00	2.100.000,00		30.631.000,00
IKK Sugihwaras	108.770.000,00	410.000,00	62.020.000,00		171.200.000,00
IKK Kedungadem	93.360.000,00	240.000,00	58.990.000,00		152.590.000,00
Total	1.524.585.833,00	7.860.000,00	1.264.589.000,00	291.810.904,00	3.088.845.737,00

Pendapatan Non Air Tahun 2023				
Uraian	Sambungan baru (Rp)	Pendaftaran (Rp)	Denda (Rp)	Total (Rp)
BNA Bojonegoro	2.219.402.167,00	2.860.000,00	510.160.000,00	2.732.422.167,00
IKK Dander	171.098.000,00	1.380.000,00	184.560.000,00	357.038.000,00
IKK Padangan	39.198.000,00	270.000,00	61.330.000,00	100.798.000,00
IKK Kapas	50.580.000,00	430.000,00	74.060.000,00	125.070.000,00
IKK Balen	21.626.000,00	170.000,00	33.460.000,00	55.256.000,00
IKK Sumberejo	60.215.000,00	340.000,00	57.340.000,00	117.895.000,00
IKK Baureno	19.094.000,00	160.000,00	86.080.000,00	105.334.000,00
IKK Kalitidu	2.380.000,00	20.000,00	11.710.000,00	14.110.000,00
IKK Purwosari	18.360.000,00	160.000,00	56.830.000,00	75.350.000,00
IKK Sugihwaras	11.310.000,00	120.000,00	64.970.000,00	76.400.000,00
IKK Kedungadem	9.520.000,00	80.000,00	44.110.000,00	53.710.000,00
Total	2.684.383.167,00	6.330.000,00	1.184.610.000,00	3.875.323.167,00

(4.2). Beban Langsung Usaha 27.892.495.459,00 27.551.269.006,67

Jumlah tersebut merupakan beban langsung usaha tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

- Beban Sumber dan Perpompaan		
- Beban Pegawai	582.488.076,00	448.210.803,00
- Beban Listrik	8.120.430.522,00	7.979.569.281,00
- Beban Pemeliharaan	73.575.300,00	207.372.805,00
- Beban Air Baku	60.103.500,00	60.569.000,00
- Beban Retribusi	1.666.158.228,00	1.658.991.442,00
- Beban Penyusutan	1.948.586.645,99	2.093.897.729,00
Total Beban Sumber & Perpompaan	12.451.342.271,99	12.448.611.060,00

- Beban Pengolahan Air		
- Beban Pegawai	572.424.575,00	519.517.670,00
- Beban Bahan Kimia Tawas	1.520.501.115,00	1.626.742.000,00
- Beban Bahan Kimia Kaporit	1.144.552.800,00	920.028.251,00
- Beban Listrik Pompa	2.613.835.902,00	2.740.745.971,00
- Beban Pemeliharaan	232.692.272,00	165.446.736,00
- Beban Penyusutan	568.269.119,36	713.035.013,00
Total Beban Pengolahan Air	6.652.275.783,36	6.685.515.641,00
- Beban Transmisi dan Distribusi		
- Beban Pegawai	1.937.041.541,00	1.775.226.619,00
- Beban Pemeliharaan	2.638.480.297,00	2.580.335.142,00
- Beban Penyusutan	4.213.355.565,00	4.061.580.544,00
Total Beban Transmisi dan Distribusi	8.788.877.403,00	8.417.142.305,00
Total Beban Langsung Usaha	27.892.495.459,00	27.551.269.006,00

(4.3). Beban Umum dan Administrasi **12.573.311.404,00** **12.436.437.366,46**

Jumlah tersebut merupakan beban umum dan administrasi tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

- Beban Pegawai	7.856.867.521,00	7.499.989.056,00
- Beban Kantor	1.018.269.472,00	1.247.321.509,00
- Beban Hubungan Langganan	235.080.297,00	484.109.660,00
- Beban Pemeliharaan	651.529.850,00	581.473.058,90
- Beban Penyisihan Piutang	189.501.393,50	167.788.771,50
- Beban Penyusutan	495.475.031,00	356.520.952,60
- Beban Penelitian dan Pengembangan	138.710.000,00	84.210.000,00
- Rupa-rupa Beban Umum	1.987.877.839,80	2.015.024.358,00
Total Beban Umum dan Administrasi	12.573.311.404,30	12.436.437.366,00

(4.4). Pendapatan Lain-lain **61.907.635,48** **44.958.792,00**

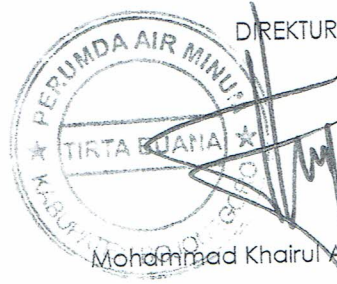
Jumlah tersebut adalah pendapatan lain-lain tahun 2024 dan 2023, merupakan bunga tabungan, giro dan Deposito pada Bank.

- Pendp. Jasa Giro dan Bunga Deposito	61.907.582,00	44.958.792,00
- Pendapatan Lainnya (Pembulatan selisi	53,48	0,00
Total Pendapatan Lain-lain	61.907.635,48	44.958.792,00

4.5). Beban Lain-lain	18.781.094,00	6.091.802,00
Jumlah tersebut adalah merupakan beban lain-lain tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:		
- Beban Bank	7.585.494,00	6.091.802,00
- Beban Pajak kurang bayar	11.195.600,00	0,00
Total Beban Lain-lain	18.781.094,00	6.091.802,00

Laporan Keuangan ini dibuat oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro Per 31 Desember 2024 dan telah disajikan

Mengetahui dan menyetujui



Mohammad Khairul Anwar. ST, MM

Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
For the Year Ended
December 31, 2024*

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen	i - vi	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas	3	<i>statement of changes in equity</i>
Laporan arus kas	4	<i>statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5	<i>Notes to the financial statements</i>
Informasi tambahan		<i>Supplementary information</i>



PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA

BUMD KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. AKBP M. Soeroko No. 04 Bojonegoro 62111, Jawa Timur
Telp. /Fax : +62 353 892 128

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
No. : 026/ADS/II/2025**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
No. : 026/ADS/II/2024**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Mohammad Kundori, M.Sc
Alamat kantor : PT Asri Dharma Sejahtera
Jl. AKBP M. Soeroko No. 04
Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat rumah : Dusun Ngraho, Ngraho,
Gayam, Bojonegoro
Telepon : +62 822 2035 7873
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Arief Adi Wibowo
Alamat kantor : PT Asri Dharma Sejahtera
Jl. AKBP M. Soeroko No. 04
Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat rumah : Jl. Mampang Prapatan III
No. 5, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Telepon : +62 815 5177 344
Jabatan : Direktur

1. Name : Mohammad Kundori, M.Sc
Office address : PT Asri Dharma Sejahtera
Jl. AKBP M. Soeroko No. 04
Bojonegoro, Jawa Timur
Residential address : Dusun Ngraho, Ngraho,
Gayam, Bojonegoro
Telephone : +62 822 2035 7873
Title : President Director
2. Name : Arief Adi Wibowo
Office address : PT Asri Dharma Sejahtera
Jl. AKBP M. Soeroko No. 04
Bojonegoro, Jawa Timur
Residential address : Jl. Mampang Prapatan III
No. 5, Mampang Prapatan,
South Jakarta
Telephone : +62 815 5177 344
Title : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2024;
2. The Company's Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the Company's Financial Statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The Company's Financial Statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Mohammad Kundori, M.Sc.
Direktur Utama / President Director

Arief Adi Wibowo
Direktur / Director

Jakarta,
14 Februari 2025 / February 14, 2025

Laporan Auditor Independen

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025

Pemegang Saham, Komisaris, dan
Direksi
PT Asri Dharma Sejahtera

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asri Dharma Sejahtera ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025

The Shareholders, Commissioner, and
Board of Directors
PT Asri Dharma Sejahtera

Opinion

We have audited the financial statements of PT Asri Dharma Sejahtera ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

ACHSIN HANDOKO TOMO

Kantor Akuntan Publik/Certified Public Accountants. Izin/License No. 45/KM.1/2017
Jl. Sisingamangaraja No. 26, Lantai Dasar - Jakarta Selatan 12110 - Indonesia
Tel : +62 21 720 2605 - Fax : +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025
(lanjutan)

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditors' Report (continued)

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025
(continued)

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025
(lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Independent Auditors' Report (continued)

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025
(continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025
(lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditors' Report (continued)

No. 00003/2.1096/AU.1/02/1795-3/1/II/2025
(continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exist related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6, 14, 15	42.796.988	46.673.556	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	7, 14, 15	4.525.496	4.640.667	Trade receivables
Uang muka dan biaya dibayar di muka		6.387	8.762	Advance and prepaid expenses
Total Aset Lancar		47.328.871	51.322.985	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - neto	10d	2.907	3.409	Deferred tax assets - net
Aset tetap - neto		128.749	143.780	Fixed Assets - net
Investasi di PSC Blok Cepu	8	11.864.677	11.701.928	Investment in Cepu Block PSC
Total Aset Tidak Lancar		11.996.333	11.849.117	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		59.325.204	63.172.102	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Beban akrual	14, 15	23.707	8.680	Accrued expenses
Utang pajak	10a	1.699.048	1.725.932	Tax payables
Total Liabilitas Jangka Pendek		1.722.755	1.734.612	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG-TERM LIABILITY
Liabilitas imbalan kerja - neto	12	13.212	15.495	Employee benefits liability - net
Total Liabilitas Jangka Panjang		13.212	15.495	Total Long-term Liabilities
Total Liabilitas		1.735.967	1.750.107	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Saham kelas A - dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 160.000 saham dengan nilai nominal Rp50 per saham	11	727	727	Class A shares - authorized, issued and fully paid - 160,000 shares at per value of Rp50 per share
Saham kelas B - dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 80.000 saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham	11	727.273	727.273	Class B shares - authorized, issued and fully paid - 80,000 shares at per value of Rp100,000 per share
Selisih nilai kurs transaksi		26.909.759	26.909.759	Difference in exchange rate transaction
Saldo laba		29.950.651	33.783.393	Retained earnings
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	12	827	843	Remeasurement on employee benefits liability
Total Ekuitas		57.589.237	61.421.995	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		59.325.204	63.172.102	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
 KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
 TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
 STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEAR ENDED
 DECEMBER 31, 2024
 (Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2024	2023	
PENGHASILAN DARI PSC	8	42.312.468	48.390.601	INCOME FROM PSC
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	9c, 16	114.590	109.579	Selling expenses
Beban umum dan administrasi		245.861	228.546	General and administrative expenses
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	13	637.578	1.671.490	Corporate social responsibility expenses
Gaji dan upah		149.401	165.624	Salaries and wages
Total Beban usaha		1.147.430	2.175.239	Total Operating Expenses
LABA USAHA		41.165.038	46.215.362	OPERATING INCOME
PENGHASILAN LAIN-LAIN				OTHER INCOME
Pendapatan bunga		1.085.292	1.055.551	Interest income
Beban keuangan		(347)	(1.102)	Financing charges
Beban lain-lain - neto		(358.869)	(865.977)	Other charges - net
Total Penghasilan Lain-lain - Neto		726.076	188.472	Total Other Income - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		41.891.114	46.403.834	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10b			INCOME TAX EXPENSE
Kini		(15.284.474)	(17.386.220)	Current
Tangguhan		(507)	1.666	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan		(15.284.981)	(17.384.554)	Total Income Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		26.606.133	29.019.280	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto	12	(21)	(26)	Remeasurement of the net defined benefit liability
Pajak penghasilan terkait	12, 10d	5	6	Related income tax
RUGI KOMPREHENSIF LAIN NETO		(16)	(20)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		26.606.117	29.019.260	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2024
 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
 STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
 (Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham Kelas A/ Class A Share Capital	Modal Saham Kelas B/ Class B Share Capital	Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja/ Remeasurement on Employee Benefits Liability	Selisih Nilai Kurs Transaksi/ Different in Exchange Rate Transaction	Saldo Laba/Retained Earnings Belum Ditetapkan Penggunaanya/ Unappropriated	Jumlah/ Total	
Saldo 31 Desember 2022	727	727.273	863	26.909.759	42.236.546	70.020.768	December 31, 2022
Alokasi cadangan umum	-	-	-	-	436.800	-	General reserve allocation
Dividen	-	-	-	-	(37.618.033)	(37.618.033)	Dividend
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	29.019.280	29.019.280	Net income for the year
Rugi komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(20)	-	-	(20)	Other comprehensive loss that will not be reclassified to profit or loss
Saldo 31 Desember 2023	727	727.273	843	26.909.759	33.200.993	61.421.995	Balance as of December 31, 2023
Dividen	-	-	-	-	(30.438.875)	(30.438.875)	Dividend
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	26.606.133	26.606.133	Net income for the year
Rugi komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(16)	-	-	(16)	Other comprehensive loss that will not be reclassified to profit or loss
Saldo 31 Desember 2024	727	727.273	827	26.909.759	29.368.251	57.589.237	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak penghasilan		41.891.114	46.403.834	Income before income tax
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi:				Adjustment to reconcile income before income tax to net cash provided by operating activities:
Penyusutan		18.070	15.815	Depreciation
Beban imbalan kerja karyawan	12	8.510	7.715	Employee benefits expense
Perubahan-perubahan dalam aset dan liabilitas usaha:				changes in operating assets and liabilities:
Piutang usaha		115.171	1.376.546	Trade receivable
Uang muka dan biaya dibayar di muka		2.375	(7.494)	Advances and prepaid expenses
Beban akrual		15.027	(19.527)	Accrued expenses
Pembayaran pajak penghasilan badan		(15.311.358)	(17.985.891)	Payment of corporate income tax
Pembayaran imbalan kerja	12	(10.814)	(140)	Payment of employee benefits expense
Kas Neto Diperoleh dari Aktiva Operasi		26.728.095	29.790.858	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap		(3.039)	(28.808)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran permintaan dana kepada Mobil Cepu Ltd.	8	(12.032.693)	(8.771.761)	Payment of cash calls to Mobil Capu Ltd.
Pengembalian investasi dan pengembalian biaya operasi	8	11.869.944	9.755.011	Return on investment and cost recovery
Kas Neto Diperoleh (Digunakan Untuk) dari Aktivitas Investasi		(165.788)	954.442	Net Cash Flows Provided by (Used In) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Dividen	18	(30.438.875)	(37.618.033)	Repayment of Dividend
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(30.438.875)	(37.618.033)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(3.876.568)	(6.872.733)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS AWAL TAHUN		46.673.556	53.546.289	CASH AT BEGINNING OF YEAR
KAS AKHIR TAHUN	6	42.796.988	46.673.556	CASH AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Asri Dharma Sejahtera ("Perusahaan" atau "ADS") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 484 Yatiman Hadisuparno, S.H., Notaris di Bojonegoro, tertanggal 11 Juli 2002. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-23179.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 22 November 2002.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris No. 11 yang dibuat oleh Iin Eka Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Bojonegoro, tertanggal 25 September 2022 mengenai perubahan Direksi Perusahaan. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.09-0060815 tertanggal 30 September 2022.

Perusahaan didirikan untuk memiliki hak partisipasi dalam blok minyak dan gas.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. AKBPN Soeroko No. 5-7, Kepatihan, Bojonegoro, Jawa Timur.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	- *)
Komisaris	Muhammad Zulkarnain
Direksi	
Direktur Utama	Mohammad Kundori, M.Sc.
Direktur	Arief Adi Wibowo

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 2 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Ibu Ifa Khoirianingrum dan Bapak Muhammad Zulkarnain sebagai Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali Bapak Muhammad Zulkarnain sebagai anggota Dewan Komisaris Tunggal hingga anggota Dewan Komisaris perwakilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diputuskan dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, belum ada RUPS kembali.

1. GENERAL

a. Company's Establishment

PT Asri Dharma Sejahtera (the "Company" or "ADS") was established based on Notarial Deed No. 484 of Yatiman Hadisuparno, S.H., Notary in Bojonegoro, dated July 11, 2002. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C-23179.HT.01.04.TH.2002 dated November 22, 2002.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 11 of Iin Eka Lestari, S.H., M.Kn., Notary in Bojonegoro, dated September 25, 2022, concerning the changes of the Company's Board of Directors. The deed was reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Acceptance Letter No. AHUAH. 01.09-0060815 dated September 30, 2022.

The Company was established to hold the participating interests in oil and gas blocks.

The Company's head office is located at Jl. AKBPN Soeroko No. 5-7, Kepatihan, Bojonegoro, East Java.

b. Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	- *)	Ifa Khoirianingrum	President Commissioner
Komisaris	Muhammad Zulkarnain	Muhammad Zulkarnain	Commissioner
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Mohammad Kundori, M.Sc.	Mohammad Kundori, M.Sc.	President Director
Direktur	Arief Adi Wibowo	Arief Adi Wibowo	Director

*) Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated August 2, 2024 regarding the dismissal and appointment of the Company's Board of Commissioners in connection with the expiration of the term of office of Mrs. Ifa Khoirianingrum and Mr. Muhammad Zulkarnain as the Board of Commissioners and the reappointment of Mr. Muhammad Zulkarnain as the sole member of the Board of Commissioners until the member of the Board of Commissioners representing the Bojonegoro Regency Government is decided and appointed at the next General Meeting of Shareholders (GMS). As of the issuance of this report, there has been no subsequent GMS.

1. UMUM (Lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Notaris Iin Eka Lestari, S.H., M.Kn., No. 22 tanggal 30 Agustus 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Notaris Iin Eka Lestari, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 2 Maret 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mempunyai karyawan tetap 8 (delapan) (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2025.

2. PERJANJIAN BAGI HASIL DAN OPERASI BERSAMA

Pada tanggal 17 September 2005, Ampolex (Cepu) Pte., Ltd. (Ampolex), Mobil Cepu Ltd. (MCL) dan PT Pertamina EP Cepu (Pertamina Cepu), mengadakan Kontrak Bagi Hasil Blok Cepu (PSC atau PSC Blok Cepu) dengan Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) - sebelumnya Badan Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS), badan pengatur minyak dan gas hulu Indonesia. PSC memiliki jangka waktu 30-tahun dan dijadwalkan akan berakhir pada 16 September 2035 (jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku). Pada saat awal PSC ditandatangani, Ampolex (24,5%) dan MCL (25,5%) secara bersama-sama memiliki 50% hak partisipasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan bagi hasil yang menetapkan pembagian laba yang berbeda-beda sesuai dengan harga minyak mentah. Sisa 50% hak partisipasi yang lain dimiliki oleh Pertamina Cepu.

Pada tanggal 15 Maret 2006, Ampolex, MCL dan Pertamina Cepu mengadakan Perjanjian Operasi Bersama (JOA) untuk PSC Blok Cepu untuk melaksanakan operasi-operasi minyak dan gas dengan MCL sebagai operator.

Pada tanggal 22 Februari 2008 Ampolex, MCL dan Pertamina Cepu mengadakan perjanjian pengalihan untuk tujuan memfasilitasi penjualan dan pengalihan 10% hak partisipasi kepada Perusahaan, PT Petro Gas Jatim Utama Cendana, PT Blora Patragas Hulu dan PT Sarana Patra Hulu Cepu, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Perusahaan Pemerintah Lokal (LGCs), sebagaimana disyaratkan berdasarkan PSC.

1. GENERAL (Continued)

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 based on Notarial Deed No. 22 of Iin Eka Lestari, S.H., M.Kn., dated August 30, 2024.

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 based on Notarial Deed No. 1 of Iin Eka Lestari, S.H., M.Kn., dated March 2, 2023.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company had 8 (eight) permanent employees (unaudited).

c. Completion of the Financial Statements

The management of the Company is responsible of the preparation of these financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on February 14, 2025.

2. PRODUCTION SHARING AGREEMENT AND JOINT OPERATIONS

On September 17, 2005, Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., (Ampolex), Mobil Cepu Ltd. (MCL) and PT Pertamina EP Cepu (Pertamina Cepu), entered into the Cepu Block Production Sharing Contract (the PSC or the Cepu Block PSC) with the Government of Indonesia, represented by the Special Working Unit on Upstream Oil and Gas Activities/Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) - formerly Upstream Oil and Gas Activities Agency (BP Migas), the Indonesian upstream oil and gas regulatory body. The PSC has a 30-year term and is scheduled to expire on September 16, 2035 (the term may be extended in accordance with the applicable regulations). When the PSC was originally signed, Ampolex (24.5%) and MCL (25.5%) collectively held a 50% participating interest, under production sharing terms that provided a profit split which varies in accordance with the crude oil price. The remaining 50% participating interest was held by Pertamina Cepu.

On March 15, 2006, Ampolex, MCL and Pertamina Cepu entered into a Joint Operating Agreement (JOA) for the Cepu Block PSC to conduct oil and gas operations with MCL as the operator.

On February 22, 2008, Ampolex, MCL and Pertamina Cepu entered into an assignment agreement for the purpose of facilitating the sale and assignment of the 10% participating interest to the Company, PT Petro Gas Jatim Utama Cendana, PT Blora Patragas Hulu and PT Sarana Patra Hulu Cepu, collectively referred to as Local Government Companies (LGCs), as required under the PSC.

2. PERJANJIAN BAGI HASIL DAN OPERASI
BERSAMA (Lanjutan)

Perusahaan-perusahaan ini ditunjuk oleh pemerintah daerah (pemerintah Bojonegoro, pemerintah Jawa Timur, pemerintah Blora dan pemerintah Jawa Tengah) untuk memiliki hak partisipasi, termasuk Perusahaan, yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemda).

Pada tanggal 2 Februari 2006, LGCs mengadakan Perjanjian Kerjasama (BKS) yang dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu mengenai kerjasama dan pengelolaan 10% hak partisipasi, yang akan dikelola seolah-olah keseluruhan 10% hak partisipasi LGCs dimiliki oleh satu individual LGC. Pada tanggal 30 Oktober 2008, dua dari empat LGC (PT Blora Patragas Hulu dan PT Sarana Patra Hulu Cepu) memperoleh hak partisipasi di PSC Blok Cepu. Pada tanggal 26 Februari 2009, dua LGC yang lain (Perusahaan dan PT Petro Gas Jatim Utama Cendana) memperoleh hak partisipasi di PSC Blok Cepu. Secara keseluruhan, 5% dari 10% hak partisipasi dialihkan ke LGCs dari Pertamina Cepu dan 5% yang lain dari MCL. Dengan demikian, hak partisipasi di bawah PSC adalah sebagai berikut:

PT Pertamina EP Cepu	45.0000%
Ampolex (Cepu) Pte., Ltd.	24.5000%
Mobil Cepu Ltd.	20.5000%
PT Asri Dharma Sejahtera	4.4847%
PT Petro Gas Jatim Utama Cendana	2.2423%
PT Blora Patragas Hulu	2.1820%
PT Sarana Patra Hulu Cepu	1.0910%

LGCs yang memiliki hak partisipasi di PSC juga telah menjadi para pihak dalam JOA sejak 5 Februari 2009.

Ampolex, MCL, Pertamina Cepu dan LGCs secara bersama-sama disebut sebagai "Para Kontraktor" berdasarkan PSC.

Sesuai dengan Pasal 19 JOA, biaya-biaya tahun sebelumnya, yang merupakan biaya operasi yang dikeluarkan oleh MCL dan Ampolex pada operasi-operasi Blok Cepu berdasarkan Kontrak Bantuan Teknis Blok Cepu (TAC) antara PT Pertamina (Persero), MCL dan Ampolex, yang berakhir pada 16 September 2005, diperlakukan sebagai bagian dari biaya yang dapat diperoleh kembali, dimana MCL dan Ampolex akan memiliki prioritas atas semua pihak JOA lain untuk pengembalian biaya-biaya tahun sebelumnya ini.

2. PRODUCTION SHARING AGREEMENT AND
JOINT OPERATIONS (Continued)

Those companies were appointed by the local governments (government of Bojonegoro, government of East Java, government of Blora and government of Central Java) to hold a participating interest, including the Company, which was appointed by the Government of Bojonegoro Regency (Pemda).

On February 2, 2006, the LGCs entered into a Cooperation Agreement (BKS) intended to set forth certain conditions on the mutual cooperation and management of the 10% participating interest, which would be managed as if the entire 10% of the LGCs participating interest was held by an individual LGC. On October 30, 2008, two of the four LGCs (PT Blora Patragas Hulu and PT Sarana Patra Hulu Cepu) acquired a participating interest in the Cepu Block PSC. On February 26, 2009, the remaining two LGCs (the Company and PT Petro Gas Jatim Utama Cendana) acquired a participating interest in the Cepu Block PSC. In total, 5% of the 10% participating interest assigned to the LGCs was from Pertamina Cepu and the other 5% was from MCL. Therefore, the participating interests under the PSC were as follows:

PT Pertamina EP Cepu
Ampolex (Cepu) Pte. Ltd.
Mobil Cepu Ltd.
PT Asri Dharma Sejahtera
PT Petro Gas Jatim Utama Cendana
PT Blora Patragas Hulu
PT Sarana Patra Hulu Cepu

The LGCs that had participating interests in the PSC have also become parties to the JOA since February 5, 2009.

Ampolex, MCL, Pertamina Cepu and the LGCs are collectively referred to as the "Contractors" under the PSC.

In accordance with Article 19 of the JOA, prior year costs, which represent operating costs incurred by MCL and Ampolex on the Cepu Block's operations under the Cepu Block Technical Assistance Contract (TAC) between PT Pertamina (Persero), MCL and Ampolex, which was terminated on September 16, 2005, are treated as part of recoverable costs, whereas MCL and Ampolex shall have priority over all other JOA parties for the recovery of these prior year costs.

2. PERJANJIAN BAGI HASIL DAN OPERASI
BERSAMA (Lanjutan)

Penyelesaian biaya-biaya tahun sebelumnya akan dilakukan oleh MCL dan Ampolex, yang mencapai hingga 50% dari total *lifting* minyak mentah dan gas alam masing-masing tahun, setelah pemotongan Minyak Tahap Pertama (FTP) (lihat Catatan 2b dan 2g).

PSC Blok Cepu memulai produksi minyak komersial pada 31 Agustus 2009.

a. Wilayah Kerja

Wilayah kerja PSC merupakan wilayah yang ditunjuk yang didalamnya Para Kontraktor dapat melaksanakan operasi-operasi minyak mentah dan gas. Wilayah kerja menunjukkan wilayah-wilayah di Madang Alas Dara, Kemuning, dan Banyu Urip, Cepu, Jawa Tengah.

b. Bagi Hasil Minyak Mentah dan Gas

Bagian ekuitas (laba) para Kontraktor dan Pemerintah atas produksi minyak mentah ditentukan berdasarkan harga minyak rata-rata tertimbang tahunan selama masing-masing tahun sebagai berikut:

Harga Rata-rata Tertimbang Tahunan Minyak Mentah Selama Masing-masing Tahun/ <i>Crude Oil Annual Weighted Average Price during the Respective Year</i>	
Lebih Besar dari atau Setara dengan/ <i>Greater than or Equal to</i> (USD/bbl)	Kurang dari/ <i>Less than</i> (USD/bbl)
-	35
35	40
40	45
45	-

Bagian ekuitas (laba) para Kontraktor dan Pemerintah dari produksi gas sebelum pajak adalah masing-masing 62,50% dan 37,50%.

Ekuitas produksi minyak mentah dan gas ditentukan setiap tahun dan menunjukkan total *lifting* produksi minyak dan gas dalam masing-masing tahun yang berakhir pada 31 Desember, setelah dikurangi Kredit Investasi, FTP dan pengembalian biaya operasi (Catatan 2g).

Perusahaan dikenai pajak atas penghasilan kena pajak dari operasi-operasi PSC-nya berdasarkan bagiannya atas ekuitas produksi minyak dan gas, dikurangi bonus, pada nilai gabungan sebesar 44%, yang terdiri dari pajak penghasilan Perusahaan dengan tarif 30% dan pajak dividen dengan tarif 20%.

2. PRODUCTION SHARING AGREEMENT AND
JOINT OPERATIONS (Continued)

Settlement or prior year costs is to be effected by MCL and Ampolex, lifting up to 50% of the total liftings of crude oil and natural gas each year, after deducting the First Tranche Petroleum (FTP) (see Note 2b and 2g).

The Cepu Block PSC commenced commercial oil production on August 31, 2009.

a. Working Area

The PSC working area is a designated area in which the Contractors may conduct crude oil and gas operations. The working area represents areas in Madang Alas Dara, Kemuning, and Banyu Urip, Cepu, Central Java.

b. Crude Oil and Gas production Sharing

The Contractors' and the Government's share of equity (profit) on crude oil production is determined based on the annual weighted average oil price during the respective year as follows:

SKK MIGAS yang Mewakili Pemerintah (Sebelum pajak)/ SKK MIGAS Representing the Government (Before Tax)	Para Kontraktor (Sebelum pajak)/ Contractors (Before tax)
46.4286%	53.5714%
55.3572%	44.6428%
64.2858%	35.7142%
73.2143%	26.7857%

The Contractors' and the Government's share of equity (profit) on gas production before tax is 62.50% and 37.50%, respectively.

Equity on crude oil and gas production is determined annually and represents the total lifting of oil and gas production in each year ended December 31, net of investment credit, FTP and cost recovery (Note 2g).

The Company is subject to tax on taxable income from its PSC operations based on its share of equity oil and gas production, less bonuses, at a combined rate of 44%, comprising of corporate income tax at the rate of 30% and dividend tax at the rate of 20%.

2. PERJANJIAN BAGI HASIL DAN OPERASI
BERSAMA (Lanjutan)

c. Pengembalian Biaya Operasi

Pengembalian biaya operasi tahunan terdiri dari:

- i. Biaya non-modal tahun berjalan;
- ii. Amortisasi biaya modal tahun berjalan; dan
- iii. Biaya operasi tahun sebelumnya yang belum dikembalikan.

d. Kredit Investasi

Para Kontraktor berhak atas kredit investasi (hak atas pengembalian biaya operasi tambahan) hingga maksimum 15,78% dari investasi modal langsung yang diperlukan untuk mengembangkan fasilitas produksi minyak mentah dan gas alam, dengan persetujuan dari SKK MIGAS.

e. Harga-harga Minyak Mentah dan Gas Alam

Produksi minyak mentah para Kontraktor PSC dihargai pada Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP). Gas alam yang dikirim kepada para pihak ketiga dan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dinilai berdasarkan harga-harga yang ditetapkan dalam masing-masing kontrak penjualan dan pembelian gas.

f. Kewajiban Pasar Domesik (DMO)

Para Kontraktor disyaratkan untuk memasok pasar domestik di Indonesia dengan perhitungan tahunan berikut:

- i. Kalikan jumlah total minyak mentah yang dihasilkan dari wilayah kontrak dengan pembilang yang merupakan total jumlah minyak mentah domestik yang akan dipasok dan penyebut yang merupakan keseluruhan produksi minyak mentah Indonesia dari semua perusahaan minyak.
- ii. Hitung 25% dari jumlah kuantitas minyak mentah yang diproduksi dari wilayah kontrak.
- iii. Kalikan hasil yang lebih rendah dari (i) atau (ii) dengan persentase hasil hak para kontraktor (lihat Catatan 2b).

Harga minyak mentah DMO adalah Rata-rata Tertimbang semua jenis minyak mentah yang dijual oleh para Kontraktor atau harga yang ditentukan oleh kontrak.

2. PRODUCTION SHARING AGREEMENT AND
JOINT OPERATIONS (Continued)

c. Cost Recovery

Annual cost recovery comprises:

- i. Current year's non-capital costs;
- ii. Current year's amortization of capital costs; and
- iii. Unrecovered previous years' operating costs.

d. Investment Credit

The Contractors are entitled to an investment credit (entitlement to additional cost recovery) up to a maximum of 15.78% from the direct capital investments required to develop crude oil and natural gas production facilities, with the approval of SKK MIGAS.

e. Crude Oil and Natural Gas Prices

The PSC Contractors' crude oil production is priced at Indonesian Crude Prices (ICP). Natural gas delivered to third parties and related parties is valued based on the prices stipulated in the respective gas sales and purchase contracts.

f. Domestic Market Obligation (DMO)

The Contractors are required to supply the domestic market in Indonesia with the following annual calculations:

- i. Multiply the total quantity crude oil produced from the contract area by a fraction the numerator of which is the total domestic quantity of crude oil to be supplied and the denominator is the entire Indonesian production of crude oil of all petroleum companies.
- ii. Compute 25% of the total quantity of crude oil produced from the contract area.
- iii. Multiply the lower result of (i) or (ii) by the resultant percentage of contractors' entitlement (see Note 2b).

The price of the DMO crude oil is the Weighted Average of all types of crude oil sold by the Contractors or other price determined by the contract.

2. PERJANJIAN BAGI HASIL DAN OPERASI
BERSAMA (*Lanjutan*)

g. Minyak Tahap Pertama

Pemerintah dan para Kontraktor secara bersama-sama berhak untuk menerima jumlah setara dengan 20% dari total produksi minyak dan gas setiap tahun, sebelum pengurangan untuk pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP dibagi antara Pemerintah dan para Kontraktor sesuai dengan hak atas produksi yang ditetapkan pada Catatan 2b.

h. Kepemilikan Barang Persediaan dan Aset Tetap

Semua persediaan dan aset tetap ketika mendarat di Indonesia menjadi harta kekayaan pemerintah Indonesia dan/atau SKK MIGAS yang mengurus kegiatan bisnis hulu. Para Kontraktor memiliki hak penggunaan eksklusif harta kekayaan tersebut selama jangka waktu PSC. Jika para kontraktor tidak mencapai tahap produksi, persediaan dan aset tetap dapat dijual oleh para kontraktor ke operasi minyak dan gas lain di Indonesia. Penjualan ini bersifat bersyarat dengan atas persetujuan dari SKK MIGAS dan atau pemerintah Indonesia.

3. PERJANJIAN KERJASAMA

Pada tanggal 5 Juni 2005, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT Surya Energi Raya (SER), sehubungan dengan komitmen oleh SER untuk memberikan pembiayaan agar Perusahaan dapat menjamin hak partisipasi di PSC Blok Cepu. Perjanjian ini terakhir diubah pada tanggal 27 November 2007, setelah partisipasi LGC lain di PSC Blok Cepu.

Pada tanggal 29 Januari 2009, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, SER telah mengatur pembayaran sebesar USD10.314.810 sehubungan dengan pengalihan 4,4847% hak partisipasi dari Ampolex, MCL, dan Pertamina Cepu kepada Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Penyertaan Saham dengan Pemda, I Nyoman Sudana dan SER. Berdasarkan perjanjian, SER dan Pemda sepakat untuk menempatkan saham baru Perusahaan, yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, dan I Nyoman Sudana sepakat untuk mengalihkan semua kepemilikan sahamnya di Perusahaan kepada Pemda. 19.990 saham yang ada dimiliki oleh Pemda dan sepuluh saham yang sebelumnya dimiliki oleh I Nyoman Sudana, yang dialihkan kepada Pemda pada tanggal 22 Juni 2009, menjadi saham Kelas B.

2. PRODUCTION SHARING AGREEMENT AND
JOINT OPERATIONS (*Continued*)

g. First Tranche Petroleum

The Government and the Contractors are collectively entitled to receive an amount equal to 20% of the total production of oil and gas each year, before any deduction for recovery of operating costs and investment credit. FTP is shared between the Government and the Contractors in accordance with the entitlements to production described in Note 2b.

h. Ownership of Inventories and Fixed Assets

All inventories and fixed assets, when landed in Indonesia, become the property of the Government of Indonesia and/or SKK MIGAS, which have oversight over upstream business activities. The Contractors have exclusive use of such property during the PSC term. If the Contractors do not reach the production stage, the inventories and fixed assets may be sold by the Contractors to another oil and gas operation in Indonesia. Such a sale is contingent upon approval from SKK MIGAS and/or the Government of Indonesia.

3. COOPERATION AGREEMENT

On June 5, 2005, the Company entered into a Cooperation Agreement with PT Surya Energi Raya (SER), in relation to the commitment by SER to provide financing to allow the Company to secure a participating interest in the Cepu Block PSC. This agreement was later amended on November 27, 2007, after the participation of other LGCs in the Cepu Block PSC.

On January 29, 2009 pursuant to the Cooperation Agreement, SER has arranged for a payment of USD10,314,810 in relation to the assignment of the 4.4847% participating interest from Ampolex, MCL, and Pertamina Cepu to the Company.

On March 31, 2009, the Company entered into a Share Subscription Agreement with Pemda, I Nyoman Sudana and SER. Under the agreement, SER and Pemda agreed to subscribe for the new shares of the Company, which were classified into several classes, and I Nyoman Sudana agreed to transfer all his shareholding in the Company to Pemda. The existing 19,990 shares held by Pemda and the ten shares previously held by I Nyoman Sudana, which were transferred to Pemda on June 22, 2009, became Class B shares.

3. PERJANJIAN KERJASAMA (Lanjutan)

USD10.314.810 yang sebelumnya dibayar oleh SER digunakan untuk memperoleh saham baru Perusahaan dengan 160.000 saham Kelas A (setara dengan USD727) yang diberikan oleh SER kepada Pemda, dan 60.000 saham Kelas B (setara dengan USD545.455) serta 8.523 saham Kelas C (setara dengan USD9.769.126) yang ditempatkan oleh SER. SER akan menempatkan saham Kelas C lebih lanjut dari waktu ke waktu untuk total harga penyertaan sebesar USD30.685.190. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris No. 5 M. Nova Faisal S. H., M. Kn. tertanggal 25 Juni 2010, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-17846 tertanggal 14 Juli 2010, SER meningkatkan kepemilikan dalam saham Kelas C menjadi 28.643 saham, dan berdasarkan Akta Notaris No. 31 M. Nova Faisal S.H., M.Kn. tertanggal 15 Februari 2012, yang diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusan No. AHU-AH.01.10-09096 tertanggal 15 Maret 2012, SER meningkatkan kepemilikannya dalam saham Kelas C menjadi 30.511 saham.

Pada tanggal 10 Januari 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan juga diadakan dengan hasil sebagai berikut:

- Perubahan nilai nominal saham Kelas C dari Rp12.608.282 menjadi Rp26.000.000.
- Peningkatan jumlah saham dasar Kelas C dari 35.294 saham (USD40.454.246) menjadi 52.434 saham (USD119.555.631).
- Peningkatan saham Ditempatkan dan Dibayar Penuh Kelas C dari 30.511 saham (USD34.971.936) menjadi 52.434 saham (USD119.555.631) melalui konversi penyertaan saham di muka Perusahaan.

Perubahan tersebut telah diaktakan dalam Akta Notaris No. 298 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tertanggal 31 Januari 2017. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0004816.AH.01.02.TAHUN2017 tertanggal 24 Februari 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Nomor 28 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Para Pemegang Saham menyetujui penarikan kembali seluruh saham Kelas C yang dimiliki oleh SER.

3. COOPERATION AGREEMENT (Continued)

The USD10,314,810 previously paid by SER was used to procure the new shares of the Company with the 160,000 Class A shares (equivalent to USD727) granted by SER to Pemda, and the 60,000 Class B shares (equivalent to USD545,455) as well as 8,523 Class C shares (equivalent to USD9,769,126) subscribed by SER. SER shall subscribe for further Class C shares from time to time for a total subscription price amounting to USD30,685,190. Subsequently, based on Notarial Deed No. 5 of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. dated June 25, 2010, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.10-17846 dated July 14, 2010, SER increased its ownership in Class C shares to 28,643 shares, and based on Notarial Deed No. 31 of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. dated February 15, 2012, which was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.10-09096 dated March 15, 2012, SER increased its ownership in Class C shares to 30,511 shares.

On January 10, 2017, an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was also held with the following results:

- Change in the par value of Class C shares from Rp12,608,282 to Rp26,000,000.
- Increase in the Authorized Class C shares from 35,294 shares (USD40,454,246) to 52,434 shares (USD119,555,631).
- Increase in the Issued and Fully Paid Class C shares from 30,511 shares (USD34,971,936) to 52,434 shares (USD119,555,631) through the conversion of the Company's advance share subscriptions.

The changes have been covered by Notarial Deed No. 298 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, dated January 31, 2017. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0004816.AH.01.02.TAHUN2017 dated February 24, 2017.

Based on Notarial Deed No.28 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dated August 5, 2020 regarding Statement of Meeting Decisions Amendments to the Company's Articles of Association, The Shareholders agreed the redeem of all Class C shares owned by SER.

3. PERJANJIAN KERJASAMA (Lanjutan)

Sehubungan dengan Perjanjian Penyertaan Saham, Pemda dan SER juga mengadakan perjanjian pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2009. Sesuai dengan perjanjian pemegang saham, SER harus memberikan kontribusi keuangan untuk menyertakan saham di Perusahaan untuk menjamin dan memelihara hak partisipasi di PSC Blok Cepu. Sebagai gantinya, kedua belah pihak telah sepakat bahwa penghasilan Perusahaan dari hak partisipasinya di PSC Blok Cepu setelah pemotongan: (i) semua kewajiban pembayaran kepada Pemerintah (termasuk pajak), (ii) biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan (termasuk biaya profesional), dan (iii) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh SER untuk manfaat Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Laporan Keuangan Perusahaan hingga penyertaan saham Perusahaan oleh SER, akan dibagikan dalam urutan berikut:

- Pertama, Perusahaan akan membayar dividen preferensial kepada para pemegang saham Kelas C diatas prioritas kepada para pemegang saham Kelas B, dengan jumlah yang disetujui oleh Dewan Direksi, asalkan bahwa nilai tersebut tidak lebih rendah dari penjumlahan Biaya Dana dan 8% per tahun;
- Kedua, Perusahaan akan menebus jumlah maksimum yang mungkin saham Kelas C pada nilai nominal masing-masing saham Kelas C di luar penghasilan yang ada, dan melakukan pengurangan modal dengan mengurangi jumlah saham Kelas C dengan jumlah saham Kelas C yang ditebus kembali; dan
- Ketiga, setelah penebusan semua saham Kelas C, Perusahaan akan membagikan penghasilan ke pemegang saham Kelas B.

Lihat Catatan 11 untuk klasifikasi saham.

Perjanjian pemegang saham juga menetapkan bahwa SER harus membayar bonus penandatanganan sebesar USD100.000 kepada Pemda. USD100.000 dibayar oleh SER kepada Pemda pada tahun 2009. SER juga berkomitmen untuk memberikan sebesar USD 50.000 kepada Pemda setiap tahun jika Pemda masih belum menerima laba dan produksi sesuai dengan harapan. Juga disepakati bahwa Perusahaan harus dikelola oleh Direksi yang terdiri dari maksimum tiga Direktur dan diawasi oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari tiga Komisaris.

3. COOPERATION AGREEMENT (Continued)

In connection with the Share Subscription Agreement, Pemda and SER also entered into a shareholders' agreement on March 31, 2009. In accordance with the shareholders' agreement, SER has to provide financial contribution by subscribing for shares in the Company so as to secure and maintain the participating interest in the Cepu Block PSC. In exchange, both parties have agreed that the Company's income from its participating interest in the Cepu Block PSC after the deduction of: (i) all payment obligations to Government (including tax), (ii) expenses incurred by the Company (including professional fees), and (iii) all costs that have been incurred by SER for the benefit of the Company as stipulated in the Company's Financial Reports up to the subscription of the Company's shares by SER, will be distributed in the following order:

- Firstly, the Company shall pay preferential dividends to the holders of Class C shares in priority to the holders of the Class B shares, at the amount approved by the Board of Directors, provided that the rate should not be lower than the sum of the Cost of Funds and 8% per annum;
- Secondly, the Company shall redeem the maximum possible number of Class C shares at the nominal value of each Class C share out of the remaining income, and carry out capital reduction by reducing such number of Class C shares by the number of Class C shares redeemed; and
- Thirdly, after the redemption of all Class C shares, the Company shall distribute the income to the Class B shareholders.

Refer to the Note 11 for the classification of shares.

The shareholders' agreement also stipulates that SER has to pay a signing bonus of USD100,000 to Pemda. The USD100,000 was paid by SER to Pemda in 2009. SER also commits to grant the amount of USD 50,000 to Pemda annually in the event that Pemda still has not received profit and the production is in line with the expectation. It was also agreed that the Company shall be managed by the Directors consisting of maximum three Directors and supervised by the Board of Commissioners consisting of three Commissioners.

3. PERJANJIAN KERJASAMA (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Anik Farida Agustini, S.H., M.Kn., M.H. Nomor 5 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Para Pemegang Saham menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Perusahaan setelah penarikan seluruh saham Kelas C. Sehingga Direksi terdiri dari dua Direktur dan Dewan Komisaris terdiri dari dua Komisaris dengan jangka waktu empat tahun.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2024.

Pada bulan Desember 2023, DSAK-IAI mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 3 dan 4). Perubahan ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

3. COOPERATION AGREEMENT (Continued)

Based on Notarial Deed No.5 of Anik Farida Agustini, S.H., M.Kn., M.H. dated March 10, 2022 regarding Statement of Meeting Decisions Amendments to the Company's Articles of Association, The Shareholders agreed the amendments to Article 11 paragraph 1 and Article 14 paragraphs 1 and 3 of the Company's Articles of Association after the withdrawal of all Class C shares. Therefore, the Board of Directors consists of two Directors and the Board of Commissioners consists of two Commissioners with a term of four years.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Financial Statements and Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI).

The accounting policies applied are consistent with the financial statements for the year ended December 31, 2023, which conform to Indonesian Financial Accounting Standards, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2024.

In December 2023, DSAK-IAI issued changes to the numbering of Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) in Indonesian Financial Accounting Standards. The change is to distinguish the numbering of SFAS' and IFAS' that refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 1 and 2) and do not refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 3 and 4). This change will be effective on January 1, 2024.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the bases described in the related accounting policies.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya, maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar AS. Berdasarkan PSAK No. 221, jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian dengan menggunakan prosedur yang sama dengan penjabaran kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian.

(1) Pengaruh perubahan kurs mata uang selain mata uang fungsional

Transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba dan rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

The statement of cash flows are prepared using the indirect method, and classified into operating, investing and financing activities.

Items in other comprehensive income are presented between accounts that can be reclassified to profit or loss and accounts that will not be reclassified to profit or loss.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is United States of America (USD), which is also the functional currency of the Company.

When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statements of financial position at the beginning of comparative period are presented.

b. Foreign Currency Transactions and Balances

The functional currency of the Company is USD. Based on SFAS No. 221, if the presentation currency differs from the entity's functional currency, it translates its results and financial position into the presentation currency using the same procedures for translating a foreign operation into a presentation currency.

(1) The effect of exchange rates of the currencies other than the functional currency

Transactions in currencies other than the functional currency are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to the functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. The gains or losses resulting from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current year profit or loss.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

- (2) Translasi laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian selain mata uang fungsional

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan dalam mata uang Rupiah, aset dan liabilitas Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan tersebut, sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selisih kurs yang terjadi diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan".

Kurs penutup dan kurs rata-rata Bank Indonesia yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Kurs Penutup			Closing rate
1 Dolar AS/Rupiah	16.162.00	15.416.00	US Dollar 1/Rupiah
Kurs Rata-rata			Average rate
1 Dolar AS/Rupiah	15.905.83	15.218.75	US Dollar 1/Rupiah

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas tunai dan bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang yang dapat diterima dari pelanggan untuk penjualan minyak dan gas di dalam kegiatan usahanya secara umum. Apabila penagihan diperkirakan terjadi dalam waktu satu tahun atau kurang (atau di dalam siklus usahanya secara umum apabila lebih panjang), piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Apabila tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui berdasarkan nilai wajar dan selanjutnya diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, apabila dampak diskonto bersifat signifikan, dikurangi provisi penurunan nilai.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

- (2) Translation of financial statements into a presentation currency other than the functional currency

For the purpose of financial statements presentation in Rupiah currency, assets and liabilities of the Company at the statement of financial position date are translated into Rupiah using the exchange rates at the statement date, while income and expenses are translated at the transaction rates of exchange. The results of translation adjustments are recognized as other comprehensive income in "Exchange Difference due to Financial Statements Translation" account.

The closing exchange rates and average exchange rates used as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within 3 (three) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

d. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for oil and gas sales in the ordinary course of business. If collection is expected within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the Effective Interest Rate method, if the impact of discounting is significant, less provision for impairment.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

e. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi merupakan suatu entitas di mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak mengendalikannya. Investasi pada ventura bersama PSC di mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan tapi tidak mengendalikannya juga termasuk sebagai investasi pada entitas asosiasi (Catatan 4i).

Praktek-praktek akuntansi berikut telah diterapkan pada investasi Perusahaan pada ventura bersama PSC di mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan:

- 1) Permintaan dana yang dilakukan dicatat sebagai bagian dari biaya investasi;
- 2) Setiap pendapatan yang dihasilkan dari ventura bersama dipisahkan antara pengembalian investasi atau pengembalian biaya operasi (sebagaimana dikurangkan dari biaya investasi) dan pendapatan dari ventura bersama (yang dicatat di dalam laba rugi Perusahaan).

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Transaksi Perusahaan yang melibatkan Perusahaan Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lain yang dimiliki/dikendalikan oleh Negara/Daerah ditetapkan sebagai transaksi dengan pihak berelasi.

g. Pajak Penghasilan

Biaya pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan diakui pada laba atau rugi kecuali bila pajak tersebut terkait dengan item-item yang diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

e. Investments in Associates

An associate is an entity over which the Compan has significant influence but not control. The investment in a PSC joint venture over which the Company has significant influence, but not control, is also accounted for as an investment in an associate (Notes 4i).

The following accounting practices have been applied to the Company's investment in the PSC joint venture over which the Company has significant influence:

- 1) any cash calls made are recorded as part of the investment cost;
- 2) any revenue generated from the joint venture is split between the return investment or cost recovery (as a deduction from the investment cost) and income from the joint venture (recorded in the Company's profit or loss).

f. Transactions with Related Parties

The Company discloses transactions with related parties as defined in SFAS No. 224, "Related Party Disclosure".

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those for transactions with unrelated parties.

All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

Transactions of the Company involving State/Region-Owned Companies and other companies owned/controlled by the State/Regions are designated as related party transactions.

g. Income Taxes

The tax expenses comprise current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode pendekatan Neraca, berdasarkan selisih temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan jumlah tercatat yang tercantum pada Laporan Keuangan. Namun liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika liabilitas tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas pada transaksi selain penggabungan usaha yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik secara akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku sebagaimana pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku ketika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang melibatkan kegiatan-kegiatan selain kegiatan kegiatan PSC dihitung dengan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang melibatkan kegiatan-kegiatan PSC diukur pada tarif pajak yang berlaku pada tanggal efektif PSC atau perpanjangan atau perubahan PSC tersebut. Perubahan perubahan pada aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai akibat dari perubahan tarif pajak tersebut diakui pada tahun berjalan kecuali untuk transaksi yang sebelumnya dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke ekuitas.

Perubahan-perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan diterima atau, untuk jumlah ketetapan dimana Perusahaan mengajukan keberatan, ketika: (1) hasil keberatan ditentukan kecuali jika terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai hasil keberatan tersebut, yang dalam hal tersebut pengaruh perubahan kewajiban pajak berdasarkan surat ketetapan diakui pada waktu keberatan diajukan, atau (2) pada saat diketahuinya perkembangan pada kasus yang serupa yang melibatkan masalah-masalah yang diajukan keberatan, pada keputusan oleh Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, bahwa hasil banding diputuskan tidak pasti secara signifikan, yang dalam hal tersebut pengaruh perubahan kewajiban pajak diakui berdasarkan jumlah dalam surat ketetapan yang diajukan banding.

Aset pajak penghasilan tangguhan hanya diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

Deferred income tax is recognized, using the Balance Sheet approach method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the Financial Statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities involving activities other than PSC activities are measured at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the Statement of Financial Position date. Deferred tax assets and liabilities involving PSC activities are measured at the tax rates in effect at the effective dates of the PSCs or extensions or amendments of such PSCs. Changes in deferred tax assets and liabilities as a result of amendments of tax rates are recognized in the current year, except for transactions previously charged or credited directly to equity.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, for assessment amounts appealed against by the Company, when: (1) the result of the appeal is determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, in which event the impact of the amendment of tax obligations based on an assessment is recognized at the time of making such appeal, or (2) at the time based on knowledge of developments in similar cases involving matters appealed, in rulings by the Tax Court or the Supreme Court, that a positive appeal outcome is judged to be significantly uncertain, in which event the impact of an amendment of tax obligations is recognized based on assessment amounts appealed.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan ketika aset dan liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama pada wajib pajak yang sama atau wajib pajak yang berbeda dimana terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto.

h. Aset Tetap

Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap lainnya kecuali tanah.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Tahun/Years		
Peralatan Kantor	4 - 8	Office Equipment
Kendaraan	8	Vehicles

Biaya-biaya lanjutan dimasukkan di dalam nilai tercatat aset tersebut atau diakui sebagai aset terpisah jika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi mendatang yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya aset tersebut dapat diukur secara handal. Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan pengakuannya. Semua perbaikan dan pemeliharaan lain dibebankan ke laba dan rugi selama periode pembukuan pada saat terjadinya.

Ketika aset tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dihapus dari Laporan Keuangan dan laba rugi yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui pada laba rugi.

Nilai sisa dan masa manfaat aset ditinjau dan disesuaikan pada akhir periode pelaporan.

Penyusutan dibebankan sejak tanggal aset siap untuk digunakan dan dicatat pada laba rugi sebagai beban umum dan administrasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

h. Fixed Assets

The Company has chosen the cost model as the accounting policy for the measurement of other fixed assets other than land.

Fixed assets are recorded at the cost of acquisition, less accumulated depreciation. Depreciation is calculated on a straight line method over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the Financial Statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed asests are recognized in profit or loss.

The asset's residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Depreciation is charged from the date when assets are ready for use and recorded in proor loss as general and administrative expenses.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

i. Pendapatan dan Beban

Pendapatan timbul sehubungan dengan investasi Perusahaan di PSC Blok Cepu. Lihat Catatan 4e.

Beban diakui saat terjadinya berdasarkan basis akrual.

j. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

(a) Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai (i) pada biaya perolehan diamortisasi, (ii) Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI), atau (iii) Nilai Wajar melalui Laba Rugi (Fair Value through Profit Or Loss (FVPL)).

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal bergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset finansial dan model bisnis Perusahaan untuk mengelolanya.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari Kas di bank diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui FVOCI.

(b) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari beban akrual, utang lain-lain, dan liabilitas jangka pendek lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

i. Revenue and Expenses

Revenue relates to the Company's investment in the Cepu Block PSC. Refer to Note 4e.

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

j. Financial Instruments

Classification

(a) Financial Assets

Financial assets within the scope of SFAS No. 109 are classified as (i) at amortised cost, (ii) Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI), or (iii) Fair Value through Profit Or Loss (FVPL).

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them.

The Company's financial assets consist of Cash in banks classified as financial assets measured at amortised cost, investments in equity instruments classified at FVOCI.

(b) Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of SFAS No. 109 are classified as (i) financial liabilities at fair value through profit or loss, (ii) financial liabilities measured at amortised cost, or (iii) as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

The Company's financial liabilities consist of accrued expenses, other payables, and other current liabilities classified as financial liabilities measured at amortised cost.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran

(a) Aset Keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode (*Effective Interest Rate* ("EIR")). Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dimodifikasi, serta melalui proses amortisasi.

ii. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) (instrumen ekuitas).

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVOCI ketika mereka memenuhi definisi ekuitas dan tidak dimiliki untuk perdagangan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen-per-instrumen.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

Recognition and measurement

(a) Financial Assets

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

i. Financial assets at amortised cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold the financial assets in order to collect contractual cash flow; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the *Effective Interest Rate* ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the assets are derecognized or impaired, modified, as well as through the amortization process.

ii. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) (equity instruments).

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at FVOCI when they meet the definition of equity and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian pada aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang ke laba rugi. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi ketika hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali ketika Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian dari biaya aset keuangan, dalam hal mana, keuntungan tersebut dicatat dalam Penghasilan Komprehensif Lain (Other Comprehensive Income (OCI)).

Perusahaan memilih untuk mengklasifikasikan, yang tidak dapat dibatalkan, investasi ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif di bawah kategori ini.

iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVPL termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada FVPL. Aset keuangan yang diukur pada FVPL ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(b) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in Other Comprehensive Income (OCI).

The Company elected to classify, irrevocably its non-listed, equity investments that are not quoted in an active market under this category.

iii. Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVPL)

Financial assets measured at FVPL include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at FVPL. Financial assets at FVPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

(b) Financial Liabilities

Financial liabilities are recognized initially at fair value and in the case of financial liabilities measured at amortised cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Keuangan" dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara andal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

Financial liabilities measured at amortised cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortised cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Finance Costs" in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in an organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of reporting period.

For financial instruments where there are no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- Level 2 - *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Level 3 - *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hierarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengkaji atas dasar *forward looking* atas kerugian kredit yang diharapkan terkait dengan instrumen hutangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

All assets and liabilities for which fair value are measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 - Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3 - Inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Amortised cost of financial instruments

Amortised cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of financial assets

The Company assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised costs.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Kerugian kredit yang diharapkan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, didiskon berdasarkan perkiraan EIR awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari ketentuan kontraktual.

Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan. Suatu tunjangan kerugian penurunan nilai setara dengan kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup diberikan jika ada peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Jika tidak, pada jumlah yang sama dengan dua belas (12) bulan kerugian kredit yang diharapkan.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang mengharuskan kerugian seumur hidup yang diharapkan untuk diakui dari pengakuan awal atas piutang. Perusahaan telah membentuk tarif penyediaan yang didasarkan pada pengalaman kehilangan kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor ke depan yang khusus untuk debitur dan lingkungan ekonomi. Suatu aset keuangan dihapuskan ketika tidak ada ekspektasi wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Jumlah kerugian atau pembalikan kredit yang diharapkan diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau keuntungan dalam laba rugi dan disajikan secara terpisah dari yang lain jika material.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVOCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan

(a) Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

Expected credit losses are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. An impairment loss allowance equivalent to the lifetime expected credit losses is provided if there is significant increase in credit risk since initial recognition. Otherwise, at an amount equal to twelve (12) months expected credit losses.

For trade receivables and contract assets, the Company applies the simplified approach, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables. The Company has established provision rates that are based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment. A financial asset is written-off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

The amount of expected credit losses or reversal is recognized as impairment loss or gain in profit or loss and presented separately from others, if material.

Equity instruments designated at FVOCI are not subject to impairment assessment.

Derecognition

(a) Financial Assets

A financial asset, or where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- i. The contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

- ii. Perusahaan memindahkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah memindahkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun memindahkan pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(b) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

- ii. The Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company’s continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

In this case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(b) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or has expired.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau jika uji penurunan nilai secara tahunan disyaratkan untuk aset tertentu, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai dan pemulihan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pasca-kerja

Perusahaan menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("Undang-undang") tanggal 2 November 2020. Perhitungan imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dikreditkan atau dibebankan sebagai ekuitas dalam pendapatan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

Beban jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original financial liability and the recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

k. Impairment of Non-Financial Assets

The Company evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing is required for certain assets, the Company estimates the recoverable amount of the assets. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss and reversal an impairment loss are recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

l. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

Post-employment benefits

The Company determine its employee benefits liability under the Job Creation Law 11/2020 ("the Law") dated November 2, 2020. The cost of providing employee benefits liability is determine using the *Projected Unit Credit* method.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expense in profit or loss when incurred.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

Pada bulan April 2022, DSAK-IAI menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 219 Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS No. 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Interpretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (No. IAS 19).

m. Perkembangan Terkini Standar dan Interpretasi
Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi revisian berikut yang relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah;
- Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik; dan
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK 409: "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah" dan PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Arus Kas" terkait Pengungkapan Laporan Keuangan pada Laporan Arus Kas terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Standar akuntansi revisian yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

In April 2022, DSAK-IAI issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS No. 219 *Imbalan Kerja* which was adopted from IAS No. 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS *Interpretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (No. IAS 19).

m. Recent Developments Standards and Interpretations
of Financial Accounting Standards

The following revised accounting standards which are relevant to the Company, are effective from January 1, 2024 and do not result in significant impact to the Company's financial statements:

- Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendments to SFAS and IFAS number, are effective on 1 January 2024. KSPKI regulate the SFAS pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendments to SFAS and IFAS number determine the number for SFAS and IFAS which refering to IFRS Accounting Standards, local accounting standards, and sharia accounting standards;
- Amendment of SFAS 116: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions; and
- Amendment of SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" regarding longterm liabilities with the covenant.
- Amendments of SFAS 409 "Accounting of Zakat, Infak, and Sedekah" and SFAS 401 "Sharia Financial Statement".
- Amendment of PSAK 207 "Statement of Cash Flows" regarding Disclosure of Financial Disclosure in the Statement of Cash Flows regarding Supplier Finance Arrangements.

The following revised accounting standards issued and relevant to the Company, are effective from January 1, 2025 and have not been early adopted by the Company:

- SFAS 117: "Insurance Contract";
- Amendment of SFAS 117: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 117 and

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum menerapkan lebih awal perubahan-perubahan yang belum diwajibkan, dan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

5. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan :

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kelangsungan usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dan meyakini bahwa perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis dimasa yang akan datang yang tidak dapat diperkirakan. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan disusun dengan basis kelangsungan usaha.

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan, antara lain mata uang:

- yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa;

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)

- Amendment of SFAS 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to conditions when a currency is not exchangeable.

As at the date of these financial statements, the Company has not early adopted the above changes which are not yet mandatory, and is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Company's financial statements.

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

The preparation of financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Company's accounting policies are those most likely to have significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments which have the most significant effect on the amounts recognizes in the financial statements:

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company's, among others the currency:

- that mainly influences sales prices for goods and services;

5. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)

- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas;
- yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan; dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset untuk tahun berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 4.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14.

5. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

- of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of goods and services;
- that mainly influences labour, material, and other costs of providing goods or service;
- in which funds from financing activities are generated; and
- in which receipt from operating activities are usually retained.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 4.

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Company records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Company utilized different valuation methodology or assumptions. Such changes would directly affect the Company's profit or loss. Further details are disclosed in Note 14.

5. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur
manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah pemulihan atas aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

5. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

Determining depreciation method and estimated useful
lives of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 (four) years and 8 (eight) years. These are common life expectancies applied in the industries in which the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact on the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories are estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

The recoverable amounts of fixed assets are based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked.

Estimation of pension cost and employee benefits

The determination of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further, details are disclosed in Note 12.

5. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Perusahaan menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Perusahaan juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10d.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Perusahaan melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Perusahaan membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

5. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 10.

The Company reviews its deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Company also reviews the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly. Further details are disclosed in Note 10d.

Evaluating provisions and contingencies

The Company exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies and sets up appropriate provisions for its legal and constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions taking relevant risks and uncertainty into account.

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with SFAS No. 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset".

The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Kas tunai			Cash on hand
Rupiah	9.452	3.249	Rupiah
Total kas tunai	9.452	3.249	Total cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Pihak ketiga			Third Parties
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Permata Tbk	8.366.001	37.342.503	PT Bank Permata Tbk
Sub-total	8.366.001	37.342.503	Sub-total
Rupiah			Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.984	2.094	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-total	1.984	2.094	Sub-total
Badan Terkait Pemerintahan (Catatan 9b)			Government Related Entities (Note 9b)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat			PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	562.767	655.088	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara			PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	510.633	485.086	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	48.970	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro	9.825	4.824	PD BPR Bank Daerah Bojonegoro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	628	666	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	199	232	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Sub-total	1.133.022	1.145.896	Sub-total
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	25.020.225	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Sub-total	25.020.225	-	Sub-total
Total kas di bank	34.521.232	38.490.493	Total cash in banks
Deposito Berjangka			Time Deposit
Badan Terkait Pemerintahan (Catatan 9b)			Government Related Entities (Note 9b)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat			PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	5.389.185	3.898.547	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.258.384	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro	618.735	648.677	PD BPR Bank Daerah Bojonegoro
PT Bank Negara			PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	-	3.632.590	Indonesia (Persero) Tbk
Sub-total	8.266.304	8.179.814	Sub-total
Total deposito berjangka	8.266.304	8.179.814	Total time deposit
Jumlah Kas dan Setara Kas	42.796.988	46.673.556	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat Bunga Deposito Berjangka Rupiah dan Dolar AS	2,76% - 6%	2,75% - 5,50%	Time Deposit Interest Rates Rupiah and US Dollar

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG USAHA

	2024	2023
PT Pertamina (Persero) Tbk (Catatan 9)	2.982.998	3.441.324
MCL	1.542.498	1.199.343
Jumlah	4.525.496	4.640.667

Piutang usaha dari MCL merupakan bagian Perusahaan dalam penjualan minyak mentah kepada para konsumen Perusahaan dan biaya DMO dari Pemerintah, yang melakukan pembayaran piutang tersebut kepada MCL.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, cadangan penurunan nilai tidak ditetapkan karena manajemen yakin bahwa piutang usaha dapat ditagih dan tidak ada piutang yang telah jatuh tempo.

8. INVESTASI DI PSC BLOK CEPU

	2024	2023
Saldo awal	11.701.928	12.685.178
Permintaan Dana		
yang Dibayar kepada MCL	12.032.693	8.771.761
Dikurangi:		
Pengembalian Investasi	(668.327)	(428.434)
Pengembalian Biaya Operasi	(11.201.617)	(9.326.577)
Investasi di PSC Blok Cepu	11.864.677	11.701.928
Hak <i>Lifting</i>	53.514.085	57.717.178
Dikurangi:		
Pengembalian Biaya Operasi	(11.201.617)	(9.326.577)
Penghasilan dari PSC	42.312.468	48.390.601

Hak *lifting* Perusahaan menunjukkan bagian Perusahaan dalam penjualan minyak mentah kepada para konsumen. Perusahaan memiliki pengaruh signifikan dalam ventura bersama Blok Cepu sebagaimana Perusahaan memiliki wakil di dewan pengurus ventura bersama, tetapi tidak mengendalikan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 bagian hak *lifting* yang menunjukkan pengembalian biaya operasi dikurangi terhadap biaya perolehan investasi, dan sisanya masing-masing sebesar USD42.312.468 dan USD48.390.601 diakui sebagai penghasilan dari PSC.

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

7. TRADE RECEIVABLES

PT Pertamina (Persero) Tbk (Note 9)
MCL
Total

Trade receivables from MCL represent the Company's share of crude oil sales to the Company's customers and DMO fees from Government, which made payments of such receivables to MCL.

As of December 31, 2024 and 2023, no provision for impairment was provided since management believes that the trade receivables are fully collectible and there was no overdue receivable.

8. INVESTMENT IN CEPU BLOCK PSC

Beginning Balance
Cash Calls Paid to MCL
Less:
Return on Investment
Cost Recovery
Investment in Cepu Block PSC
Lifting Entitlements
Less:
Cost Recovery
Income from PSC

The Company's lifting entitlements represent the Company's share of crude oil sold to the customers. The Company has significant influence in the Cepu Block joint venture as the Company has a representative in the joint venture operating board, but not control. Therefore, as of December 31, 2024 and 2023 the part of lifting entitlements which represent cost recovery were deducted against the investment cost, and the remaining amounting to USD42,312,468 and USD48,390,601, respectively was recognized as income from PSC.

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat transaksi pihak berelasi

Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	
SER	
PT Cipta Inca Perdana (Cipta)	
PT Kinarya Surya Perkasa (Kinarya)	
PT Bina Marita Sukses (Bina)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Pertamina (Persero) Tbk	
Pertamina Cepu	
Badan Kerjasama PI Blok Cepu (BKS PI Cepu)	
Cipta, Kinarya dan Bina merupakan pemegang saham domestik SER (secara bersama-sama disebut sebagai "Pemegang Saham Domestik SER").	
Kebijakan penetapan harga Perusahaan terkait dengan transaksi-transaksi dengan para pihak berelasi adalah sebagai berikut:	
<ul style="list-style-type: none">- Permintaan dana dari para pihak berelasi ditetapkan berdasarkan permintaan dana dari MCL.- Berbagai biaya usaha lain dari para pihak berelasi ditetapkan berdasarkan harga yang disepakati.- Harga minyak mentah diatur berdasarkan Harga Minyak Mentah Indonesia ICP.	

9. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Nature of related parties transactions

Sifat Berelasi/ <i>Nature of Relationship</i>	
Pemegang Saham/ <i>Shareholder</i>	
Pemegang Saham SER/ <i>Shareholder of SER</i>	
Pemegang Saham SER/ <i>Shareholder of SER</i>	
Pemegang Saham SER/ <i>Shareholder of SER</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan yang Terkait dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entity</i>	
Badan Kerjasama antar Badan Usaha Milik Daerah/ <i>Cooperation agreement between Regional Owned Enterprised</i>	
<i>Cipta, Kinarya and Bina are the domestic shareholders of SER (collectively referred as the "Domestic Shareholders of SER").</i>	
<i>The Company's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- <i>Cash calls given from related parties are set based on cash call requests from MCL.</i>- <i>Other various operating expenses from related parties are set based on an agreed price.</i>- <i>Crude oil price is set based on Indonesian Crude Oil Price (ICP).</i>	

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

9. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

b. Saldo dengan pihak berelasi

b. Balance with related parties

	2024	2023	
Bank dan Deposito Berjangka (Catatan 6)			Bank and Time Deposit (Note 6)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	27.327.579	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.951.952	4.553.635	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	510.633	4.117.676	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro	628.560	653.501	PD BPR Bank Daerah Bojonegoro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	628	666	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	199	232	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Total	34.419.551	9.325.710	Total
Persentase terhadap total aset	58.02%	14.76%	Percentage to total assets
Piutang Usaha			Trade Receivable
PT Pertamina (Persero) Tbk (Catatan 7)	2.982.998	3.441.324	PT Pertamina (Persero) Tbk (Note 7)
Total	2.982.998	3.441.324	Total
Persentase terhadap total aset	5.03%	5.45%	Percentage to total assets

c. Transaksi dengan para pihak berelasi

c. Transaction with related parties

	2024	2023	
Penjualan Minyak Mentah			Crude Oil Sales
PT Pertamina (Persero) Tbk	48.553.480	52.636.511	PT Pertamina (Persero) Tbk
Total	48.553.480	52.636.511	Total
Persentase terhadap Penghasilan dari PSC	114.75%	108.77%	Percentage to Total Income from PSC
Persentase terhadap Pengembalian Investasi dan Pengembalian Biaya Operasi	409.05%	539.58%	Percentage to Return on Investment and Cost Recovery
Beban Penjualan			Selling Expenses
BKS PI Cepu (Catatan 16)	114.590	109.579	BKS PI Cepu (Note 16)
Total	114.590	109.579	Total
Persentase terhadap Laba sebelum Pajak Penghasilan	0.27%	0.24%	Percentage to Income before Income Tax

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

9. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

	2024	2023	
Penghasilan Bunga			Interest Income
PT Bank Rakyat			PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	244.792	50.033	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	101.752	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara			PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk	38.884	156.579	Indonesia (Persero) Tbk
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro	27.769	4.821	PD BPR Bank Daerah Bojonegoro
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3	3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	413.200	211.436	Total
Persentase terhadap Laba sebelum Pajak Penghasilan	0.99%	0.46%	Percentage to Income before Income Tax

d. Imbalan Manajemen Inti

d. Key Management Compensationes

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, imbalan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dibayarkan oleh Perusahaan masing-masing sebesar USD106.053 dan USD99.113.

As of December 31, 2024 and 2023, the compensation of the Company's Boards of Commissioners and Directors was paid by the Company amounted to USD106,053 and USD99,113.

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	2024	2023	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8.452	3.267	Value Added Tax (VAT)
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	1.498	262	Income Tax Article 4(2)
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.198	908	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	158	218	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.410.541	1.356.440	Income Tax Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 29	277.201	364.837	Income Tax Article 29
Total	1.699.048	1.725.932	Total

b. Beban Pajak Penghasilan

b. Income Tax Benefit (Expense)

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Income tax benefit (expense) of the Company was as follows:

	2024	2023	
Pajak kini	(15.284.474)	(17.386.220)	Current
Pajak tangguhan	(507)	1.666	Deferred
Total	(15.284.981)	(17.384.554)	Total

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana disajikan dalam laba rugi dan laba sebelum pajak penghasilan dari kegiatan PSC dan kegiatan Non-PSC adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	41.891.114	46.403.834
Koreksi Fiskal:		
Penyesuaian PSC	(141.654)	95.386
Penghasilan Bunga kena Pajak Final	(1.085.292)	(1.055.551)
Beban imbalan kerja	(2.304)	7.575
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	637.578	1.671.490
Lain-lain	1.317	5.507
Perkiraan Penghasilan Kena Pajak	41.300.759	47.128.241
Perkiraan Penghasilan Kena Pajak terdiri dari:		
(a) Penghasilan Kena Pajak dari Kegiatan PSC	42.456.872	48.295.056
(b) Rugi fiskal dari Kegiatan Non-PSC	(1.156.113)	(1.166.815)
Biaya Pajak Penghasilan Badan dari Kegiatan PSC (36% x (a))	15.284.474	17.386.220
Biaya Pajak Penghasilan Badan	15.284.474	17.386.220
Dikurangi:		
Pajak Penghasilan Dibayar di Muka Pasal 25	(15.007.273)	(17.021.383)
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan	277.201	364.837

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan jumlah pajak teoritis atas laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	41.891.114	46.403.834
Pajak Penghasilan pada Nilai Pajak yang berlaku dari Kegiatan PSC	15.284.474	17.386.220
Subjumlah	15.284.474	17.386.220

10. TAXATION (Continued)

c. Current Income Tax

The reconciliation between income before income tax as shown in profit or loss and income before income tax from the PSC activities and Non-PSC activities are as follows:

Income before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income
Fiscal Corrections:
PSC Adjustments
Interest Income Subject to Final Tax
Employee benefits expense
Corporate social responsibility expenses
Others
Estimated Taxable Income
Estimated Taxable Income consisting of:
(a) Taxable Income from PSC Activities
(b) Fiscal Loss from Non-PSC Activities
Corporate Income Tax Expense from PSC Activities (36% x (a))
Corporate Income Tax Expense Less:
Prepaid Income Tax Article 25
Underpayment of Corporate Income Tax

The reconciliation between income tax expense and theoretical tax amount on the Company's income before income tax are as follows:

Income before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income
Income Tax at Effective Tax Rate from PSC Activities
Subtotal

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

	2024	2023	
Pajak Penghasilan pada Nilai Pajak yang berlaku dari Kegiatan Non PSC	-	-	Income Tax at Effective Tax Rate from Non PSC Activities
Koreksi Fiskal:			Fiscal Corrections:
Penghasilan Bunga kena Pajak Final	(238.764)	(232.221)	Interest Income Subject to Final Tax
Beban imbalan kerja	(507)	1.666	Employee benefits expense
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	140.267	367.728	Corporate social responsibility expenses
Lain-lain	290	1.212	Others
Rugi fiskal yang daluarsa	84.948	64.734	Expired fiscal loss
Pajak tangguhan dari imbalan kerja	507	(1.666)	Deferred tax from employee benefits
Aset Pajak Tangguhan yang Tidak Diakui	13.766	(203.119)	Unrecognized Deferred Tax Assets
Subjumlah	507	(1.666)	Subtotal
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	15.284.981	17.384.554	Total Income Tax Expense

Perhitungan pajak penghasilan kini didasarkan pada perkiraan penghasilan kena pajak atau kerugian fiskal. Jumlah-jumlah tersebut mungkin disesuaikan ketika laporan pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak.

Current income tax computations were based on estimated taxable income or fiscal loss. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed to the tax office.

Per 31 Desember 2024, gambaran estimasi kompensasi kerugian pajak Perusahaan yang tersedia untuk penghasilan kena pajak mendatang yang dapat saling hapus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun dimana kerugian terjadi dengan tahun yang berakhir terkait adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, an overview of the Company's estimated tax loss carried forward which was available to offset future taxable income for a period of 5 (five) years from the year in which the loss was incurred with the relevant expiry year is as follows:

Periode Tahun yang Berakhir/ Period of Year Ended	Tahun Berakhir/ Expiry Year	Jumlah Penuh/ Full Amount
2024	2029	1.156.113
2023	2028	1.166.815
2022	2027	1.023.055
2021	2026	849.121
2020	2025	668.134

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

2024				
Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2024	
Liabilitas imbalan kerja	3.409	(507)	5	Employee benefits liability
Kompensasi Kerugian Pajak	900.516	169.396	-	Tax Loss Carried Forward
Aset Pajak Tangguhan yang Tidak Diakui	(900.516)	(169.396)	-	Unrecognized Deferred Tax Assets
Aset Pajak Tangguhan - Neto	3.409	(507)	5	Deferred Tax Assets - Net

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

10. TAXATION (Continued)

2023					
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2023	
Liabilitas imbalan kerja	1.737	1.666	6	3.409	Employee benefits liability
Kompensasi Kerugian Pajak	708.550	191.966	-	900.516	Tax Loss Carried Forward
Aset Pajak Tangguhan yang Tidak Diakui	(708.550)	(191.966)	-	(900.516)	Unrecognized Deferred Tax Assets
Aset Pajak Tangguhan - Neto	1.737	1.666	6	3.409	Deferred Tax Assets - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan pada periode mendatang.

Management believes that the deferred tax assets are recoverable in future periods.

Aset pajak tangguhan yang muncul dari akumulasi rugi fiskal tidak diakui. Manajemen berkeyakinan bahwa penghasilan kena pajak 5 tahun yang akan datang tidak dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan saldo aset pajak tangguhan.

Deferred tax assets arising from accumulated fiscal losses were not recognized. The management believes that there will be no sufficient taxable income available in the next 5 years to recover these deferred tax assets.

11. MODAL SAHAM DAN PENYERTAAN SAHAM DI MUKA

11. SHARE CAPITAL AND ADVANCE SHARE SUBSCRIPTIONS

Susunan Pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Shareholders as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

		2024 dan/and 2023			
		Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount		
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	(%)	USD	IDR	Shareholders
Saham Kelas A					Class A Shares
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	160.000	100	727	8.000.000	Government of Bojonegoro Regency
Saham Kelas B					Class B Shares
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	20.000	25	181.818	2.000.000.000	Government of Bojonegoro Regency
SER	60.000	75	545.455	6.000.000.000	SER
	80.000	100	727.273	8.000.000.000	
Total	240.000	200	728.000	8.008.000.000	Total

Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan saham ini adalah sebagai berikut:

The terms and condition of these shares are as follows:

- 1) Saham Kelas A memberikan kepada pemiliknya hak suara penuh dalam urusan Perusahaan dan tidak memberikan kepada pemiliknya hak atas dividen Perusahaan, sesuai dengan hak-hak mendatang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dari waktu ke waktu. Satu saham Kelas A mewakili satu suara.

- 1) Class A shares give to their holders full voting rights in the affairs of the Company and do not give to their holders the rights to the dividends of the Company, subject to such further rights as set out in the Articles of Association of the Company from time to time. One Class A share represents one vote.

11. MODAL SAHAM DAN PENYERTAAN SAHAM DI MUKA (Lanjutan)

- 2) Saham Kelas B memberikan kepada pemiliknya hak suara penuh dalam urusan Perusahaan dan memberikan kepada pemiliknya hak atas dividen Perusahaan, sesuai dengan hak-hak mendatang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dari waktu ke waktu. Satu saham Kelas B mewakili satu suara.

Saham Kelas A dan saham Kelas B juga harus sesuai dengan perjanjian pemegang saham dan Perjanjian Penyertaan Saham sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3.

Berdasarkan Akta Notaris Anik Farida Agustin, S.H., Mkn., M.H. No. 14 tanggal 16 Juni 2021, Para pemegang saham menyetujui pemahaman bersama bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait komposisi kepemilikan jumlah lembar saham BUMD adalah 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan 49% oleh Mitranya. Terkait metode perubahan komposisi kepemilikan saham seri B di Perusahaan akan dibahas terpisah antar Pemegang Saham secara *business to business*.

12. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen dalam laporannya masing-masing tertanggal 12 Februari 2025 dan 10 Januari 2024 dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

	2024	2023	
Usia pensiun normal	58 tahun/58 years	58 tahun/58 years	Normal pension age
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	Salary increase rate per annum
Tingkat diskonto per tahun			Discount rate per annum
Permanen	7.25%	7.00%	Permanent
Direksi dan Komisaris	7.00%	6.50%	Directors and Commissioners
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 35 tahun dan menurun secara linier hingga 0% di usia 58 tahun / 5% until age 35 then decrease linearly into 0% at age 58	5% sampai usia 35 tahun dan menurun secara linier hingga 0% di usia 58 tahun / 5% until age 35 then decrease linearly into 0% at age 58	Turnover rate

11. SHARE CAPITAL AND ADVANCE SHARE SUBSCRIPTIONS (Continued)

- 2) Class B shares give to their holders full voting rights in the affairs of the Company and give to their holders the rights to the dividends of the Company, subject to such further rights as set out in the Articles of Association of the Company from time to time. One Class B share represents one vote.

These Class A shares and Class B shares are also subject to the shareholders' agreement and the Share Subscription Agreement as explained in Note 3.

Based on Notarial Deed No. 14 of Anik Farida Agustin, S.H., Mkn., M.H. dated June 16, 2021, the shareholders agreed to a common understanding that the stipulation of the laws and regulations regarding the composition of ownership of the BUMD shares are 51% owned by the Regional Government and 49% by its Partners. Regarding the method of changing the composition of the ownership of Series B shares in the Company, it will be discussed separately between Shareholders based on business to business.

12. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Employee benefits liability as of December 31, 2024 and December 31, 2023 was calculated by an independent actuary, Riana & Partner Actuarial Consultant Office, whose reports dated February 12, 2025 and January 10, 2024, respectively, used the “*Projected Unit Credit*” method with consideration of the following assumptions:

12. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Imbalan paska kerja		
- Biaya jasa kini	8.351	7.119
- Biaya jasa lalu	-	(157)
Beban bunga		
imbalan paska kerja	799	442
Dampak perubahan kurs		
valuta asing	(640)	311
Total	8.510	7.715

12. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

Employee benefits expense was as follows:

Post-employment benefit
Current service cost
Past service cost
Post-employment benefit
Interest cost
Impact of change
in foreign currency
Total

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Employee benefits liability was as follows:

	2024	2023
Nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan	13.212	15.495

Present value of employee
benefits liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Movements of employee benefits liability was as follows:

	2024	2023
Saldo awal tahun	15.495	7.894
Beban (pendapatan) imbalan kerja diakui pada:		
Laba rugi	8.510	7.715
Penghasilan komprehensif lain	21	26
Realisasi pembayaran manfaat	(10.814)	(140)
Saldo Akhir	13.212	15.495

Beginning balance of the year
Benefit expense (income)
recognize in:
Profit -loss
Other comprehensive income
Actual benefit payments
Ending Balance

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The sensitivity of employee benefits liability to changes in the weight assumption as of December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	2024		2023	
	Kenaikan/ Increase 1%	Penurunan/ Decrease 1%	Kenaikan/ Increase 1%	Penurunan/ Decrease 1%
Tingkat diskonto	12.853	13.602	15.191	15.823
Tingkat kenaikan gaji	13.674	12.779	15.877	15.134

Discont rate
Salary increase rate

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	2024	2023
Kurang dari (1) satu tahun	4.592	10.819
Antara (1) satu dan (2) dua tahun	775	3.464

Less then (1) one year
Between (1) one and (2) two years

12. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

	2024
Antara (2) dua dan (5) lima tahun	23.373
Antara (5) lima dan (10) sepuluh tahun	1.439
Di atas (10) sepuluh tahun	82.481

12. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

	2023	
	19.267	Between (2) two and (5) five years
	1.213	Between (5) five and (10) ten years
	71.936	Over (10) ten years

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Remeasurement on employee benefits liability recognized in other comprehensive income in the statement of financial position were as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	843	863	Beginning of the year
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	(21)	(26)	Actuarial gain on employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait (Catatan 10d)	5	6	Related income tax (Note 10d)
Sub-total	(16)	(20)	Sub-total
Saldo akhir tahun	827	843	End of the year

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR)

Pelaksanaan kegiatan CSR berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan dikoordinasikan perencanaannya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ("BAPPEDA") sesuai Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2011.

13. CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (CSR)

The implementation of CSR activities is guided by Government Regulation No. 47 Year 2012 and the planning is coordinated by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ("BAPPEDA") according to Regional Regulation number 23 Year 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Program CSR yang sudah terealisasi adalah masing-masing sebesar USD637.578 dan USD1.671.490.

As of December 31, 2024 and 2023, the CSR Program that have been realized amounting to USD637,578 and USD1,671,490, respectively.

Sampai dengan laporan audit ini diterbitkan, laporan audit pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2024 belum tersedia.

As of the issuance of this audit report, the 2024 Corporate Social Responsibility (CSR) Fund accountability audit report is not yet available.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2023 atas prosedur yang disepakati Kantor Akuntan Publik Erfan & Rakhmawan nomor: AUP-4002/KAP.ER./V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dalam Lapornya KAP Erfan & Rakhmawan atas prosedur yang disepakati, telah melaksanakan prosedur yang disepakati untuk tujuan memastikan laporan pertanggungjawaban Dana Corporate Social Responsibility (CSR). Laporan ini tidak memberikan opini atau pernyataan atas laporan tersebut, melainkan melaporkan hasil dari prosedur yang dilaksanakan.

Based on the accountability report of the Corporate Social Responsibility (CSR) Fund in 2023 on the agreed procedures of the Erfan & Rakhmawan Public Accounting Firm number: AUP-4002/KAP.ER./V/2024 dated May 13, 2024, in its report KAP Erfan & Rakhmawan on the agreed procedures, has carried out the agreed procedures for the purpose of ensuring the Corporate Social Responsibility (CSR) Fund accountability report. This report does not provide an opinion or statement on the report, but rather reports the results of the procedures implemented.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Iin Eka Lestari, S.H., Mkn., Nomor 2 tanggal 17 Desember 2024, Para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Tahun 2024 karena terdapat penambahan alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan ("CSR") sehingga total alokasi dana CSR Tahun 2024 menjadi sebesar Rp17.891.417.096 (setara dengan USD1.192.761).

Pada Rapat Koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 10 Mei 2024, Direksi menyetujui Program CSR tahun 2023 yang belum terealisasi dapat dilanjutkan pelaksanaannya di tahun 2024.

Berdasarkan Akta Notaris Iin Eka Lestari, S.H., Mkn., Nomor 6 tanggal 12 September 2023, Para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Tahun 2023 karena terdapat penambahan alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan ("CSR") sehingga total alokasi dana CSR Tahun 2023 menjadi sebesar Rp33.796.311.566 (setara dengan USD2.253.087).

14. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan pada periode pelaporan:

	2024		2023	
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values
Aset Keuangan				
Kas tunai	9.452	9.452	3.249	3.249
Biaya perolehan diamortisasi				
Kas di bank dan setara kas	42.787.536	42.787.536	46.670.307	46.670.307
Piutang usaha	4.525.496	4.525.496	4.640.667	4.640.667
Total Aset Keuangan	47.322.484	47.322.484	51.314.223	51.314.223
Liabilitas Keuangan				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				
Beban akrual	23.707	23.707	8.680	8.680
Total Liabilitas Keuangan	23.707	23.707	8.680	8.680

13. CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (CSR) (Continued)

Based on Notarial Deed No 2 of Iin Eka Lestari, S.H., Mkn., dated December 17, 2024, The Company's Shareholders approved the change in the Company's 2024 work plan and budget due to the addition of the social and environmental responsibility ("CSR") budget allocation so that the total allocation of CSR funds for 2024 was Rp17,891,417,096 (equivalent to USD1,192,761).

At the Coordination Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners on May 10, 2024, the Board of Directors approved that the unrealized CSR Program in 2023 can be continued in 2024.

Based on Notarial Deed No. 6 of Iin Eka Lestari, S.H., Mkn., dated September 12, 2023, The Company's Shareholders approved the change in the Company's 2023 work plan and budget due to the addition of the social and environmental responsibility ("CSR") budget allocation so that the total allocation of CSR funds for 2023 was Rp33,796,311,566 (equivalent to USD2,253,087).

14. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets forth the carrying amount and estimated fair value of financial instruments that were carried on the statement of financial position as of the end of the reporting period:

Financial Assets
Cash on hand
At amortize cost
Cash in bank and cash equivalents
Trade receivables
Total Financial Assets
Financial Liabilities
At amortized cost
Accrued expenses
Total Financial Liabilities

14. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 113, "Pengukuran Nilai Wajar", terdapat tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. (tingkat 1),
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (tingkat 2), dan
- Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (tingkat 3).

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan sepanjang nilai tersebut dapat diestimasi:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas, piutang usaha, dan beban masih harus dibayar).

Instrumen keuangan ini diperkirakan sebesar nilai tercatat mereka karena sebagian besar merupakan jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap (liabilitas pembiayaan konsumen).

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya (investasi jangka pendek, piutang dan utang pihak berelasi dan aset tidak lancar lainnya).

Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Perusahaan (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) dari instrumen yang serupa.

Aset tidak lancar lainnya dan investasi jangka pendek yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

14. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Based on SFAS No. 113, "Fair Value Measurements", there are levels of fair value hierarchy as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date (level 1),
- Inputs other than quoted prices include within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (level 2), and
- Inputs are unobservable inputs for the asset or liability (level 3).

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to do so:

Short-term financial assets and liabilities:

- Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash, trade receivables, and accrued expenses).

These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities..

Long-term financial assets and liabilities:

- Long-term fixed-rate financial liabilities (consumer finance liabilities).

The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- Other long-term financial assets and liabilities (short-term investment, due from and due to related parties and other non-current assets).

Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the companies' own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

Other non-current assets and short-term investment that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan Perusahaan terpapar berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai mata uang asing, risiko harga dan risiko suku bunga), risiko kredit, risiko likuiditas, nilai wajar dan manajemen risiko modal. Tujuan manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengelola risiko-risiko dasar untuk mengamankan keberlangsungan usaha jangka panjang Perusahaan dan meminimalisir kemungkinan dampak buruk pada kinerja keuangan Perusahaan.

a. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas mendatang instrumen keuangan akan bersifat fluktuatif karena perubahan-perubahan dalam harga pasar.

Faktor-faktor risiko pasar adalah nilai tukar asing, harga komoditas dan suku bunga.

(i) Risiko nilai tukar

Mayoritas pendapatan dan pembiayaan Perusahaan menggunakan mata uang Dolar AS dan mata uang pelaporan Perusahaan adalah Dolar AS dan dengan demikian Perusahaan memiliki keterpaparan minimum terhadap fluktuasi dalam nilai tukar asing.

Perusahaan juga tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang signifikan dalam mata uang asing pada 31 Desember 2024 dan 2023.

(ii) Risiko harga

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan secara signifikan tidak terpapar terhadap risiko pasar yang terkait dengan volatilitas harga minyak mentah karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan didasarkan pada ICP.

(iii) Risiko suku bunga

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including the effects of foreign currency exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk, liquidity risk, fair value and capital risk management. The objective of the Company's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Company's long-term business continuity and minimise any potential adverse effects on the financial performance of the Company.

a. Market risk

Market risk is the risk that fair value of the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices.

The market risk factors are foreign exchange rates, commodity prices and interest rates.

(i) Foreign exchange risk

The majority of the Company's revenue and financing is denominated in US Dollar and the reporting currency of the Company is US Dollar, and thus the Company has a minimum exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

The Company also did not have significant financial assets and liabilities in foreign currency as of December 31, 2024 and 2023.

(ii) Price risk

The Company's financial assets and liabilities are not significantly exposed to market risks related to the price volatility of crude oil because the settlement of financial assets and liabilities are based on ICP.

(iii) Interest rate risk

2024							
Nilai Mengambang/Floating Rate		Nilai Tetap/Fixed Rate			Tidak memiliki bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	3 bulan - 6 bulan/ 3 months - 6 months	6 bulan - 1 tahun/ 6 months - 1 year				
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan setara kas	42.787.536	-	-	-	9.452	42.796.988	Cash and Cash equivalents
Piutang usaha	4.525.496	-	-	-	-	4.525.496	Trade receivables
Total	47.313.032	-	-	-	9.452	47.322.484	Total
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Beban akrual	-	-	-	-	23.707	23.707	Accrued expenses
Total	-	-	-	-	23.707	23.707	Total

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

		2023						
		Nilai Mengambang/Floating Rate		Nilai Tetap/Fixed Rate		Tidak memiliki bunga/ Non-interest bearing	Total/ Total	
		Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	3 bulan - 6 bulan/ 3 months - 6 months	6 bulan - 1 tahun/ 6 months - 1 year			
Aset Keuangan								Financial Assets
Kas dan setara kas		46.670.307	-	-	-	3.249	46.673.556	Cash and cash equivalents
Piutang usaha		4.640.667	-	-	-	-	4.640.667	Trade receivables
Total		51.310.974	-	-	-	3.249	51.314.223	Total
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities
Beban akrual		-	-	-	-	8.680	8.680	Accrued expenses
Total		-	-	-	-	8.680	8.680	Total

b. Risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain dengan eksposur maksimum setara dengan nilai tercatat aset keuangan perusahaan sebagai berikut:

	2024	2023	
Kas di bank dan setara kas	42.787.536	46.670.307	Cash in bank and cash equivalents
Piutang usaha	4.525.496	4.640.667	Trade receivables
Total	47.313.032	51.310.974	Total

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank lokal dan asing yang bereputasi baik.

The Company's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal to the carrying amount of its financial assets as follows:

All cash in banks and time deposits amounts are placed in the reputable local and foreign banks.

Manajemen yakin dengan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur minimum risiko kredit karena Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas mengenai risiko kredit.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk given that the Company has clear policies on credit risk.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul dalam situasi di mana Perusahaan memiliki kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Perusahaan menjaga kas dan setara kas yang cukup. Perusahaan mengelola risiko likuiditasnya dengan secara terus-menerus memantau arus kas perkiraan dan aktual.

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulty in obtaining funding. The Company implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages its liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows.

		2024				
		Nilai arus kas kontraktual / Contractual cash flows amounts				
		Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years				
		Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years		
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities	
Beban Akrual		23.707	-	-	Accrued Expenses	
Total		23.707	-	-	Total	

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

	2023			
	Nilai arus kas kontraktual / Contractual cash flows amounts			
		Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year			
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Beban Akrual	8.680	-	-	Accrued Expenses
Total	8.680	-	-	Total

d. Manajemen risiko modal

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mengamankan kemampuan Perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya untuk memberikan imbalan kepada para pemegang saham dan manfaat untuk para pemegang kepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal optimal untuk mengurangi biaya modal.

d. Capital risk management

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

16. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Pada tanggal 14 April 2015, LGC mengadakan perjanjian kerjasama penjualan minyak mentah dengan Pertamina Cepu. Berdasarkan perjanjian, Pertamina Cepu ditunjuk untuk menjual minyak mentah LGC kepada PT Pertamina (Persero) atas nama LGC. Sebagai imbalan kepada Pertamina Cepu, LGC akan membayar Pertamina Cepu biaya reimbursement aktual sebesar maksimal USD60.000 per bulan.

On April 14, 2015, the LGCs entered into a Crude Oil Sale Cooperation Agreement with Pertamina Cepu. Based on the agreement, Pertamina Cepu was appointed to sell LGCs' crude oil to PT Pertamina (Persero) on behalf of LGCs. As compensation to Pertamina Cepu, LGCs will pay Pertamina Cepu the actual reimbursement cost of USD60,000 per month at the maximum.

Pada tanggal 1 Juli 2015, LGC dan Pertamina Cepu (secara bersama-sama disebut sebagai "Penjual") mengadakan Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah Banyu Urip dengan PT Pertamina (Persero). Penjual sepakat untuk mengirim minyak mentah kurang lebih 1.800.000 barel per bulan selama jangka waktu Perjanjian. Perjanjian akan berlaku sejak tanggal lifting pertama dan akan berakhir pada akhir PSC Blok Cepu atau ketika tidak ada lagi produksi minyak mentah untuk tiga bulan berturut-turut. Lifting pertama adalah pada bulan April 2015.

On July 1, 2015, the LGCs and Pertamina Cepu (together referred as "the Seller") entered into the Banyu Urip Crude Oil Sale and Purchase Agreement with PT Pertamina (Persero). The Seller agreed to deliver crude oil at approximately 1,800,000 barrels per month during the agreement period. The agreement is valid from the date of the first lifting and will expire upon the end of Cepu Block PSC or when there is no crude oil production for three consecutive months. The first lifting was in April 2015.

Perjanjian berlaku sejak 1 April 2015 dan akan berakhir pada akhir PSC Blok Cepu. Pada tanggal 22 Mei 2017 biaya penjualan diganti menjadi sebesar USD45.760 per bulan dan USD52.693,33 jika terjadi ekspor. Perubahan ini berlaku efektif 1 April 2017.

The agreement is valid from April 1, 2015 and will expire upon the end of Cepu Block PSC. On May 22, 2017 the cost of sales was changed to USD45,760 per month and USD52,693.33 if export occurs. This amendment is effective from April 1, 2017.

16. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2022, LGC dan Pertamina Cepu sepakat mengakhiri perjanjian. Kegiatan *lifting* bersama minyak mentah Banyu Urip selanjutnya dilaksanakan *Lifting Mandiri* oleh BKS PI Cepu. Total biaya penjualan sehubungan dengan perjanjian ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar USD114.590 dan USD109.579 (Catatan 9c).

Pada tanggal 29 November 2023, LGC (secara bersama-sama disebut sebagai "Penjual") mengadakan Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah Banyu Urip dengan PT Kilang Pertamina Internasional.

Perkiraan jumlah minyak yang akan di *lifting* oleh Pembeli selama jangka waktu PJM adalah :

- a. Periode 01 Oktober 2023 - 31 Desember 2023: 100% *entitlement* para Penjual dengan estimasi volume 290.000 barrel dengan toleransi $\pm 10\%$ toleransi operasional dengan harga minyak Indonesia *Crude Price* Banyu Urip (ICP) saat bulan *Loading* + US\$0.00/Barrel.
- b. Periode 01 Januari 2024 - 31 Desember 2024: 100% *entitlement* para Penjual dengan estimasi volume 1.080.000 barrel per tahun atau 80.000-90.000 barrel per bulan dengan toleransi $\pm 10\%$ toleransi operasional dengan harga minyak Indonesia *Crude Price* Banyu Urip (ICP) saat bulan *Loading* + US\$0.40/Barrel.

17. RISIKO BISNIS

Operasi-operasi Perusahaan tunduk pada bahaya dan risiko yang melekat pada produksi dan pengangkutan minyak dan gas seperti kebakaran, bencana alam, ledakan, menghadapi formasi dengan tekanan abnormal, ledakan, pembuatan lubang, pecahnya saluran pipa dan tumpahan yang mungkin mengakibatkan hilangnya hidrokarbon, polusi lingkungan, klaim cedera pribadi dan kerusakan lain terhadap harta kekayaan Perusahaan.

Disamping itu, operasi-operasi minyak dan gas Perusahaan terletak di wilayah yang terkena gangguan cuaca tropis, yang beberapa diantaranya dapat secara cukup buruk menyebabkan kerusakan penting terhadap fasilitas dan kemungkinan mengganggu produksi.

Untuk mengurangi pengaruh keuangan terhadap bahaya operasional yang mungkin terjadi, Perusahaan mengasuransikan beberapa, tetapi tidak semua, kerugian yang mungkin terjadi. Cakupan asuransi Perusahaan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas mereka mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hilangnya sumur, ledakan dan biaya kontrol polusi tertentu, kerusakan fisik terhadap aset tertentu, pertanggungjawaban pemberi kerja, kewajiban umum menyeluruh dan asuransi ganti kerugian pekerja.

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

As of August 12, 2022, LGC and Pertamina Cepu agreed to terminate the agreement. The Joint *Lifting* operation Banyu Urip crude oil was carried out by *Lifting Mandiri* by BKS PI Cepu. Total selling expenses in relation to this agreement for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to USD114,590 and USD109,579 (Catatan 9c).

On November 29, 2023, LGC (collectively referred to as the "Seller") entered into the Banyu Urip Crude Oil Sale and Purchase Agreement with PT Kilang Pertamina Internasional.

The estimated amount of oil to be lifted by Buyer during the PJM term is :

- a. Period October 01, 2023 - December 31, 2023: 100% of the Sellers' *entitlement* with an estimated volume of 290,000 barrels with a tolerance of $\pm 10\%$ operational tolerance at the Indonesian *Crude Price* Banyu Urip (ICP) oil price during the month of *Loading* + US\$0.00/Barrel.
- b. Period January 01, 2024 - December 31, 2024: 100% of the Sellers' *entitlement* with an estimated volume of 1,080,000 barrels per year or 80,000 - 90,000 barrels per month with $\pm 10\%$ operational tolerance at the Indonesian *Crude Price* Banyu Urip (ICP) oil price during the month of *Loading* + US\$0.40/Barrel.

17. BUSINESS RISK

The Company's operations are subject to hazards and risks inherent in the production and transportation of oil and gas, such as fires, natural disasters, explosions, encountering formations with abnormal pressures, blowouts, cratering, pipeline ruptures and spills which may result in the loss of hydrocarbons, environmental pollution, personal injury claims and other damage to the Company's properties.

Additionally, the Company's oil and gas operations are located in areas that are subject to tropical weather disturbances, some of which can be severe enough to cause substantial damage to facilities and possibly interrupt production.

In order to mitigate the financial impact of possible operational hazards, the Company maintains insurance coverage against some, but not all, potential losses. The Company's insurance coverage for their oil and gas exploration and production activities includes, but is not limited to, loss of wells, blowouts and certain costs of pollution control, physical damage to certain assets, employer liability, comprehensive general liability and worker's compensation insurance.

18. DIVIDEN

Berdasarkan Akta Notaris Iin Eka Lestari, S.H., Mkn., Nomor 7 tanggal 20 Februari 2024, Para pemegang saham menyetujui membagi Dividen saham kelas B kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan SER masing-masing sebesar USD7.609.719 dan USD22.829.156. Penggunaan laba bersih perseroan tahun 2023 disetujui akan digunakan untuk dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) 2% dari laba ditahan tahun 2023 sebesar USD580.385,20. Pada tanggal 29 Februari 2024, Perusahaan telah membayar dividen saham Kelas B.

Berdasarkan Akta Notaris Anik Farida Agustin, S.H., Mkn., M.H. Nomor 5 tanggal 12 April 2023, Para pemegang saham menyetujui membagi Dividen saham kelas B kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan SER masing-masing sebesar USD9.404.508 dan USD28.213.525. Penggunaan laba bersih perseroan tahun 2022 disetujui akan digunakan untuk dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) 2% dari laba ditahan tahun 2022 sebesar USD767.715. Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan telah membayar dividen saham Kelas B.

19. LIABILITAS BERSYARAT

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki liabilitas bersyarat.

18. DIVIDEND

Based on Notarial Deed No 5 of Iin Eka Lestari, S.H., Mkn., MH dated February 20, 2024, The Company's Shareholders approved distributing Class B share dividends to the Pemerintah Kabupaten Bojonegoro and SER amounting to USD7,609,719 and USD22,829,156. The use of the company's 2023 net profit was approved to be used for Corporate Social Responsibility (CSR) funds of 2% of 2023 retained earnings of USD580,385.20. On February 29, 2024, the Company paid a Class B share dividends.

Based on Notarial Deed No 5 of Anik Farida Agustin, S.H., Mkn., MH dated April 12, 2023, The Company's Shareholders approved distributing Class B share dividends to the Pemerintah Kabupaten Bojonegoro and SER amounting to USD9,404,508 and USD28,213,525. The use of the company's 2022 net profit was approved to be used for Corporate Social Responsibility (CSR) funds of 2% of 2022 retained earnings of USD767,715. On April 13, 2023, the Company paid a Class B share dividends.

19. CONTINGENT LIABILITY

As of December 31, 2024 and 2023 the Company had no contingent liabilities.

Informasi tambahan merupakan informasi Perusahaan per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang menunjukkan informasi keuangan Perusahaan dengan menunjukkan mata uang penyajian Rupiah (IDR) yang berbeda dari mata uang fungsionalnya yang USD (Catatan 4b). Namun, informasi tambahan dalam Rupiah tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa jumlah USD dalam Laporan Keuangan utama telah atau dapat dikonversikan ke Rupiah pada nilai tersebut atau nilai lain. Informasi tambahan bukan merupakan bagian Laporan Keuangan pokok yang disyaratkan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The supplementary information represents information of the Company as of and for the year ended December 31, 2024 which presents the Company's financial information using presentation currency of Indonesian Rupiah (IDR) that is different from its functional currency of USD (Note 4b). However, the supplementary information in Indonesian Rupiah should not be construed as a representation that the USD amount in the primary Financial Statements have been or could be converted into Indonesian Rupiah at that or any other rate, at all. This supplementary information is not a required part of the basic Financial Statements which are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
DISAJIKAN DENGAN MENGGUNAKAN RUPIAH
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PRESENTED USING INDONESIAN RUPIAH
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

ASET		ASSETS
ASET LANCAR		CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	691.684.920	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	73.141.066	Trade receivables
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	103.227	Advance and prepaid expenses
Total Aset Lancar	764.929.213	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR		NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - neto	46.983	Deferred tax assets - net
Aset tetap	2.080.841	Fixed Assets - Net
Investasi di PSC Blok Cepu	191.756.910	Investment in Cepu Block PSC
Total Aset Tidak Lancar	193.884.734	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	958.813.947	TOTAL ASSETS

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
DISAJIKAN DENGAN MENGGUNAKAN RUPIAH
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PRESENTED USING INDONESIAN RUPIAH
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Beban Akrua	383.153
Utang Pajak Penghasilan Badan	27.460.014
Total Liabilitas Jangka Pendek	27.843.167

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas imbalan kerja - neto	213.532
Total Liabilitas Jangka Panjang	213.532
Total Liabilitas	28.056.699

EKUITAS

Modal saham	
Saham Kelas A	8.000
Saham Kelas B	8.000.000
Selisih nilai tukar asing pada modal disetor	(15.146.143)
Saldo laba	360.587.804
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	13.366
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	577.294.221
Total Ekuitas	930.757.248

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	958.813.947
------------------------------	-------------

LIABILITIES AND EQUITY

SHORT-TERM LIABILITIES

Accured Expenses	
Corporate Income Taxes Payable	
Total Short-Term Liabilities	

LONG-TERM LIABILITY

Employee benefits liability - net	
Total Long-term Liabilities	
Total Liabilities	

EQUITY

Share capital	
Class A Shares	
Class B Shares	
Foreign exchange rate difference in paid-in capital	
Retained Earnings	
Remeasurement on employee benefits liability	
Exchange difference due to financial statement translation	
Total Equity	

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	
------------------------------	--

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
DISAJIKAN DENGAN MENGGUNAKAN RUPIAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan
lain)

PT ASRI DHARMA SEJAHTERA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PRESENTED USING INDONESIAN RUPIAH
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise
stated)

PENGHASILAN DARI PSC	673.014.923
BEBAN USAHA	
Beban penjualan	1.822.649
Beban umum dan administrasi	3.910.623
Beban tanggung jawab sosial dan lingkungan	10.141.207
Gaji dan upah	2.376.347
Total Beban Usaha	18.250.826
LABA USAHA	654.764.097
PENGHASILAN LAIN-LAIN	
Pendapatan bunga	17.262.470
Beban keuangan	(5.519)
Beban lain-lain - Neto	(5.708.109)
Total Penghasilan Lain-lain - Neto	11.548.842
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	666.312.939
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	
Kini	(243.112.245)
Tangguhan	(8.064)
Total Beban Pajak Penghasilan	(243.120.309)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	423.192.630
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto	(334)
Pajak penghasilan terkait	80
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO	(254)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	52.635.873
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	475.828.249

INCOME FROM PSC
OPERATING EXPENSES
Selling expenses
General and administrative expenses
Corporate social responsibility expenses
Salaries and wages
Total Operating Expenses
OPERATING INCOME
OTHER INCOME
Interest income
Financing charges
Other charges - Net
Total Other Income - Net
INCOME BEFORE INCOME TAX
INCOME TAX EXPENSE
Current
Deferred
Total Income Tax Expense
NET INCOME FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Remeasurement of the net defined benefit liability
Related income tax
NET OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET
Exchange difference due to financial statement translation
TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

